

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lahat adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas Kabupaten Lahat. Informasi tersebut berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; serta
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan pemerintah harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh atas kegiatan pemerintah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan harus disajikan dengan memenuhi hal-hal berikut.

- a. Disajikan dengan menunjukkan perbandingan antara periode berjalan dengan periode sebelumnya. Agar perbandingan dapat bermanfaat, maka informasi keuangan dari periode berjalan harus dilaporkan secara konsisten dengan informasi pada periode sebelumnya. Apabila terjadi perubahan akuntansi harus diungkapkan dalam laporan keuangan;
- b. Diterbitkan tepat waktu segera setelah periode akuntansi berakhir;
- c. Laporan keuangan harus menyajikan transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian yang penting. Informasi laporan keuangan dapat diandalkan bila pemakai laporan dapat menggunakan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan atas transaksi dan kejadian yang penting berdasarkan kondisi keuangan yang sesungguhnya; dan
- d. Laporan keuangan mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lahat yaitu:

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, pada lampiran:

1) Bab VII:

a) Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan:

- 1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- 2) SAPD; dan
- 3) Bagan Akun Standar (BAS) untuk Daerah.

b) Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

c) Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah meliputi kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun:

- 1) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
- 2) Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan SAP atas:
 - a) pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP; dan
 - b) pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.

d) SAPD memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku besar, penyusunan Neraca saldo, dan penyajian laporan keuangan. SAPD meliputi sistem akuntansi SKPKD dan sistem akuntansi SKPD.

e) Penyajian laporan keuangan paling sedikit meliputi:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran;
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- 3) Neraca;
- 4) Laporan Operasional;
- 5) Laporan Arus Kas;
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lahat, terdiri atas.

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);

c. Neraca;

d. Laporan Operasional (LO);

- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan, adalah sebagai berikut.

I. Pendahuluan

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Memuat penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Memuat penjelasan mengenai sistematika isi catatan atas laporan keuangan.

II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1. Ekonomi Makro

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan penyusunan APBD dan perkembangannya dalam perubahan APBD sampai dengan pelaksanaan APBD akhir Tahun anggaran. Informasi yang disajikan memuat tentang posisi dan kondisi ekonomi makro periode berjalan dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun anggaran sebelumnya. Dalam bagian ini juga dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan asumsi makro ekonomi yang membawa dampak terhadap peningkatan atau penurunan (fluktuasi) asumsi yang ditetapkan.

2.2. Kebijakan Keuangan

Memuat penjelasan mengenai kebijakan keuangan yang ditetapkan pemerintah daerah sampai dengan akhir Tahun anggaran yang berimplikasi terhadap perubahan posisi Neraca dan Laporan Arus Kas. Informasi yang disajikan memuat tentang posisi dan kondisi keuangan periode berjalan dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun anggaran sebelumnya. Dalam bagian ini juga dijelaskan mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi ditempuhnya kebijakan keuangan oleh pemerintah daerah, sehingga terjadinya perubahan terhadap posisi Neraca dan Laporan Arus Kas.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Memuat penjelasan mengenai keberhasilan pencapaian target kinerja APBD yang dicerminkan melalui indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun pelaporan menurut urusan pemerintahan daerah. Indikator pencapaian target kinerja menyajikan informasi tentang pencapaian efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan. Dalam bagian ini dijelaskan juga faktor pendorong tercapainya tingkat keberhasilan (efektivitas dan efisiensi) atau faktor penghambat tidak tercapainya indikator target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan baik yang bersifat dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan (*force majeure*).

III. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD Pemerintah Daerah, rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi keuangan Pemerintah Daerah.

IV. Kebijakan Akuntansi

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos pendapatan, belanja dan pembiayaan.

5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih.

5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca

Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos Neraca.

5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos pendapatan dan beban.

5.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos laporan arus kas.

5.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos dalam perubahan ekuitas.

VI. Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu:

6.1. Informasi Umum

6.2. Organisasi

6.3. Kejadian Setelah Tanggal Neraca

VII. Penutup

Memuat uraian penutup yang dapat berupa simpulan-simpulan penting tentang laporan keuangan.

LAMPIRAN

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET
KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

2.1.1. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara ASEAN - China (ACFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional. Krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia juga terjadi pada tahun 2020-2021 dengan adanya wabah Covid-19. Krisis yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 2,07 % pada tahun 2020.

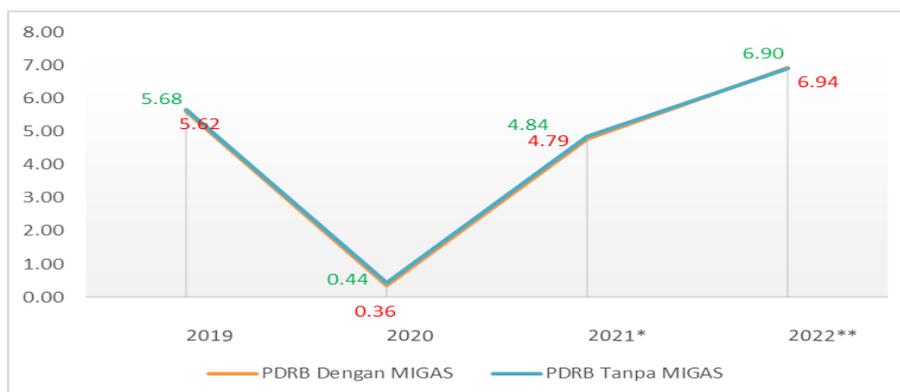
Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of National Accounts* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT).

Perubahan tahun dasar PDB dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan PDRB Provinsi untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan. Dari yang sebelumnya tahun dasar 2000 terdapat 9 lapangan usaha, maka di tahun dasar 2010 lapangan usaha (kategori) terbagi menjadi 17 lapangan usaha.

Seperti telah diuraikan sebelumnya, PDRB adalah kumulatif nilai tambah bruto dari seluruh lapangan usaha. Namun dari perhitungan tersebut, PDRB dapat diartikan sebagai kemampuan suatu wilayah untuk menghasilkan barang dan jasa dari seluruh kegiatan ekonomi yang ada, karenanya PDRB merupakan cerminan perekonomian suatu wilayah.

PDRB atas dasar harga berlaku dengan migas Kabupaten Lahat tahun 2022 terhitung sebesar 26,75 triliun rupiah. Angka tersebut menggambarkan besarnya nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan harga di tahun 2022. Sedangkan untuk PDRB atas dasar harga konstan sebesar 13,92 triliun rupiah dengan pertumbuhan 6,90%. Apabila mengeliminasi faktor migas, PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan Kabupaten Lahat tahun 2022 masing-masing sebesar 26,62 triliun rupiah dan 13,92 triliun rupiah. Kondisi tersebut disajikan pada **Grafik 1**.

Grafik 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lahat (TD 2010=100) 2018-2022



**Tabel 2.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lahat (TD 2010=100)
Menurut Kategori, 2018-2022**

Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.37	1.57	1.05	3.84	2.63
B	Pertambangan dan Penggalian	4.89	8.98	1.59	8.21	12.42
C	Industri Pengolahan	5.46	4.64	1.57	1.73	2.72
D	Pengadaan Listrik dan Gas	18.57	15.85	15.92	7.41	6.86
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	7.38	8.41	5.85	0.98	1.63
F	Konstruksi	2.24	2.62	1.74	0.70	2.77
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	6.27	8.86	-7.21	3.64	6.41
H	Transportasi dan Pergudangan	1.72	2.53	-6.42	1.53	6.66
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.70	10.07	-7.03	4.80	5.14
J	Informasi dan Komunikasi	2.05	4.76	8.24	3.80	4.22
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.31	1.17	0.75	0.99	0.67
L	Real Estate	3.36	3.14	-0.73	2.47	3.18
M,N	Jasa Perusahaan	5.61	5.74	-2.98	2.68	2.87
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	3.68	1.79	1.87	0.35	2.14
P	Jasa Pendidikan	3.67	4.21	-1.90	1.40	2.33
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.65	4.25	6.04	2.90	2.44
R,S,T,U	Jasa lainnya	7.44	6.56	4.26	1.10	2.16
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		4.07	5.62	0.36	4.79	6.90
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		4.14	5.68	0.44	4.84	6.94

Ket *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lahat selama periode 2018 sampai dengan 2022 menunjukkan laju pertumbuhan perekonomian yang berfluktuasi, pertumbuhan melambat di tahun 2018 kemudian dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan pertumbuhan melambat signifikan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lahat mulai tumbuh membaik di tahun 2021 seiring dengan mulai menurunnya kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).

Berdasarkan Grafik 1 terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lahat tanpa migas selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, mengalami perlambatan terbesar pada tahun 2020 yang kemudian kembali menunjukkan percepatan di tahun 2021 dan membaik pada tahun 2022. Demikian juga pada laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lahat dengan migas pada periode tahun 2018-2022. Tahun 2022, pertumbuhan ekonomi tanpa migas juga mengalami pertumbuhan cukup besar dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi migas tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 adalah sebesar 6,90% dan tanpa migas adalah sebesar 6,94%. PDRB Kabupaten Lahat tumbuh membaik di tahun 2022 pasca pandemi Covid-19, hal ini disebabkan oleh kenaikan produksi dan harga secara signifikan untuk sektor unggulan Pertambangan. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 12,42% diikuti Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 6,86%, diikuti sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,66% yang menggeser sektor penyediaan akomodasi makan dan minum pada tahun sebelumnya yang berada pada urutan ketiga, Kondisi tersebut disajikan pada **Tabel 2.1**.

2.1.2. Struktur Ekonomi

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, struktur ekonomi Kabupaten Lahat tidak mengalami perubahan, tetap berciri struktur ekonomi berbasis sumber daya alam. Hal ini ditandai dengan peranan kategori pertambangan dan kategori pertanian yang masih

tetap tinggi dalam pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku. Kondisi tersebut disajikan pada **Tabel 2.2.**

**Tabel 2.2. Struktur Ekonomi Kabupaten Lahat (TD 2010=100)
Menurut Kategori, 2018-2022**

Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,058,184.4	3,159,679.0	3,320,831.5	3,579,896.0	3,751,665.6
B	Pertambangan dan Penggalian	5,456,487.8	5,947,297.5	5,838,530.2	7,568,424.3	14,095,990.8
C	Industri Pengolahan	863,269.7	923,549.7	977,031.3	1,026,593.3	1,085,633.9
D	Pengadaan Listrik dan Gas	88,158.7	102,141.0	119,842.4	132,071.3	143,330.2
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	4,573.3	5,071.2	5,419.0	5,588.1	5,742.8
F	Konstruksi	1,530,726.2	1,581,289.9	1,622,879.9	1,657,569.8	1,741,472.2
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,220,424.5	2,502,349.0	2,373,232.9	2,504,313.3	2,723,932.3
H	Transportasi dan Pergudangan	199,350.6	208,161.7	197,679.6	202,858.3	228,765.8
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	236,981.2	273,518.9	259,235.6	273,799.1	293,819.2
J	Informasi dan Komunikasi	131,088.0	140,774.8	154,622.5	160,595.6	168,527.6
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	271,184.7	278,738.7	281,273.0	286,369.1	296,447.4
L	Real Estate	435,004.0	460,552.7	469,821.3	481,490.6	512,888.0
M,N	Jasa Perusahaan	7,755.8	8,365.8	8,313.2	8,587.0	8,939.1
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan Umum	842,860.9	858,179.4	897,846.8	901,952.4	934,336.0
P	Jasa Pendidikan	430,383.6	455,697.6	459,948.9	474,988.7	497,603.4
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	123,904.2	130,797.7	143,429.3	148,699.7	156,180.6
R,S,T,U	Jasa lainnya	83,996.7	94,036.0	100,634.0	101,939.9	105,204.1
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		15,984,334.3	17,130,200.6	17,230,571.3	19,515,736.6	26,750,479.0
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		15,862,649.0	17,002,156.6	17,119,292.2	19,394,470.1	26,619,635.8

Ket *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara

Pada Tahun 2022, Sektor Primer peranannya terhadap perekonomian Kabupaten Lahat mencapai 56,72%, yang terdiri dari:

- a. Sektor Pertambangan dan Penggalian; serta
- b. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;

Sektor sekunder peranannya terhadap perekonomian Kabupaten Lahat mencapai 11,13%, yang terdiri dari:

- a. Sektor Industri Pengolahan;
- b. Sektor Pengadaan Listrik dan Gas;
- c. Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; serta
- d. Sektor Konstruksi.

Sektor tersier peranannya terhadap perekonomian Kabupaten Lahat mencapai 22,16% yang terdiri dari:

- a. Sektor Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor;
- b. Sektor Transportasi dan Pergudangan;
- c. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
- d. Sektor Informasi dan Komunikasi;
- e. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi;
- f. Sektor *Real Estate*;
- g. Sektor Jasa Perusahaan;

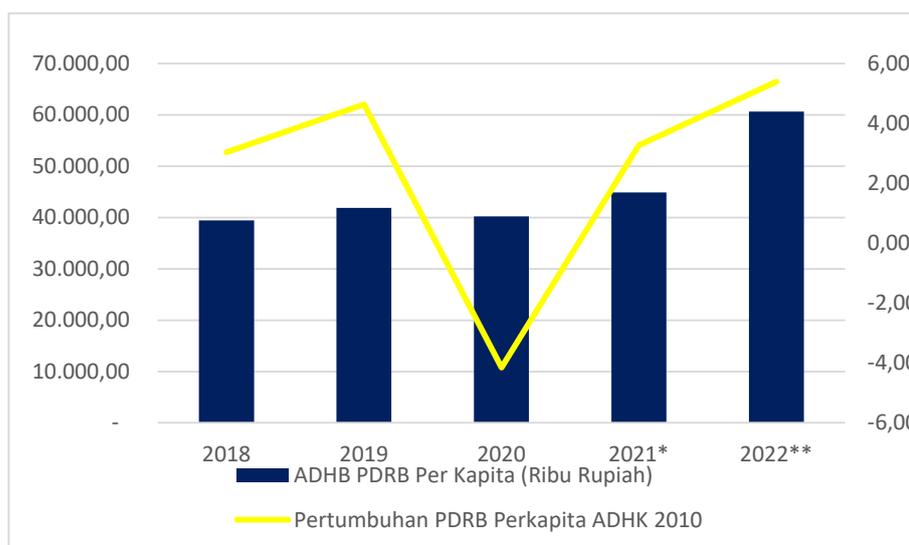
- h. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan
- i. Sektor Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Jasa lainnya.

2.1.3. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. Nilai PDRB per kapita didapat dari hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut. Nilai PDRB per kapita ini sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah penduduk, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB tergantung atas potensi Sumber Daya Alam dan faktor-faktor produksi yang ada di wilayah tersebut.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Lahat pada periode 2018-2022 berdasarkan atas harga berlaku dengan migas tiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp44.870.054.320,01 mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi sebesar Rp60.634.758,509,11. Gambaran nilai PDRB Perkapita disajikan pada **Grafik 2**.

Grafik 2. PDRB Per kapita Kabupaten Lahat Atas Dasar Harga Berlaku (Rp) dan Pertumbuhan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2010), 2018-2022



Ket : *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara

Berdasarkan informasi data di atas pertumbuhan PDRB perkapita yang meningkat selama lima tahun terakhir diikuti dengan peningkatan PDRB per kapita ADHB, menunjukkan bahwa secara internal ada peningkatan produktivitas faktor-faktor produksi di Kabupaten Lahat. Setelah pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 mengalami keterpurukan sebesar -4,15% yang sangat mempengaruhi konsumsi masyarakat, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lahat mampu meningkat signifikan pada tahun 2021 sebesar 3,27%. Hal ini terlihat pada **Grafik 2** untuk pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK 2010) bahkan pada tahun 2022 tumbuh menjadi 5,39 %.

Secara kategori Kabupaten Lahat mempunyai prospek yang menjanjikan di dua kategori yaitu kategori pertambangan dan penggalian dan kategori pertanian, keadaan ini dapat dikaitkan dengan dominannya kategori pertambangan dan pertanian dalam pembentukan PDRB, berperannya kedua kategori ini tidak lepas dari hasil produksi komoditas tanaman perkebunan (kopi, karet, sawit, dll) dan tanaman pangan (padi, palawija, dll) serta hasil produksi batubara

yang sejauh ini komoditas tersebut menjadi produk unggulan di Kabupaten Lahat bahkan di Provinsi Sumatera Selatan.

2.2. Kebijakan Keuangan

2.2.1. Pendapatan

Anggaran Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Lahat pada dasarnya merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan pada tahun anggaran tertentu. Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021, proyeksi Pendapatan Daerah dianggarkan dalam APBD Tahun 2022 sebesar Rp2.233.164.766.531,00 atau mengalami peningkatan sebesar 8,04% dari anggaran Tahun 2021 sebesar Rp2.067.033.883.961,00. Peningkatan ini disebabkan karena anggaran Pendapatan Transfer Tahun 2022 sebesar Rp2.023.425.788.998,00 meningkat 8,02% dibanding anggaran Tahun 2021 sebesar Rp1.873.165.621.651,00.

Penerimaan yang bersumber dari PAD Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp149.997.796.007,00 atau 6,72% dari total anggaran pendapatan dan mengalami peningkatan 27,66% dibandingkan anggaran Tahun 2021 sebesar Rp117.494.699.696,00. Pendapatan Transfer Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp2.023.425.788.998,00 atau 90,61% dari total anggaran pendapatan, atau mengalami peningkatan 8,021% dari anggaran Tahun 2021 sebesar Rp1.873.165.621.651,00. Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp59.741.181.526,00 yang merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat. Dalam upaya meningkatkan penerimaan pendapatan daerah, maka pemerintah daerah melakukan strategi dalam prioritas pendapatan daerah, sebagai berikut.

- a. Upaya peningkatan kinerja pemungutan pajak daerah;
- b. Peningkatan sistem dan prosedur pengelolaan pajak daerah;
- c. Peningkatan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat;
- d. Penetapan tarif retribusi berbasis prinsip, sasaran objek retribusi daerah, dan penetapan tarif pajak daerah yang wajar; serta
- e. Penggalian potensi – potensi pendapatan daerah.

2.2.2. Belanja Daerah

Dalam menyusun APBD Tahun 2022 terdapat hal khusus lainnya yang perlu diperhatikan yang merupakan pengeluaran wajib bagi pemerintah daerah (*mandatory spending*) yang merupakan pengeluaran yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Belanja wajib tersebut meliputi:

- a. Alokasi Anggaran Pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
- b. Besar Anggaran Kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).

Mulai Tahun Anggaran 2020, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diberlakukan batas minimal alokasi anggaran untuk pengawasan internal di Pemerintah Daerah. Untuk pemerintah kabupaten/kota APBD sampai dengan

Rp1.000.000.000.000,00 setidaknya dialokasikan 1,00% untuk pengawasan, Kabupaten/kota dengan APBD di atas Rp1.000.000.000.000,00 sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 maka anggaran pengawasan minimal 0,75% dari total belanja. Sedangkan untuk daerah dengan APBD di atas Rp2.000.000.000.000,00 maka sekurang-kurangnya 0,50% dari total belanja untuk pengawasan.

Penganggaran APBD Kabupaten Lahat terkait dengan *mandatory spending* untuk 3 (tiga) Tahun terakhir dapat dijelaskan pada Tabel 2.3, 2.4, dan 2.5.

Alokasi Anggaran untuk Fungsi Pendidikan dijelaskan pada **Tabel 2.3**.

Tabel 2.3. Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan

Tahun	Total Anggaran Belanja Daerah (Rp)	Total Anggaran Fungsi Pendidikan (Rp)	%	Batas Minimal %
2020	2.122.527.171.436,50	15.836.293.803,00	21,81%	20%
2021	2.341.721.562.074,00	20.691.714.016,00	22,50%	20%
2022	2.576.228.009.902,00	26.188.259.638,00	21,11%	20%

Alokasi Anggaran untuk Fungsi Kesehatan di jelaskan pada **Tabel 2.4**.

Tabel 2.4. Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan

Tahun	Total Anggaran Belanja Daerah (Rp)	Total Anggaran Fungsi Kesehatan (Rp)	%	Batas Minimal %
2020	2.122.527.171.436,50	251.348.341.178,50	15,94%	10%
2021	2.341.721.562.074,00	378.879.576.150,00	20,04%	10%
2022	2.576.228.009.902,00	442.861.898.943,00	21,38%	10%

Alokasi Anggaran untuk Fungsi Pengawasan dijelaskan pada **Tabel 2.5**.

Tabel 2.5. Alokasi Anggaran Fungsi Pengawasan

Tahun	Total Anggaran Belanja Daerah (Rp)	Total Anggaran Fungsi Pengawasan (Rp)	%	Batas Minimal %
2020	2.122.527.171.436,50	15.836.293.803,00	0,75%	0,50%
2021	2.341.721.562.074,00	20.691.714.016,00	0,88%	0,50%
2022	2.576.228.009.902,00	26.188.259.638,00	1,02%	0,50%

Untuk Realisasi Fungsi Pendidikan, Kesehatan dan Pengawasan untuk kurun waktu 3 (tiga) Tahun terakhir dijelaskan pada **Tabel 2.6, 2.7, dan 2.8**.

Belanja untuk Fungsi Pendidikan dijelaskan pada **Tabel 2.6**.

Tabel 2.6. Realisasi Belanja untuk Fungsi Pendidikan

Tahun	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Belanja Fungsi Pendidikan (Rp)	%	Batas Minimal %
2020	2.006.514.768.190,25	462.830.406.883,00	23,07%	20%
2021	2.112.681.151.755,08	482.396.317.513,00	22,83%	20%
2022	2.298.651.235.004,21	480.047.318.899,00	20,88%	20%

Belanja untuk Fungsi Kesehatan di jelaskan pada **Tabel 2.7**.

Tabel 2.7. Realisasi Belanja untuk Fungsi Kesehatan

Tahun	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Belanja Fungsi Kesehatan (Rp)	%	Batas Minimal %
2020	2.122.527.171.436,50	204.123.703.395,25	13,77%	10%
2021	2.112.681.151.755,08	312.819.023.813,83	18,39%	10%
2022	2.298.651.235.004,21	353.031.446.162,71	18,77%	10%

Belanja untuk Fungsi Pengawasan dijelaskan pada **Tabel 2.8**.

Tabel 2.8. Realisasi Belanja untuk Fungsi Pengawasan

Tahun	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Belanja Fungsi Pengawasan (Rp)	%	Batas Minimal %
2020	2.122.527.171.436,50	14.800.662.649,00	0,74%	0,50%
2021	2.112.681.151.755,08	16.836.633.956,00	0,80%	0,50%
2022	2.298.651.235.004,21	15.547.251.889,00	0,68%	0,50%

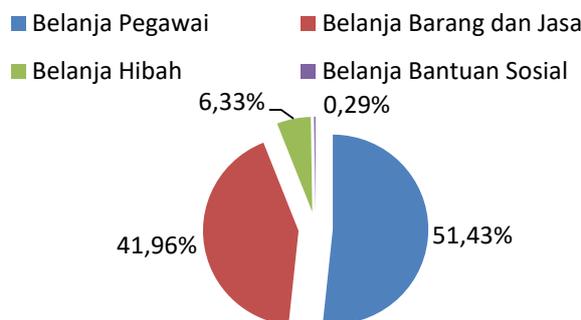
Selain Belanja Fungsi Pendidikan, Kesehatan dan Pengawasan Pemerintah Daerah juga mengalokasikan untuk Belanja Covid-19, Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta Belanja Inflasi.

Untuk Realisasi Belanja Covid-19 pada Tahun 2022 sebesar Rp11.762.517.191,00 atau 22,95% dari anggaran sebesar Rp51.244.300.477,00, rendahnya penyerapan anggaran tersebut dikarenakan kasus Covid-19 di Kabupaten Lahat pada Tahun 2022 sangat rendah, hal tersebut sejalan dengan himbauan pemerintah agar masyarakat memperkuat protokol kesehatan untuk menjaga diri dari tertular Covid-19, serta upaya untuk pencegahan seperti meningkatkan vaksinasi dosis lengkap dan booster. Sedangkan dampak dari Covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi hingga Tahun 2022 masih dirasakan oleh masyarakat. Sehingga pemerintah meluncurkan 6 (enam) kebijakan utama Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yaitu, penanganan kesehatan, perlindungan sosial, insentif bagi dunia usaha, dukungan untuk dunia Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pembiayaan korporasi, serta program sektor Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah. Untuk realisasi belanja PEN Tahun 2022 sebesar Rp107.920.267.782,00 atau 70,66% dari anggaran sebesar Rp152.740.498.454,00.

Belanja untuk mendukung program penanganan dampak inflasi, daerah mengalokasikan belanja wajib perlindungan sosial (perlinsos) yang peruntukannya untuk pemberian bantuan sosial, termasuk kepada ojek, usaha mikro, kecil dan menengah, serta nelayan. Kemudian untuk penciptaan lapangan kerja, serta pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah. Realisasi untuk belanja penanganan dampak inflasi sebesar Rp12.205.559.422,00 atau 70,87% dari anggaran sebesar Rp17.222.130.984,00.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ditetapkan bahwa belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) akan mengelompokkan belanja menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga. Belanja Operasi adalah belanja yang dikeluarkan dari Kas Daerah dalam rangka menyelenggarakan operasional pemerintah, sedangkan Belanja Modal adalah belanja yang dikeluarkan dalam rangka membeli dan/atau mengadakan barang modal. Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tak terduga lainnya. Berikut proporsi anggaran untuk belanja operasional Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2021. Kondisi tersebut disajikan pada **Grafik 3**.

Grafik 3. Persentase Proporsi Anggaran Belanja Operasional Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun 2022



Belanja Operasi dianggarkan Tahun 2022 sebesar Rp1.406.879.137.661,00 yaitu 54,61% dari jumlah anggaran Belanja Daerah Tahun 2022. Jumlah ini meningkat 3,53% dari anggaran Belanja Operasi Tahun 2021 sebesar Rp1.358.917.884.875,00. Komponen terbesar dalam Belanja Operasi adalah Belanja Pegawai sebesar Rp727.096.206.586,00 atau 51,68% dari Belanja Operasi. Peningkatan besaran rencana Belanja Pegawai ini disebabkan karena penambahan Belanja Pegawai PPPK dan usaha mencadangkan penambahan gaji ke-14 PNS sesuai dengan program Pemerintah Pusat dan rencana pembayaran tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, untuk akun Belanja dan Belanja Transfer terpisah, sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Belanja dan Belanja Transfer di-*mapping* ke akun Belanja Daerah.

Jumlah Belanja Daerah pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp2.576.228.009.902,00 atau mengalami peningkatan 10,01% dibandingkan anggaran Belanja Daerah Tahun 2021 sebesar Rp2.341.721.562.074,00.

Belanja Modal Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp705.196.764.966,00 atau mengalami peningkatan 36,82% dari jumlah anggaran Belanja Modal Tahun 2021 sebesar Rp515.402.952.274,00. Komponen terbesar dalam rencana Belanja Modal adalah Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan yaitu sebesar Rp493.891.367.029,00 atau 70,04% dari total anggaran Belanja Modal atau 19,17% dari jumlah Anggaran Belanja Daerah.

Belanja Tak Terduga Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp4.847.477.275,00 atau 0,19% dari jumlah Belanja Daerah. Menurunnya anggaran Tahun 2022 untuk Belanja Tak Terduga dibanding Tahun 2021 dikarenakan untuk pendanaan penanganan Pandemi Covid-19 dianggarkan pada Rekening Belanja di masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat.

2.2.3. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Anggaran Pembiayaan Tahun 2022 yaitu Penerimaan Pembiayaan berasal dari Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp346.813.243.371,00. Untuk anggaran Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya masing-masing sebesar Rp0,00. Pemerintah Kabupaten Lahat tidak menyelenggarakan penerimaan pembiayaan yang berasal dari sumber lain seperti utang dalam negeri dan pencairan dana cadangan.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan untuk Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp3.750.000.000,00 untuk Penyertaan Modal Daerah.

2.3. Gambaran Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lahat

Jumlah Penduduk Kabupaten Lahat pada Tahun 2021 sebanyak 434.940 jiwa , dimana jumlah penduduk laki-laki sebanyak 222.374 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 212.565 jiwa. Kabupaten Lahat masih mengalami bonus demografi, dimana jumlah penduduk usia produktif jauh melebihi penduduk usia non produktif.

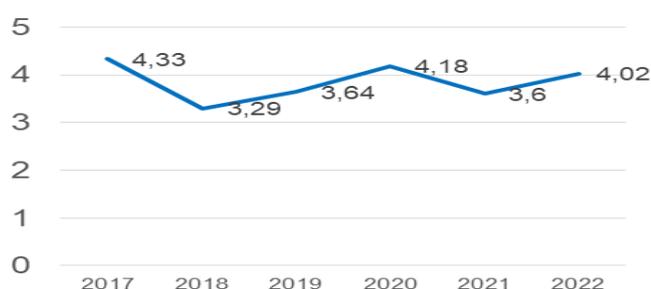
Untuk kualitas pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lahat pada Tahun 2022 adalah sebesar 68,40, dengan Umur Harapan Hidup Saat Lahir 66,52 Tahun, Pengeluaran Riil Perkapita yang Disesuaikan sebesar Rp10.296.000,00, rata-rata lama sekolah 8,53 Tahun dan Angka Harapan Lama Sekolah 12,43 Tahun. Diantara 17 Kabupaten/Kota Sumatera Selatan, IPM Kabupaten Lahat berada pada peringkat 9. Berikut perkembangan nilai IPM Kabupaten Lahat dibandingkan perkembangan IPM Sumatera Selatan dapat dilihat pada **Grafik 4**.

Grafik 4. Perkembangan Nilai IPM 2010 - 2022



Sedangkan kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Ketenagakerjaan Kabupaten Lahat Tahun 2022 memiliki nilai Tingkat Pengangguran Terbuka 4,02 dan nilai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 70,73. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lahat Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,402% dibandingkan Tahun 2021, sedangkan untuk perkembangan nilai TPT Kabupaten Lahat dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 dapat digambarkan pada **Grafik 5**.

Grafik 5. Tingkat Pembangunan Terbuka (TPT) Kabupaten Lahat Tahun 2017 – 2022.



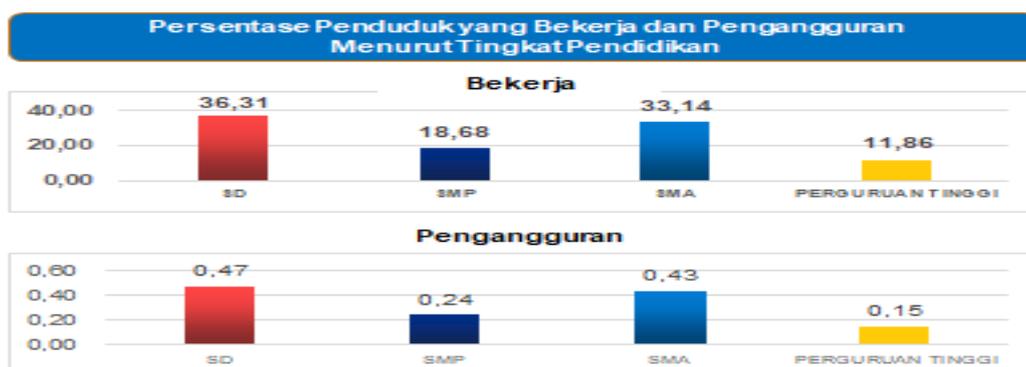
Berikut dapat juga digambarkan prosentase penduduk Kabupaten Lahat yang bekerja menurut lapangan usaha utama pada **Grafik 6**.

Grafik 6. Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama



Sedangkan untuk persentase penduduk yang bekerja dan pengangguran menurut tingkat pendidikan dapat dijelaskan pada **Grafik 7**.

Grafik 7. Persentase Penduduk Yang Bekerja dan Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan



Kemiskinan masih menjadi permasalahan utama di Kabupaten Lahat dengan jumlah penduduk miskin ekstrem lebih dari 47,09% dari total penduduk miskin di Kabupaten Lahat. Hal ini disebabkan salah satunya adalah 7 sektor ekonomi di Kabupaten Lahat yang tumbuh secara negatif pasca pandemi Covid-19. Sektor ekonomi yang tumbuh negatif adalah pengadaan listrik, air, konstruksi, informasi komunikasi, administrasi pemerintahan, jasa kesehatan dan jasa lainnya. Pemerintah Kabupaten Lahat tetap berkomitmen terus melakukan upaya-upaya pemberantasan kemiskinan. Pemerintah Kabupaten Lahat telah melakukan beberapa tindak lanjut untuk penanganan kemiskinan melalui program kegiatan sebagai berikut:

I. Sektor Bantuan Sosial:

- a. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial (Santunan Kematian).

II. Sektor Penciptaan Lapangan pekerjaan

- a. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.
- b. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster

Kompetensi.

c. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online.

III. Subsidi Sektor Transportasi

a. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Bantuan BBM).

IV. Perlindungan Sosial Lainnya

a. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (termasuk Operasi Pasar).

b. Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro (Bantuan Bahan Produksi kepada UMKM).

c. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Lahat.

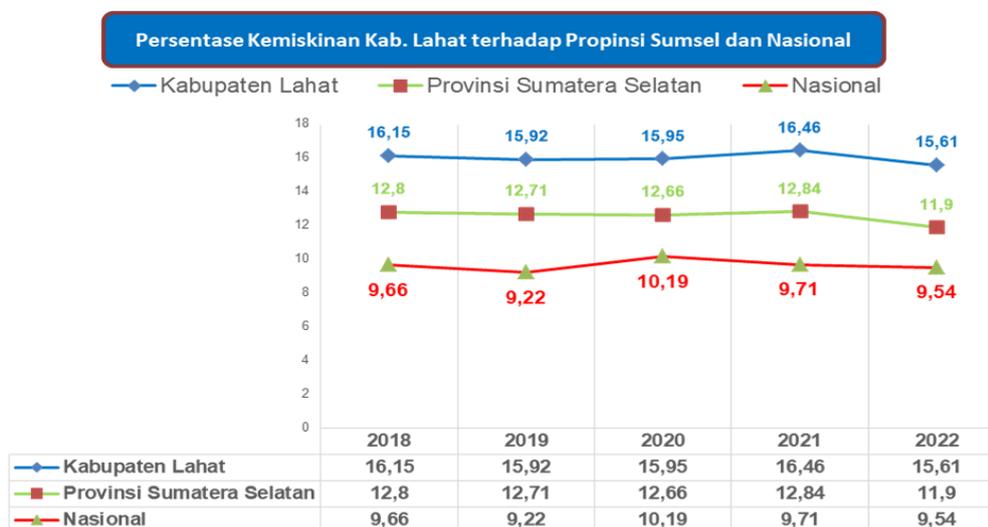
d. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

e. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Bantuan Bibit Ternak).

f. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Bantuan bibit Tanaman dan Pupuk).

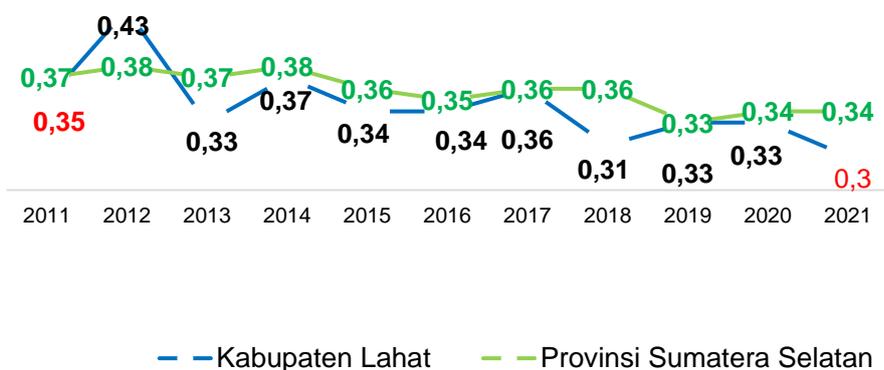
Namun kesenjangan ekonomi (*Gini Ratio*) antara penduduk kaya dan miskin membaik. Persentase kemiskinan Kabupaten Lahat terhadap Provinsi Sumatera Selatan dapat digambarkan pada **Grafik 8**.

Grafik 8 . Persentase Kemiskinan Kabupaten Lahat Terhadap Provinsi Sumatera Selatan



Untuk *Gini Ratio* Kabupaten Lahat terhadap Provinsi Sumatera Selatan dapat digambarkan pada **Grafik 9**.

Grafik 9. Gini Ratio Kabupaten Lahat terhadap Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2021

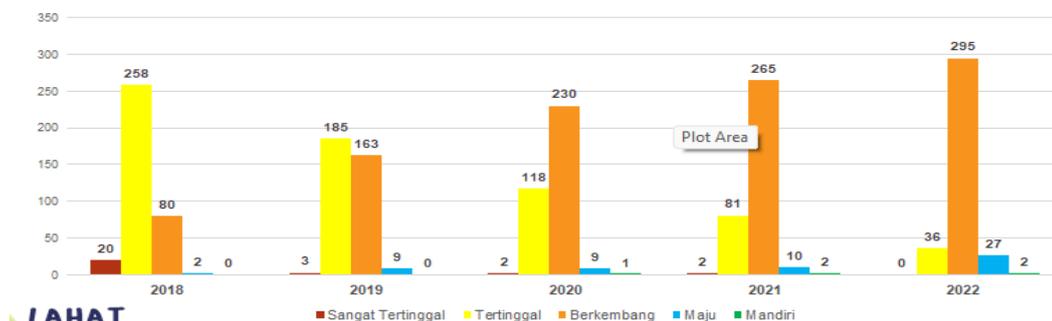


Gini Ratio Pemerintah Kabupaten Lahat yang membaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan Pemerintah Kabupaten Lahat juga terus melakukan upaya-upaya pemberantasan kemiskinan. Salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan penganggaran Belanja Modal pada Tahun 2022, jika dibandingkan Tahun 2021 anggaran Belanja Modal meningkat sebesar 36,82%. Belanja modal difokuskan pada pembangunan-pembangunan infrastruktur di desa-desa, contohnya adalah peningkatan pembangunan jalan di desa-desa guna memperlancar dan mempercepat roda perekonomian desa-desa di Kabupaten Lahat.

Hal ini seiring dengan Indeks Desa Membangun, dimana dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Kabupaten Lahat cukup berhasil dalam membangun kemandirian desa. Tahun 2022, tidak ada lagi desa di Kabupaten Lahat dalam status sangat tertinggal. Desa Tertinggal menurun menjadi hanya 36 desa dari 258 desa di Tahun 2018. Desa Berkembang menjadi 295 desa dari 80 desa di Tahun 2018. Desa Maju menjadi 27 desa, dan ada 2 desa yang naik menjadi level Desa Mandiri di Tahun 2022. Hal tersebut dapat digambarkan pada **Grafik 10**.

Grafik 10. Indeks Desa Membangun Berdasarkan Jumlah Desa di Kabupaten Lahat Tahun 2018-2022

STATUS DESA (INDEKS DESA MEMBANGUN) BERDASARKAN JUMLAH DESA KABUPATEN LAHAT 2018-2022



Seiring pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19, pertumbuhan Ekonomi, PDRB Per Kapita Kabupaten Lahat mengalami perbaikan. Inflasi yang lebih tinggi pada Tahun 2021 yaitu sebesar 4,49% disebabkan oleh mulai pulihnya aktivitas perekonomian setelah mengalami tekanan akibat pandemi Covid-19 yang cukup berat pada tahun sebelumnya.

Dari 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, Lahat merupakan daerah nomor 7 terbesar dalam kontribusi perekonomian di Sumatera Selatan. Sektor utama yang berkontribusi

ke perekonomian Kabupaten Lahat adalah pertambangan, penggalian, pertanian, perdagangan dan konstruksi. Persentase kontribusi 4 (empat) sektor utama dalam perekonomian Kabupaten Lahat dapat dilihat pada **Grafik 10**.

Grafik 11. Persentase Kontribusi Empat Sektor Utama dalam Perekonomian Kabupaten Lahat.

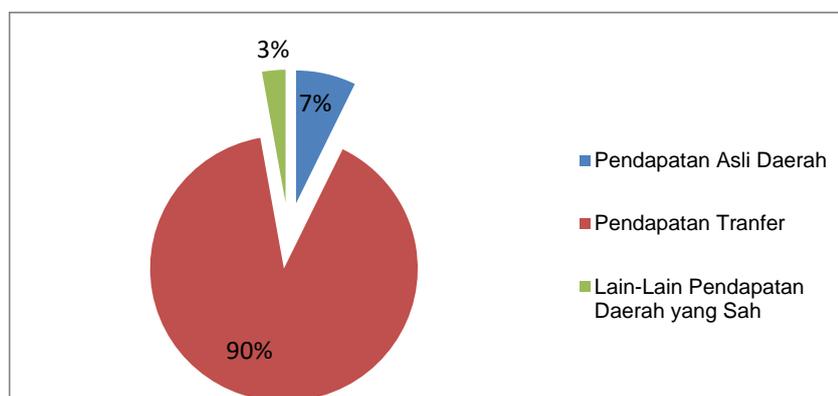


2.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022 sebesar Rp2.380.578.642.455,22 atau 106,60% dari anggaran sebesar Rp2.233.164.766.531,00. Penerimaan yang bersumber dari PAD terealisasi tahun 2022 sebesar Rp172.372.518.276,85 atau 7,24% dari total realisasi pendapatan dengan tingkat capaian sebesar 114,92% dari anggaran sebesar Rp149.997.796.007,00.

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2022 sebesar Rp2.140.864.262.869,37 atau 89,93% dari total realisasi pendapatan atau 105,80% dari anggaran transfer sebesar Rp2.023.425.788.998,00. Kontribusi terbesar pada realisasi pendapatan transfer tersebut adalah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan terealisasi sebesar Rp1.561.941.535.077,00 atau 72,96% dari realisasi Pendapatan Transfer atau 65,61% dari total realisasi Pendapatan.

Grafik 12. Perbandingan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun 2022



Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022 sebesar Rp2.298.684.886.504,21 atau 89,23% dari anggaran sebesar Rp2.576.228.009.902,00.

Sedangkan realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 sebesar Rp1.194.306.194.387,21 atau 51,96% dari total Belanja Daerah atau 84,89% dari anggaran sebesar Rp1.406.879.137.661,00. Belanja Pegawai sebagai komponen terbesar Belanja Operasi terealisasi tahun 2022 sebesar Rp618.704.238.751,00 atau 51,80% dari realisasi Belanja Operasi atau 85,09% dari anggaran sebesar Rp727.096.206.586,00. Realisasi Belanja Pegawai mencakup penambahan gaji PPPK dan gaji ke-14 PNS sebagaimana telah diprogramkan oleh Pemerintah Pusat serta pembayaran tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru.

Realisasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Tahun 2022 sebesar Rp79.044.238.140,00 atau 3,44% dari total belanja atau 93,81% dari anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp84.263.848.600,00.

Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 sebesar Rp647.525.931.568,00 atau 28,17% dari total Belanja atau 91,82% dari anggaran sebesar Rp705.196.764.966,00. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai komponen terbesar Belanja Modal terealisasi tahun 2022 sebesar Rp473.936.244.474,00 atau 73,19% dari realisasi Belanja Modal atau 95,96% dari anggaran sebesar Rp493.891.367.029,00.

Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2022 sebesar Rp0,00 dengan tingkat capaian 0,00% dari anggaran.

Realisasi Belanja Transfer Tahun 2022 sebesar Rp456.852.760.549,00 atau 19,87% dari total Belanja Daerah, atau terealisasi sebesar 99,47% dari anggaran sebesar Rp459.304.630.000,00.

Realisasi Pembiayaan Tahun 2022, yaitu Penerimaan Pembiayaan berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp370.793.051.380,00. Untuk realisasi Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya masing-masing sebesar Rp0,00, sedangkan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2022 sebesar Rp3.750.000.000,00. Realisasi pengeluaran pembiayaan tersebut mencapai 100,00% dari anggaran, yang kesemuanya merupakan realisasi pengeluaran untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada Bank Sumsel Babel dan PDAM Tirta Lematang yang masing-masing sebesar Rp3.000.000.000,00 dan Rp750.000.000,00. Realisasi pembiayaan neto Tahun 2022 sebesar Rp366.818.251.380,00 atau 106,92% dari anggaran sebesar Rp343.063.243.371,00.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Perubahan APBD Tahun 2022 dilakukan karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja. Ikhtisar pencapaian target APBD Tahun 2022 pada **Tabel 3.1.**

Tabel 3.1. Ikhtisar Pencapaian Target APBD Tahun 2022

Uraian	APBD Induk (Rp)	APBD Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Daerah	1.911.327.773.088,00	2.233.164.766.531,00	2.380.578.642.455,22
Belanja Daerah	2.000.456.999.590,00	2.576.228.009.902,00	2.298.684.886.504,21
Surplus (Defisit)	(89.129.226.502,00)	(343.063.243.371,00)	81.893.755.951,01
Penerimaan Pembiayaan	160.957.259.262,00	346.813.243.371,00	370.793.051.380,00
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	3.750.000.000,00	3.750.000.000,00

Rasio Keuangan

Perkembangan Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka membiayai belanja daerah dijelaskan pada **Tabel 3.2.**

Tabel 3.2. Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)

No	Uraian	Tahun 2022 (%)	Tahun 2021 (%)
1	Rasio PAD/Total Pendapatan	7,24	7,07
2	Rasio PAD /Belanja Operasi	14,43	13,08
3	Rasio PAD/Total Belanja Daerah	7,50	7,35
4	Rasio Pendapatan Transfer/ PAD	1.242,00	1.275,14

Efisiensi Keuangan

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022 sebesar Rp2.380.578.642.455,22 atau sebesar 106,60% dari anggaran Tahun 2022 sebesar Rp2.233.164.766.531,00 dan meningkat sebesar 8,30% dari realisasi Tahun 2021 sebesar Rp2.198.233.319.010,83. Sedangkan realisasi Belanja Daerah Tahun 2022 sebesar Rp2.298.684.886.504,21 atau sebesar 89,23% dari anggaran Tahun 2022 sebesar Rp2.576.228.009.902,00 dan meningkat sebesar 8,80% dari realisasi Tahun 2021 sebesar Rp2.112.681.151.755,08.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Kabupaten Lahat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).

Pada Tahun 2021 diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat. Berdasarkan hasil evaluasi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, maka perlu melakukan penataan Dinas Pertanian, Kecamatan Mulak Sebingkai dan Kecamatan Lahat Selatan. Sehingga struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Lahat terdiri atas Sekretariat Daerah (12 Bagian), Sekretariat DPRD, 7 Badan, Inspektorat, 24 Dinas, 24 Kecamatan, 17 Kelurahan dan 360 Desa. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan entitas akuntansi pada Kabupaten Lahat Tahun 2022, adalah:

- a. Inspektorat;
- b. Dua Sekretariat, yaitu Sekretariat Daerah (termasuk KDH dan WKDH) dan Sekretariat DPRD (termasuk DPRD); serta
- c. Tujuh Badan, 24 Dinas dan 24 Kecamatan.

SKPD yang berfungsi sebagai entitas pelaporan keuangan daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan adalah:

- a. Basis kas untuk pengakuan Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL; serta
- b. Basis akrual untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban-LO, Aset, Kewajiban dan Ekuitas dalam Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Informasi pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis, yaitu aset dicatat/diukur sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut, kewajiban dicatat/diukur sebesar nilai nominal dan ekuitas dicatat/diukur sebesar selisih antara aset dengan kewajiban. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Dengan diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2021. Dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 57

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah maka Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dicabut dan tidak berlaku lagi. Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah sudah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 238/2011 tentang Pedoman Umum SAP, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Khusus untuk Kebijakan Akuntansi Persediaan, Akuntansi Aset Tetap dan Akumulasi Aset Tetap telah dilakukan penyesuaian yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kodifikasi Barang Milik Daerah. Berikut ringkasan definisi, pengakuan, pengukuran, serta penilaian yang diterapkan kebijakan akuntansi.

4.4.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari Bendahara Umum Daerah (BUD);
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
- b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pengakuan pendapatan-LO dikaitkan dengan penerimaan kas dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berupa SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) yang diterbitkan dengan metode *official assessment*. Pengakuan pendapatan-LO seperti ini khusus untuk pendapatan pajak.

b. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan.

c. Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan

1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas pada saat penyusunan laporan keuangan

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berupa SKRD/Perpres/Permenkeu/Pergub tentang penetapan piutang dana transfer pusat/provinsi dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Pengakuan pendapatan-LO metode ini lebih tepat untuk pendapatan non pajak seperti pendapatan retribusi, pendapatan transfer.

2) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penerimaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau Program Sekolah Gratis (PSG) oleh unit sekolah yang berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten/kota diakui sebagai pendapatan-LO oleh pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan untuk Dana BOS yang diterima oleh sekolah swasta tidak diakui oleh pemerintah kabupaten/kota karena bukan merupakan bagian dari entitas pemerintah kabupaten/kota.

4.4.3. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.4.4. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat:

- a. Saat timbulnya kewajiban;
- b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
- c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas pada pembayaran dengan mekanisme SP2D LS;
- b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas pada pembayaran dengan mekanisme dana UP atau TU; dan
- c. Selanjutnya pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian atas beban.

Pengakuan beban yang bersifat rutin seperti beban listrik, air, dan telepon adalah berdasarkan tagihan, sebagai contoh atas pemakaian bulan Desember ditagihkan dan menjadi beban bulan Januari tahun berikutnya.

Beban diukur sesuai dengan:

- a. Harga perolehan atas barang/jasa, atau nilai nominal atau nilai alokasi biaya atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah; dan
- b. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.4.5. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil, dan dibagi menjadi:

a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendapatan yang diperoleh dari Dana Transfer Pemerintah Pusat berupa Transfer Dana Desa sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua tidak diakui sebagai Pendapatan - LO dan diakui sebagai utang transfer kepada pemerintah Desa dan pada saat disalurkan ke Pemerintah Desa akan mengurangi akun utang tersebut. Dengan demikian transfer dana desa ke entitas desa tidak diakui sebagai beban transfer.

b. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

Pengukuran dan Penilaian pendapatan transfer dan biaya transfer, yaitu:

a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah. Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

b. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

4.4.6. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Terdapat dua jenis pengakuan pembiayaan yaitu:

- a. Penerimaan pembiayaan diakui saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

4.4.7. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas didefinisikan sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam Neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Sedangkan setara kas didefinisikan sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Pengakuan kas dan setara kas secara umum jika memenuhi kriteria:

- a. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas; dan
- b. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas dan/atau setara kas telah berpindah ke pemerintah daerah.

Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal Neraca.

4.4.8. Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Piutang dapat diakui ketika:

- a. Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang pajak diakui pada saat diterbitkan surat ketetapan pajak atau surat penagihan (rekap bulanan). Untuk piutang selain piutang pajak, piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan atas klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas yang timbul selama tahun berjalan.

Pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal atas SKPD/SKRD/dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut.

- a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam Tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan
- b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi empat yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, dengan klasifikasi pada **Tabel 4.1**.

Tabel 4.1. Klasifikasi Kualitas Piutang

Jenis Piutang	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
Pajak (Ketetapan)	s.d. 1 Tahun	>1 s.d. 3 Thn	>3 s.d. 5 Thn	>5 Tahun
Retribusi (Ketetapan)	s.d. 1 Tahun	>1 s.d. 2 Thn	>2 s.d. 3 Thn	>3 Tahun
Transfer (SK)	Semua lancar tidak ada batasan			
Selain di atas (SK atau dokumen lainnya)	s.d. 1 Tahun	>1 s.d. 3 Thn	>3 s.d. 5 Thn	>5 Tahun
Tarif penyisihan	0,50%	10%	50%	100%

Berdasarkan Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua, ada penambahan akun Piutang kelebihan Transfer pada rincian Piutang lainnya. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan salur. Jika kelebihan salur belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya. Pada penyajiannya di Neraca, Piutang dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

- a. Piutang Pendapatan
 - 1) Piutang Pajak Daerah;

- 2) Piutang Retribusi;
 - 3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - 4) Piutang Lain-lain PAD yang Sah;
 - 5) Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan;
 - 6) Piutang Transfer Pemerintah Lainnya;
 - 7) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya; dan
 - 8) Piutang Pendapatan Lainnya.
- b. Piutang Lainnya
- 1) Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang;
 - 2) Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya;
 - 3) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran;
 - 4) Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - 5) Uang Muka;
 - 6) Panjar Kegiatan;
 - 7) Piutang yang Dipersepsikan sebagai Dana Bergulir; dan
 - 8) Piutang Kelebihan Transfer.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek piutang transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya, tidak diberlakukan penyisihan piutang sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua.

4.4.9. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui pada saat:

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
- b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik, persediaan dalam kondisi usang atau rusak tidak diakui sebagai persediaan. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik dengan menggunakan harga perolehan harga pokok produksi/nilai wajar. Persediaan dinilai dengan menggunakan *FIFO Method* (*First in First Out*)/(Metode Masuk Pertama Keluar Pertama).

Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019 dilakukan reklasifikasi dan penyesuaian Struktur Persediaan dan Beban Persediaan, dimana tahun sebelumnya Persediaan disajikan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah yang selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kodifikasi Barang Milik Daerah, namun untuk penyesuaian

pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat masih dalam proses. Jadi Penyesuaian yang dilakukan baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kodifikasi Barang Milik Daerah, yaitu sebagaimana dijelaskan pada **Tabel 4.2**.

Tabel 4.2 Penyesuaian Nomenklatur Struktur Persediaan

No	Pemendagri No 64 Tahun 2013	Permendagri No 108 Tahun 2016
1	Bahan Habis Pakai a) Alat Tulis Kantor b) Persediaan Alat Listrik dan Ekonomi (Lampu Pijar Listrik, Battery Kering c) Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih d) Persediaan Cetakan dan blanko	Alat Bahan Untuk Kegiatan Kantor a) Alat Tulis Kantor b) Persediaan Alat Listrik dan Ekonomi (Lampu Pijar Listrik, Battery Kering c) Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih d) Dokumen/Administrasi Tender
2	Bahan Habis Pakai a) Persediaan Isi tabung gas b) Persediaan Bahan baku bangunan	Bahan a) Persediaan Isi tabung gas b) Bahan Baku Bangunan
3	Bahan Material a) Bibit Ternak b) Persediaan Bahan Kimia dan Pupuk	Bahan a) Bibit Ternak b) Bahan Kimia
4	Bahan Material Persediaan Bahan obat-obatan dan Alkes	Obat-Obatan Bahan Obat-Obatan
5	Bahan Material Belanja perlengkapan/peralatan kerja	Persediaan Untuk Tujuan Strategis / Berjaga-Jaga Persediaan Untuk Tujuan Strategis / Berjaga-Jaga
6	Bahan Material Belanja Bahan Makanan dan Minuman	Natura dan Pakaian Bahan Makanan Pokok
7	Persediaan Barang Lainnya Persediaan Barang yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat

4.4.10. Kebijakan Akuntansi Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik yaitu dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu tiga bulan sampai dengan 12 bulan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas, serta investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen, yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali; dan
- b. Investasi Jangka Panjang Permanen, yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut.

- a. Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali; dan
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah namun tidak dicatat sebagai belanja ataupun pembiayaan dalam LRA. Pendapatan dari investasi jangka pendek diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengakuan investasi jangka panjang permanen-penyertaan modal saat pemindahan aset kas/non kas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penyertaan modal dianggarkan dalam APBD tahun berkenaan setelah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

Pada kondisi tertentu adanya investasi berupa barang oleh SKPD yang sudah diserahkan kepada BUMD namun belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah penyertaan. Nilai barang diakui sebagai investasi jangka panjang permanen-penyertaan modal berdasarkan nilai perolehannya. Kondisi ini diungkapkan secara memadai dalam CaLK dan upaya pembuatan Peraturan Daerah. Koreksi ini diperlukan sebagai bentuk penyajian yang jujur dan memenuhi prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*Substance over form*).

Pengakuan Investasi jangka panjang non permanen dana bergulir memenuhi kriteria sebagai berikut.

- a. Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan negara/daerah;
- b. Dana tersebut dicantumkan dalam APBN/APBD dan/atau laporan keuangan;
- c. Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA);
- d. Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir); dan

e. Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir.

Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Pengukuran investasi jangka pendek

1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:

a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut;

b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

b. Pengukuran investasi jangka panjang

1) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan;

2) Investasi jangka panjang non permanen:

a) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya;

b) Investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan; dan

c) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah seperti proyek Perkebunan Inti Rakyat, diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian investasi jangka panjang pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut.

a. Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan dicatat sebagai pendapatan, serta tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan diterapkan untuk investasi jangka panjang non permanen dana bergulir dan non permanen lainnya. Besarnya investasi jangka panjang non permanen dana bergulir/non permanen lainnya yang diragukan tertagih/direalisasikan dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok pada **Tabel 4.3**.

Tabel 4.3. Metode Persentase Penyisihan Investasi Jangka Panjang

No	Cicilan/pengembalian tertunggak melewati Jatuh Tempo	Prosentase Penyisihan
1	Cicilan tertunggak lewat tanggal jatuh tempo melebihi 1 bulan s.d. 1 Tahun	10%
2	Cicilan tertunggak lewat tanggal jatuh tempo melebihi 1 Tahun s.d. 2 Tahun	20%
3	Cicilan tertunggak lewat tanggal jatuh tempo melebihi 2 Tahun s.d. 3 Tahun	50%
4	Cicilan tertunggak lewat tanggal jatuh tempo melebihi 3 Tahun s.d. 4 Tahun	75%
5	Cicilan tertunggak lewat tanggal jatuh tempo melebihi 4 Tahun s.d. 5 Tahun atau tidak dapat ditemukan lagi alamatnya/usaha tutup/sudah melunasi	100%

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut.

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
- 4) Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- 1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- 2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- 3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*; dan

- 4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

4.4.11. Akuntansi Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus memenuhi kriteria yaitu berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, dan nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal dan dilakukan penyesuaian pada saat penyusunan laporan keuangan. Khusus aset berupa konstruksi diakui pada saat Serah Terima Pertama/*Provisional Hand Over (PHO)*.

Untuk Laporan Keuangan Tahun 2019 dilakukan reklasifikasi dan penyesuaian struktur Aset Tetap, Beban Penyusutan, dan Akumulasi Aset Tetap dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kodefikasi Barang Milik Daerah. Untuk kebijakan Akuntansi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Lahat sudah membuat rancangan Peraturan Bupati tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat, dalam lampiran rancangan tersebut dijelaskan tentang kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode objek, kode rincian objek, kode sub rincian objek, kode sub sub rincian objek dalam bentuk tabel.

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Perolehan Awal Aset Tetap atau Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai Aset Tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap atas perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin dan Aset Tetap lainnya adalah nilai per unitnya. Dalam Peraturan Bupati tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat dan Peraturan Bupati Nomor 57 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sudah mengacu ke peraturan terbaru tentang pengelolaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut.

a. Peralatan dan Mesin

Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap atas perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin dan Aset Tetap Lainnya adalah nilai per unitnya yaitu:

1. Pengeluaran untuk per satuan Peralatan dan Mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

2. Aset Tetap Lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman dan Aset Tetap Lainnya sebesar mulai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke atas, kecuali buku;
3. Buku disajikan sebesar nilai perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan per kelompok dan jenis buku dan tanggal perolehan yang sama; dan
4. Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap atas perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke atas.

Aset Tetap dicatat dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian Aset Tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Aset Tetap tersebut.

Biaya perolehan suatu Aset Tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh, biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal, aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

KDP biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam Aset Tetap. KDP dipindahkan ke pos Aset Tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi yaitu konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan, dan dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*), yaitu Aset Tetap yang diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian Aset Tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu Aset Tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu Aset Tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam

keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun nilai bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun nilai bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat Aset Lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Pemindahtanganan aset yang ada konsekuensi kas terjadi karena nilai aset yang dipertukarkan tidak sama. Apabila terdapat konsekuensi kas dalam pertukaran aset, perlakuannya yaitu aset yang dipertukarkan dikeluarkan dari catatan sebesar nilai yang tercatat di Neraca, aset yang diterima dicatat sebesar nilai pasar yang wajar atas aset yang diterima dan jika terjadi selisih lebih atau kurang atas pertukaran tersebut maka dicatat sebagai surplus dan defisit penjualan Aset Tetap.

Aset Tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan Aset Tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu Aset Tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan Aset Tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan Aset Tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun Aset Tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan Aset Tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan Aset Tetap dengan pertukaran. Apabila perolehan Aset Tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional. Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan Belanja Modal dan dikapitalisasi menjadi aset apabila memenuhi semua kriteria berikut.

- a. Jumlah pengeluaran melebihi batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi;
- b. Pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang umur aset;
- c. Pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi; dan
- d. Pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi.

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap. Batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi:

- a. Pemeliharaan konstruksi meliputi Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar mulai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) keatas; serta
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar mulai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) keatas.

Aset Tetap yang mengalami *overhaul*/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat menambah masa manfaat, dapat berpatokan pada **Tabel 4.4.**

Tabel 4.4. Persentase Renovasi Aset Tetap

Kelompok Aset	Jenis	Persentase dari Nilai	
Alat Besar			
Alat Besar Darat	<i>Overhaul</i>	>75%	5
Alat Besar Apung	<i>Overhaul</i>	>75%	4
Alat Bantu	<i>Overhaul</i>	>50%	3
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	<i>Overhaul</i>	>50%	10
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	<i>Overhaul</i>	>75%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	<i>Overhaul</i>	>75%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>75%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	<i>Overhaul</i>	>75%	12
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	<i>Overhaul</i>	>75%	4
Alat Bengkel Tak berMesin	Renovasi	>75%	1
Alat Ukur	<i>Overhaul</i>	>75%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	<i>Overhaul</i>	>75%	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	<i>Overhaul</i>	>50%	5
Alat Rumah Tangga	<i>Overhaul</i>	>50%	5
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	<i>Overhaul</i>	>75%	2
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Alat Studio	<i>Overhaul</i>	>75%	3
Alat Komunikasi	<i>Overhaul</i>	>50%	3
Peralatan Pemancar	<i>Overhaul</i>	>75%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	<i>Overhaul</i>	>75%	5
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	<i>Overhaul</i>	>75%	3
Alat Kesehatan Umum	<i>Overhaul</i>	>75%	3
Alat laboratorium			
Unit Alat laboratorium	<i>Overhaul</i>	>75%	4
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	<i>Overhaul</i>	>75%	8
Alat Peraga Praktek Sekolah	<i>Overhaul</i>	>75%	4
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	<i>Overhaul</i>	>75%	8
Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan	<i>Overhaul</i>	>75%	5
<i>Radiation Application & Non Destructive</i>	<i>Overhaul</i>	>75%	5
Alat laboratorium LingkunganHidup	<i>Overhaul</i>	>75%	4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	<i>Overhaul</i>	>75%	4
Alat Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	<i>Overhaul</i>	>75%	4
Alat Persenjataan			
Senjata Api	<i>Overhaul</i>	>75%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>75%	1
Senjata Sinar	Renovasi	>75%	1
Alat Khusus Kepolisian	Renovasi	>75%	1
Komputer			
Komputer Unit	<i>Overhaul</i>	>50%	3
Peralatan Komputer	<i>Overhaul</i>	>50%	3
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	<i>Overhaul</i>	>75%	5

Kelompok Aset	Jenis	Persentase dari Nilai	
Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	>75%	5
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	>75%	5
Alat Pengeboran Non Mesin	Overhaul	>75%	5
Alat Produksi, Pengolahan, dan pemurnian	Overhaul	>75%	5
Sumur	Overhaul	>75%	5
Produksi	Overhaul	>75%	5
Pengolahan Pemurnian	Overhaul	>75%	5
Alat Bantu Eksplorasi			
Alat Bantu Eksplorasi	Overhaul	>75%	5
Alat Bantu Produksi	Overhaul	>75%	5
Alat Keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	Overhaul	>75%	5
Alat Pelindung	Overhaul	>75%	5
Alat SAR	Overhaul	>75%	5
Alat Kerja Penerbangan	Overhaul	>75%	5
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	Overhaul	>75%	5
Peralatan Proses/Produksi			
Unit Peralatan Proses/Produksi	Overhaul	>75%	5
Rambu – Rambu			
Rambu – Rambu Lalu Lintas Darat	Overhaul	>75%	5
Rambu – Rambu Lalu Lintas Udara	Overhaul	>75%	5
Rambu – Rambu Lalu Lintas Laut	Overhaul	>75%	5
Peralatan Olahraga			
Peralatan Olahraga	Overhaul	>75%	4
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>65%	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>45%	15
Monumen			
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	Overhaul	>50%	15
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>50%	15
Tugu Titik Kontrol / Prasasti			
Tugu / Tanda batas	Renovasi	>75%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>60%	10
Jembatan	Renovasi	>45%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>45%	5
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>45%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan	Renovasi	>75%	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai &	Renovasi	>45%	3
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan	Renovasi	>75%	5
Bangunan Air Bersih/AirBaku	Renovasi	>45%	10
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>45%	5
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air baku	Renovasi	>45%	20
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>45%	10
Instalasi Pengelolaan	Renovasi	>45%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>45%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>45%	15
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>45%	15
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>45%	5
Instalasi gas	Renovasi	>45%	15
Instalasi Pengaman	Renovasi	>45%	3
Instalasi Lain	Renovasi	>45%	3
Jaringan			

Kelompok Aset	Jenis	Persentase dari Nilai	
Jaringan air Minum	Overhaul	>45%	10
Jaringan Listrik	Overhaul	>45%	15
Jaringan Telepon	Overhaul	>45%	10
Jaringan Gas	Overhaul	>45%	10
Alat Musik Modern/Band	Overhaul	>75%	2

Penyusutan Aset Tetap. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) tanpa nilai sisa. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai Aset Tetap.

Perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan bulanan. Penyusutan dihitung satu bulan penuh kapanpun tanggal diperoleh di bulan yang bersangkutan. Dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat sudah mengacu ke peraturan terbaru tentang pengelolaan Aset Tetap. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetappada **Tabel 4.5**.

Tabel 4.5. Masa Manfaat Aset Tetap

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rinc. Objek	Sub. Rinc. Objek	Uraian Barang	Masa Manfaat (Tahun)
1	3					ASET TETAP	
1	3	2				PERALATAN DAN MESIN	
1	3	2	1	1		ALAT BESAR DARAT	10
1	3	2	1	2		ALAT BESAR APUNG	8
1	3	2	1	3		ALAT BANTU	7
1	3	2	2	1		ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7
1	3	2	2	2		ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2
1	3	2	2	3		ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	10
1	3	2	2	4		ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	3
1	3	2	2	5		ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	20
1	3	2	3	1		ALAT BENGKEL BERMESIN	
1	3	2	3	1	6	PERKAKAS BENGKEL KAYU	10
1	3	2	3	1	7	PERKAKAS BENGKEL KHUSUS	10
1	3	2	3	1	8	PERALATAN LAS	5
1	3	2	3	1	9	PERKAKAS PABRIK ES	10
1	3	2	3	1	10	ALAT BENGKEL BERMESIN LAINNYA	10
1	3	2	3	2		ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	5
1	3	2	3	3		ALAT UKUR	5
1	3	2	4	1		ALAT PENGOLAHAN	
1	3	2	4	1	1	ALAT PENGOLAHAN TANAH DAN TANAMAN	1
1	3	2	4	1	2	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK	1
1	3	2	4	1	3	ALAT PANEN	4
1	3	2	4	1	4	ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN	4
1	3	2	4	1	5	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	4
1	3	2	4	1	6	ALAT PROSESING	4
1	3	2	4	1	7	ALAT PASCA PANEN	4
1	3	2	4	1	8	ALAT PRODUKSI PERIKANAN	4
1	3	2	4	1	9	ALAT-ALAT PETERNAKAN	4
1	3	2	4	1	10	ALAT PENGOLAHAN LAINNYA	4
1	3	2	5	1		ALAT KANTOR	
1	3	2	5	1	1	MESIN KETIK	2
1	3	2	5	1	2	MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH	2
1	3	2	5	1	3	ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN)	2
1	3	2	5	1	4	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	5

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun 2022

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rinc. Objek	Sub. Rinc. Objek	Uraian Barang	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	5	1	5	ALAT KANTOR LAINNYA	5
1	3	2	5	2		ALAT RUMAH TANGGA	5
1	3	2	5	3		MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	5
1	3	2	6	1		ALAT STUDIO	5
1	3	2	6	2		ALAT KOMUNIKASI	5
1	3	2	6	3		PERALATAN PEMANCAR	10
1	3	2	6	4		PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	10
1	3	2	7	1		ALAT KEDOKTERAN	5
1	3	2	7	2		ALAT KESEHATAN UMUM	5
1	3	2	8	1		UNIT ALAT LABORATORIUM	8
1	3	2	8	2		UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	15
1	3	2	8	3		ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	10
1	3	2	8	4		ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	15
1	3	2	8	5		ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	10
1	3	2	8	6		RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA	10
1	3	2	8	7		ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	7
1	3	2	8	8		PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	15
1	3	2	8	9		ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	8
1	3	2	9	1		SENJATA API	10
1	3	2	9	2		PERSENJATAAN NON SENJATAHUN API	5
1	3	2	9	3		SENJATA SINAR	10
1	3	2	9	4		ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	
1	3	2	9	4	1	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	10
1	3	2	9	4	2	ALAT DALMAS/ALAT DAKHURA	5
1	3	2	9	4	3	ALAT WANTEROR (PERLAWANAN TEROR)	5
1	3	2	9	4	4	PERALATAN DETEKSI INTEL	5
1	3	2	9	4	5	ALSUS LANTAS	5
1	3	2	9	4	6	ALSUS RESERSE	5
1	3	2	9	4	7	ALSUS FOTOGRAFI KEPOLISIAN	10
1	3	2	9	4	8	ALSUS DAKTILOSKOPI	10
1	3	2	9	4	9	INSTRUMEN ANALISIS LABORATORIUM FORENSIK	10
1	3	2	9	4	10	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN LAINNYA	10
1	3	2	10	1		KOMPUTER UNIT	4
1	3	2	10	2		PERALATAN KOMPUTER	4
1	3	2	11	1		ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	4
1	3	2	11	2		ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	4
1	3	2	12	1		ALAT PENGEBORAN MESIN	4
1	3	2	12	2		ALAT PENGEBORAN NON MESIN	4
1	3	2	13	1		SUMUR	4
1	3	2	13	2		PRODUKSI	4
1	3	2	13	3		PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	4
1	3	2	14	1		ALAT BANTU EKSPLORASI	4
1	3	2	14	2		ALAT BANTU PRODUKSI	4
1	3	2	15	1		ALAT DETEKSI	4
1	3	2	15	2		ALAT PELINDUNG	5
1	3	2	15	3		ALAT SAR	5
1	3	2	15	4		ALAT KERJA PENERBANGAN	5
1	3	2	16	1		ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	3
1	3	2	17	1		UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	5
1	3	2	18	1		RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	50
1	3	2	18	2		RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	50
1	3	2	18	3		RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	50
1	3	2	19	1		PERALATAN OLAH RAGA	4
1	3	3				GEDUNG DAN BANGUNAN	
1	3	3	1	1		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun 2022

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rinc. Objek	Sub. Rinc. Objek	Uraian Barang	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	3	1	1	1	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	50
1	3	3	1	1	2	BANGUNAN GUDANG	50
1	3	3	1	1	3	BANGUNAN GEDUNG UNTUK BENGKEL/HANGGAR	50
1	3	3	1	1	4	BANGUNAN GEDUNG INSTALASI	50
1	3	3	1	1	5	BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM	50
1	3	3	1	1	6	BANGUNAN KESEHATAN	50
1	3	3	1	1	7	BANGUNAN OCEANARIUM/OBSERVATORIUM	50
1	3	3	1	1	8	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH	50
1	3	3	1	1	9	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN	50
1	3	3	1	1	10	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	50
1	3	3	1	1	11	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAH RAGA	50
1	3	3	1	1	12	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	50
1	3	3	1	1	13	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	50
1	3	3	1	1	14	BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL	50
1	3	3	1	1	15	BANGUNAN GEDUNG PEMOTONG HEWAN	50
1	3	3	1	1	16	BANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN	50
1	3	3	1	1	17	BANGUNAN GEDUNG MUSIUM	50
1	3	3	1	1	18	BANGUNAN GEDUNG TERMINAL/PELABUHAN/BANDARA	50
1	3	3	1	1	19	BANGUNAN PENGUJIAN KELAIKAN	50
1	3	3	1	1	20	BANGUNAN GEDUNG LEMBAGA PEMASYARAKATAN	50
1	3	3	1	1	21	BANGUNAN RUMAH TAHANAN	50
1	3	3	1	1	22	BANGUNAN GEDUNG KREMATORIUM	50
1	3	3	1	1	23	BANGUNAN PEMBAKARAN BANGKAI HEWAN	50
1	3	3	1	1	24	BANGUNAN TEMPAT PERSIDANGAN	50
1	3	3	1	1	25	BANGUNAN TERBUKA	50
1	3	3	1	1	26	BANGUNAN PENAMPUNG SEKAM	50
1	3	3	1	1	27	BANGUNAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)	50
1	3	3	1	1	28	BANGUNAN INDUSTRI	50
1	3	3	1	1	29	BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN	50
1	3	3	1	1	30	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	50
1	3	3	1	1	31	BANGUNAN PERALATAN GEOFISIKA	50
1	3	3	1	1	32	BANGUNAN FASILITAS UMUM	50
1	3	3	1	1	33	BANGUNAN PARKIR	50
1	3	3	1	1	34	BANGUNAN GEDUNG PABRIK	50
1	3	3	1	1	35	BANGUNAN STASIUN BUS	50
1	3	3	1	1	36	TAMAN	10
1	3	3	1	1	37	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	20
1	3	3	1	2		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	50
1	3	3	2	1		CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	50
1	3	3	3	1		BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	40
1	3	3	4	1		TUGU/TANDA BATAS	50
1	3	4				JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	
1	3	4	1	1		JALAN	10
1	3	4	1	2		JEMBATAN	50
1	3	4	2	1		BANGUNAN AIR IRIGASI	5
1	3	4	2	2		BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	50
1	3	4	2	3		BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	25
1	3	4	2	4		BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	3
1	3	4	2	5		BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	30
1	3	4	2	6		BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	10
1	3	4	2	7		BANGUNAN AIR KOTOR	5
1	3	4	3	1		INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	20
1	3	4	3	2		INSTALASI AIR KOTOR	10
1	3	4	3	3		INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	10
1	3	4	3	4		INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	10

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rinc. Objek	Sub. Rinc. Objek	Uraian Barang	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	3	5		INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	40
1	3	4	3	6		INSTALASI GARDU LISTRIK	40
1	3	4	3	7		INSTALASI PERTAHANAN	30
1	3	4	3	8		INSTALASI GAS	30
1	3	4	3	9		INSTALASI PENGAMAN	20
1	3	4	3	10		INSTALASI LAIN	
1	3	4	4	1		JARINGAN AIR MINUM	30
1	3	4	4	2		JARINGAN LISTRIK	40
1	3	4	4	3		JARINGAN TELEPON	20
1	3	4	4	4		JARINGAN GAS	30
1	3	5	7			ASET TETAP DALAM RENOVASI	
1	3	5	7	1		ASET TETAP DALAM RENOVASI	5
1	5	3				ASET TIDAK BERWUJUD	
1	5	3	1	1		ASET TIDAK BERWUJUD	
1	5	3	1	1	2	LISENSI DAN FRENCHISE	8
1	5	3	1	1	3	HAK CIPTA	16
1	5	3	1	1	4	HAK PATEN	16
1	5	3	1	1	5	SOFTWARE	4
1	5	3	1	1	6	KAJIAN	20

Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Aset Tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, barang bercorak kebudayaan, buku-buku dan perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan serta barang bercorak kebudayaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam Neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya, berupa:

- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

4.4.12. Akuntansi Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan.

Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Jangka Panjang dari Piutang Penjualan Angsuran dan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud (ATB), dan Aset Lain-lain.

Pengakuan Aset Lainnya secara umum diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang

dapat diukur dengan andal dan diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Aset Lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Aset Lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka Bangun Serah Guna (BSG)/Bangun Serah Kelola (BSK), harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada pemerintah pada saat proses pembangunan selesai.

Penyerahan kembali objek kerja sama pemanfaatan kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang, yang sebelumnya telah diaudit oleh aparat pengawas fungsional.

Atas aset yang telah diserahkan ditetapkan status penggunaannya oleh pejabat yang berwenang.

Khusus untuk ATB, sesuatu diakui sebagai ATB jika dan hanya jika kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Perlakuan akuntansi dalam pengakuan *software* yang diperoleh secara pembelian yaitu sebagai berikut.

- a. Perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan *software* dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, maka nilai perolehan *software* tidak perlu dikapitalisasi;
- b. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, tidak perlu dikapitalisasi;
- c. *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi. *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi;
- d. Pengeluaran terkait *software* yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi akan diakui sebagai beban operasi pada periode terjadinya.

Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* komputer harus memenuhi salah satu kriteria ini yaitu meningkatkan fungsi *software* dan meningkatkan efisiensi *software*.

Pengeluaran yang meningkatkan masa manfaat dari *software* pada praktik umumnya tidak terjadi, yang ada adalah pengeluaran untuk perpanjangan izin penggunaan/lisensi dari *software* atau *upgrade* dari versi yang lama menjadi yang

paling mutakhir yang lebih mendekati kepada perolehan *software* baru.

Perlakuan akuntansi untuk perpanjangan lisensi diterapkan untuk pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan yang kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi dan pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan yang lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi.

Pengukuran dan Penilaian Aset Lainnya, yaitu:

- a. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah bagian lancar/tagihan yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan pada tanggal penyusunan laporan keuangan.
- b. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setelah bagian lancar/tagihan yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan pada tanggal penyusunan laporan keuangan.
- c. Bangun Kelola Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari aset tetap.
- d. Aset kerjasama dicatat sesuai nilai buku dan akumulasi penyusutannya pada pos aset tetapnya.
- e. Aset BSG/BSK dicatat sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan disusutkan sesuai masa kerjasama BSK.
- f. Aset Bangun Guna Serah (BGS)/BKS dicatat sebesar nilai aset pada pos aset tetap yang diserahkan ke pihak mitra.
- g. Aset yang dikerjasama dan disewa disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan pada jenis aset tetap.
- h. Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut.
 - 1) Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjakamkan dan disajikan kembali sebagai aset tetap; dan
 - 2) Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.
- i. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan aset tak berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut. Aset tidak berwujud meliputi kelompok sebagai berikut.
 - 1) Kelompok I berupa *software* komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu Tahun;
 - 2) Kelompok II berupa lisensi dan *franchise*;
 - 3) Kelompok III berupa hak cipta (*copyright*), paten dan hak lainnya; serta
 - 4) Kelompok IV berupa hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

ATB disajikan di Neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama paling tinggi 20 Tahun dan tarif pada **Tabel 4.6**.

Tabel 4.6. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif
Kelompok 1	4 Tahun	25%
Kelompok 2	8 Tahun	12,50%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%
Kelompok 4	20 Tahun	5%

Aset Tetap yang telah dipindahkan ke Aset Lain-lain tidak disusutkan dan disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatatnya (*carrying amount*).

4.4.13. Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban terdiri dari kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek.

- a. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan; dan
- b. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan terdapat pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
- b. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan
- d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Pengukuran Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongannya berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.

Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal Neraca, namun kasnya telah diterima.

Utang beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan suatu ketetapan/perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal Neraca.

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.

Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada saat terjadinya transaksi.

4.4.14. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Surplus/defisit LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Pengakuan dan Pengukuran Ekuitas telah dijabarkan berkaitan dengan akun ekuitas, surplus/defisit LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan tercermin dalam laporan perubahan ekuitas pada tanggal pelaporan.

Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain Koreksi Nilai Persediaan, Selisih Revaluasi Aset Tetap, Koreksi ekuitas lainnya.

Koreksi Ekuitas Lainnya untuk menyajikan perubahan ekuitas antara lain akibat penyajian kembali, pindah aset dan kewajiban antar SKPD.

4.4.15 Penyesuaian Kode Rekening

Karena adanya perbedaan klasifikasi rekening menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dengan klasifikasi rekening menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, maka dilakukan *mapping*/konversi dari klasifikasi rekening menurut penyusunan APBD dengan klasifikasi rekening menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang akan dilaporkan dalam laporan muka Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

4.4.16 Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI Pertama Kali

Pada Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Lahat mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sesuai IPSAP Nomor 04, untuk implementasi tersebut tidak diperlukan penyajian kembali dan hanya menyajikan pengaruh kumulatif dari pos-pos Neraca pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Hal ini memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan.

- a. Pos-pos ekuitas dana pada Neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Di samping itu terdapat perubahan struktur pelaporan menggunakan BAS yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lahat mengacu kepada PMK Nomor 238/2011 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, sehingga ada penyesuaian penempatan saldo awal 2015 baik pada Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas, sebagai contoh dalam BAS tidak dikenal lagi Utang Pihak Ketiga dan direklasifikasi menjadi Utang Beban/Utang Jangka Pendek Lainnya.
- b. Keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan Tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi serta sebagian unsur Neraca tidak dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Pendapatan

Jumlah anggaran Pendapatan Tahun 2022 sebesar Rp2.233.164.766.531,00 dapat dicapai melampaui target dengan realisasi sebesar Rp2.380.578.642.455,22 atau 106,60% dari target yang ditetapkan. Realisasi Pendapatan per jenis PAD disajikan pada **Tabel 5.1**.

Tabel 5.1. Realisasi per Jenis Pendapatan

No	Jenis Pendapatan	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	149.997.796.007,00	172.372.518.276,85	114,92	155.359.493.986,22
2	Pendapatan Transfer	2.023.425.788.998,00	2.140.864.262.869,37	105,80	1.981.044.062.352,61
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	59.741.181.526,00	67.341.861.309,00	112,72	61.829.762.672,00
Jumlah		2.233.164.766.531,00	2.380.578.642.455,22	106,60	2.198.233.319.010,83

Realisasi Pendapatan Tahun 2022 menunjukkan peningkatan dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebanyak 8,30%. Kenaikan terjadi pada semua jenis pendapatan: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, serta Lain-lain Pendapatan yang Sah. Untuk kenaikan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021 dikarenakan terjadi peningkatan yang signifikan dari Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta BPHTB. Rincian per jenis pendapatan dijelaskan sebagai berikut.

a. Pendapatan Asli Daerah

Jumlah anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2022 sebesar Rp149.997.796.007,00 dengan realisasi sebesar Rp172.372.518.276,85 atau 114,92% dari target yang ditetapkan. Realisasi Pendapatan Asli Daerah disajikan pada **Tabel 5.2**.

Tabel 5.2. Realisasi per Jenis Pendapatan Asli Daerah

No	Jenis Pendapatan Asli Daerah	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah	51.663.000.000,00	54.945.020.430,50	106,35
2	Pendapatan Retribusi Daerah	4.407.134.500,00	6.139.795.839,00	139,31
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.348.611.221,00	9.348.611.221,40	100,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	84.579.050.286,00	101.939.090.785,95	120,53
Jumlah		149.997.796.007,00	172.372.518.276,85	114,92

Rincian PAD Tahun 2022 dijelaskan sebagai berikut.

1) Pendapatan Pajak Daerah

Jumlah anggaran Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022 sebesar Rp51.663.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp54.945.020.430,50 atau 106,35% dari target yang ditetapkan. Rincian Pendapatan Pajak Daerah selama Tahun 2022 dijelaskan pada **Tabel 5.3**.

Tabel 5.3. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

No	Jenis Pendapatan Pajak Daerah	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%
1	Pajak Hotel	1.602.500.000,00	1.630.650.531,00	101,76
2	Pajak Restoran	4.000.000.000,00	5.557.251.824,00	138,93
3	Pajak Hiburan	1.050.000.000,00	1.147.198.552,00	109,26
4	Pajak Reklame	950.000.000,00	951.584.692,00	100,17
5	Pajak Penerangan Jalan	20.000.000.000,00	19.644.314.595,00	98,22
6	Pajak Parkir	400.000.000,00	432.093.200,00	108,02
7	Pajak Air Tanah	0,00	405.000,00	0,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	120.000.000,00	96.250.000,00	80,21
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	12.040.500.000,00	14.812.801.388,50	123,02
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran (PBBP2)	3.500.000.000,00	4.450.185.892,00	127,15
11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	8.000.000.000,00	6.222.284.756,00	77,78
Jumlah		51.663.000.000,00	54.945.020.430,50	106,35

Penjelasan untuk Objek Pendapatan Pajak Daerah adalah sebagai berikut.

a) Pajak Hotel

Anggaran Pendapatan dari Pajak Hotel pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp1.602.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.630.650.531,00 atau 101,76% dari target yang ditetapkan. Penerimaan dari Pajak Hotel yang melebihi target, karena industri perhotelan di Kabupaten Lahat pasca pandemi Covid-19 berangsur mulai menunjukkan peningkatan hunian. Rincian Pendapatan Pajak Hotel selama Tahun 2022 dijelaskan pada **Tabel 5.4.**

Tabel 5.4. Realisasi Pendapatan Pajak Hotel

No	Jenis Pendapatan Pajak Hotel	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%
1	Pajak Hotel	1.502.576.541,00	1.563.905.734,00	104,08
2	Pajak Losmen	99.923.459,00	66.744.797,00	66,80
Jumlah		1.602.500.000,00	1.630.650.531,00	101,76

b) Pajak Restoran

Anggaran Pendapatan dari Pajak Restoran pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp4.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.557.251.824,00 atau 138,93% dari target yang ditetapkan. Pencapaian penerimaan Pajak restoran yang melebihi target yang ditetapkan, disamping karena adanya pemasangan *Tapping Box* untuk merekam catatan transaksi yang fungsinya sebagai pembanding antara total transaksi yang ada di restoran dengan jumlah pajak daerah yang dibayarkan, juga karena perubahan status pandemi Covid-19 ke endemi, yang memungkinkan orang untuk kembali dapat berkumpul dan makan bersama di restoran. Rincian Pendapatan Pajak Restoran selama Tahun 2022 dijelaskan pada **Tabel 5.5.**

Tabel 5.5. Realisasi Pendapatan Pajak Restoran

No	Jenis Pendapatan Pajak Restoran	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%
1	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.071.415.644,00	3.351.409.539,00	161,79
2	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	218.097.400,00	106.734.300,00	48,94
3	Pajak Kantin dan Sejenisnya	42.015.000,00	38.135.000,00	90,77
4	Pajak Warung dan Sejenisnya	38.382.000,00	36.401.700,00	94,84
5	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.630.089.956,00	2.024.571.285,00	124,20
Jumlah		4.000.000.000,00	5.557.251.824,00	138,93

c) Pajak Hiburan

Anggaran Pendapatan dari Pajak Hiburan pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp1.050.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.147.198.552,00 atau 109,26% dari target yang ditetapkan. Realisasi penerimaan Pajak Hiburan yang melebihi dari target disebabkan karena tidak ada larangan lagi untuk berkumpul dan mencari hiburan pasca pandemik Covid-19, semenjak di cabutnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Rincian Pendapatan Pajak Hiburan selama Tahun 2022 dijelaskan pada **Tabel 5.6**.

Tabel 5.6. Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan

No	Jenis Pendapatan Pajak Hiburan	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%
1	Pajak Tontonan Film	675.000.000,00	754.270.076,00	111,74
2	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	133.725.000,00	0,00	0,00
3	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya	150.000.000,00	160.618.936,00	107,08
4	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan	60.000.000,00	208.260.015,00	347,10
5	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	31.275.000,00	24.049.525,00	76,90
	Jumlah	1.050.000.000,00	1.147.198.552,00	109,26

d) Pajak Reklame

Anggaran Pendapatan Daerah dari Pajak Reklame pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp950.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp951.584.692,00 atau 100,17% dari target yang ditetapkan. Realisasi penerimaan Pajak Reklame yang melebihi target yang ditetapkan disebabkan karena adanya pemasangan dan pendataan pajak reklame baru. Rincian Pendapatan Pajak Reklame selama Tahun 2022 dijelaskan pada **Tabel 5.7**.

Tabel 5.7. Realisasi Pendapatan Pajak Reklame

No	Jenis Pendapatan Pajak Reklame	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	435.000.000,00	511.293.737,00	117,54
2	Pajak Reklame Kain	325.000.000,00	269.838.400,00	83,03
3	Pajak Reklame Melekat/Stiker	150.000.000,00	123.647.160,00	82,43
4	Pajak Reklame Berjalan	30.000.000,00	46.805.395,00	156,02
5	Pajak Reklame Peragaan	10.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	950.000.000,00	951.584.692,00	100,17

e) Pajak Penerangan Jalan

Anggaran Pendapatan dari PPJ pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp20.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp19.644.314.595,00 atau 98,22% dari target yang ditetapkan. PPJ terdiri dari dua jenis yaitu :

- (1) PPJ Dihasilkan Sendiri, pada Tahun 2022 anggarannya Rp0,00 dan realisasi pendapatannya juga Rp0,00;
- (2) PPJ Sumber Lain, yang dianggarkan pada APBD 2022 sebesar Rp20.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp19.644.314.595,00 atau 98,22% dari target yang ditetapkan, atau 100,00% dari realisasi PPJ Tahun 2022.

f) Pajak Parkir

Anggaran Pendapatan dari Pajak Parkir pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp432.093.200,00 atau 108,02% dari target yang ditetapkan. Pencapaian penerimaan Pajak Parkir yang melebihi dari target yang ditetapkan, dikarenakan adanya peningkatan volume kendaraan yang menggunakan jasa parkir di Kabupaten Lahat.

g) Pajak Air Tanah

Pendapatan Pajak Air Tanah pada Tahun 2022 belum dianggarkan, namun demikian sudah ada realisasi sebesar Rp405.000,00. Pajak Air Tanah merupakan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

h) Pajak Sarang Burung Walet

Anggaran Pendapatan dari Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp120.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp96.250.000,00 atau 80,21% dari target yang ditetapkan. Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet yang tidak mencapai target yang ditetapkan dikarenakan menurunnya produksi sarang burung walet.

i) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Anggaran Pendapatan dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp12.040.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp14.812.801.388,50 atau 123,02% dari target yang ditetapkan. Pencapaian penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang melebihi target, dikarenakan adanya peningkatan pelaksanaan proyek pembangunan di Kabupaten Lahat. Rincian Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan selama Tahun 2022 dijelaskan pada **Tabel 5.8**.

Tabel 5.8. Realisasi Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

No	Jenis Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%
1	Pajak Pasir dan Krikil	4.684.260.814,00	0,00	0,00
2	Pajak Tanah Liat	85.619.576,00	0,00	0,00
3	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	7.270.619.610,00	14.812.801.388,50	203,74
	Jumlah	12.040.500.000,00	14.812.801.388,50	123,02

j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Anggaran Pendapatan dari PBB-P2 pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp3.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.450.185.892,00 atau 127,15% dari target yang ditetapkan. Pencapaian penerimaan yang melebihi dari target yang ditetapkan dikarenakan adanya Surat Edaran Bupati Lahat yang mewajibkan lunas PBB-P2 sebagai salah satu syarat pencairan Tambahan Tunjangan Pegawai ASN, kenaikan pangkat ASN, pengurusan IMB, dan pengurusan data di Dukcapil serta pengurusan BPHTB.

k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Anggaran Pendapatan dari BPHTB pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp8.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.222.284.756,00 atau 77,78% dari target yang ditetapkan. Realisasi penerimaan dari BPHTB yang tidak mencapai target, dikarenakan tidak adanya peralihan hak lahan pada Tahun 2022, yang ada hanya BPHTB-Pemberian Hak Baru, dijelaskan pada **Tabel 5.9**.

Tabel 5.9. Realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

No	Jenis Pendapatan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%
1	BPHTB - Pemindahan Hak	2.000.000.000,00	0,00	0,00
2	BPHTB - Pemindahan Hak Baru	6.000.000.000,00	6.222.284.756,00	103,70
	Jumlah	8.000.000.000,00	6.222.284.756,00	77,78

2) Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp4,407.134.500,00 dengan realisasi sebesar Rp6.139.795.839,00 atau 139,31% dari target yang ditetapkan. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah dijelaskan Tabel 5.10.

Tabel 5.10. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah

No	Realisasi per Jenis Retribusi Daerah	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%
1	Retribusi Jasa Umum	1.976.292.750,00	1.546.673.130,00	78,26
2	Retribusi Jasa Usaha	1.830.841.750,00	2.578.943.395,00	140,86
3	Retribusi Perizinan Tertentu	600.000.000,00	2.014.179.314,00	335,70
	Jumlah	4.407.134.500,00	6.139.795.839,00	139,31

Rincian Pendapatan Retribusi Daerah dijelaskan sebagai berikut:

a) Retribusi Jasa Umum

Pendapatan Retribusi Jasa Umum Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp1.976.292.750,00 dengan realisasi sebesar Rp1.546.673.130,00 atau 78,26% dari target yang ditetapkan. Realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum yang tidak mencapai target, salah satunya karena menurunnya penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan yang bersumber dari penerimaan pemeriksaan laboratorium di banding tahun sebelumnya sebesar Rp2.217.650.860,00. Hal tersebut terjadi karena semakin menurunnya kasus Covid-19 di Kabupaten Lahat pada Tahun 2022, sehingga tidak banyak lagi permintaan pemeriksaan laboratorium untuk Covid-19. Rincian Retribusi Jasa Umum dijelaskan pada Tabel 5.11.

Tabel 5.11. Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum

No	Jenis Pendapatan Retribusi Jasa Umum	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	691.858.250,00	303.101.000,00	43,81
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	145.000.000,00	172.983.000,00	119,30
3	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	600.000.000,00	462.692.000,00	77,12
4	Retribusi Pelayanan Pasar	122.000.000,00	137.196.500,00	112,46
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	125.542.000,00	226.390.000,00	180,33
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00
7	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	6.000.000,00	0,00	0,00
8	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	285.892.500,00	244.310.630,00	85,46
	Jumlah	1.976.292.750,00	1.546.673.130,00	78,26

b) Retribusi Jasa Usaha

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp1.830.841.750,00 dengan realisasi sebesar Rp2.578.943.395,00 atau 140,86% dari target yang ditetapkan. Realisasi pendapatan yang melebihi

target yang ditetapkan, salah satunya dikarena adanya Penertiban Kendaraan Dinas baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang mewajibkan bagi pemegang kendaraan dinas untuk melunasi Pajak Kendaraan, yang berimbas juga kepada pelunasan Retribusi Pemakaian Kendaraan Dinas. Dan juga karena adanya penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium yang ada di Dinas Lingkungan Hidup, yang sudah terakreditasi sehingga banyak masyarakat/perusahaan yang menggunakan jasa pemeriksaan Laboratorium tersebut serta semakin gencarnya pengawasan terhadap limbah perusahaan. Rincian Retribusi Jasa Usaha dijelaskan pada **Tabel 5.12**.

Tabel 5.12. Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha

No	Jenis Pendapatan Retribusi Jasa Usaha	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.039.241.750,00	1.707.811.395,00	164,33
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	400.000.000,00	425.000.000,00	106,25
3	Retribusi Terminal	18.000.000,00	18.010.000,00	100,06
4	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	337.000.000,00	393.050.000,00	116,63
5	Retribusi Rumah Potong Hewan	0,00	28.395.000,00	0,00
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	36.600.000,00	6.677.000,00	18,24
	Jumlah	1.830.841.750,00	2.578.943.395,00	140,86

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp600.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.014.179.314,00 atau 335,70% dari target yang ditetapkan. Rincian Retribusi Perizinan Tertentu dijelaskan pada **Tabel 5.13**.

Tabel 5.13. Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu

No	Jenis Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	600.000.000,00	2.014.179.314,00	335,70
2	Retribusi Izin Gangguan	0,00	0,00	0,00
3	Retribusi Izin Trayek	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	600.000.000,00	2.014.179.314,00	335,70

Dengan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/3231/SJ dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016, maka Retribusi Izin Gangguan/Keramaian dihentikan pemungutannya.

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp9.348.611.221,00 dengan realisasi sebesar Rp9.348.611.221,40 atau 100,00% dari target yang ditetapkan. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan bersumber dari bagian laba atas penyertaan modal pada Bank Sumsel Babel berupa dividen.

4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp84.579.050.286,00 dengan realisasi sebesar Rp101.939.090.785,95 atau 120,53% dari target yang ditetapkan. Rincian Lain-Lain PAD yang Sah dijelaskan pada **Tabel 5.14**.

Tabel 5.14. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No	Jenis Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	124.475.062,00	0,00
2	Jasa Giro	7.898.700.000,00	10.004.344.288,00	126,66
3	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	6.898.585.014,59	0,00
4	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	145.630.250,18	0,00
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	86.139.241,00	0,00
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	7.457.439,00	0,00
7	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	200.000.000,00	99.941.054,00	49,97
8	Pendapatan BLUD	57.086.093.104,00	67.008.272.012,00	117,38
9	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP	19.394.257.182,00	17.564.246.425,18	90,56
	Jumlah	84.579.050.286,00	101.939.090.785,95	120,53

Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah dijelaskan sebagai berikut.

- a) **Hasil Penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang Tidak Dipisahkan**
Realisasi Hasil Penjualan BMD yang tidak terpisahkan Tahun 2022 sebesar Rp124.475.062,00. Jumlah tersebut merupakan hasil penjualan aset daerah berupa kendaraan roda dua maupun roda empat yang dilelangkan pada Tahun 2021, namun penghapusannya baru dilakukan pada Tahun 2022.
- b) **Pendapatan Jasa Giro**
Realisasi Pendapatan Jasa Giro Tahun 2022 sebesar Rp10.004.344.288,00. Jumlah tersebut merupakan jasa giro yang diterima di Rekening Kas Daerah, termasuk jasa giro rekening rutin bendahara pengeluaran yang ditransfer secara *autodebet* ke Rekening Kas Daerah. Realisasi jasa giro yang mencapai 126,66% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp7.898.700.000,00 salah satunya karena ada penerimaan Jasa Giro yang berasal dari Rekening Bank Sumsel Babel dengan nomor rekening 142-300-0001 yang mencapai Rp8.769.498.356,00.
- c) **Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah**
Realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Tahun 2022 adalah sebesar Rp6.898.585.014,59 yang merupakan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- d) **Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain**
Realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Tahun 2022 adalah sebesar Rp145.630.250,18.
- e) **Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**
Realisasi atas Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2022 adalah sebesar Rp86.139.241,00. Rincian Pendapatan Denda Keterlambatan dijelaskan pada **Lampiran 1**.

f) Pendapatan Denda Pajak Daerah

Pendapatan Denda Pajak Daerah yaitu Pendapatan denda Pajak Daerah yang berasal dari denda atas keterlambatan pajak daerah setelah jatuh tempo. Pada Tahun 2022 realisasi dari Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp7.457.439,00.

g) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2022 adalah sebesar Rp99.941.054,00 atau 49,97% dari anggaran sebesar Rp200.000.000,00. Jumlah tersebut merupakan pendapatan dari pengembalian oleh PT. Taspen atas kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang telah memasuki masa pensiun dan pindah tugas.

h) Pendapatan BLUD

Realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2022 adalah sebesar Rp67.008.272.012,00 atau 117,38% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp57.086.093.104,00. Jumlah tersebut merupakan pendapatan pada RSUD Lahat sebagai pendapatan BLUD yang tidak melalui Rekening Kas Daerah. Komponen terbesar dari Pendapatan BLUD adalah Penerimaan BPJS/JKN sebesar Rp40.590.426.456,00 atau mencapai 119,38% dari total Pendapatan BLUD. Rincian Pendapatan BLUD dijelaskan pada Tabel 5.15.

Tabel 5.15. Realisasi Pendapatan BLUD

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Penerimaan Pasien Umum	4.678.429.850,00
2	Penerimaan Jamsoskes/P2JKM	0,00
3	Penerimaan BPJS/JKN	40.590.426.456,00
4	Penerimaan Bunga/Jasa Giro	433.485.368,00
5	Penerimaan Sewa Menyewa	158.296.500,00
6	Penerimaan Penjualan Obat	1.022.746.438,00
7	Penerimaan Parkir	161.106.650,00
8	Penerimaan Diklat dan Pelatihan	154.690.000,00
9	Penerimaan Lainnya	2.296.461.650,00
10	Hasil Kerjasama Operasional (KSO)	25.629.100,00
11	Pendapatan Bantuan Pemerintah	17.487.000.000,00
Jumlah		67.008.272.012,00

i) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada FKTP

Realisasi Pendapatan dari Dana Kapitasi JKN Tahun 2022 pada FKTP sebesar Rp17.564.246.425,18. Jumlah tersebut adalah merupakan jumlah total pendapatan Kapitasi dan Nonkapitasi, yang masing-masing sebesar Rp16.200.300.525,18 dan 1.363.945.900,00. Rincian masing-masing Pendapatan Kapitasi JKN dijelaskan pada Lampiran 2.

b. Pendapatan Transfer

Pada Tahun 2022 jumlah Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp2.023.425.788.998,00 dengan realisasi sebesar Rp2.140.864.262.869,37 atau 105,80% dari target yang ditetapkan. Realisasi Pendapatan Transfer disajikan pada Tabel 5.16.

Tabel 5.16. Realisasi per Jenis Pendapatan Transfer

No	Jenis Pendapatan Transfer	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.485.187.819.977,00	1.561.941.535.077,00	105,17
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	290.067.670.000,00	288.494.958.000,00	99,46
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	248.170.299.021,00	290.427.769.792,37	117,03
	Jumlah	2.023.425.788.998,00	2.140.864.262.869,37	105,80

Rincian Pendapatan Transfer dijelaskan sebagai berikut.

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Jumlah anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun 2022 sebesar Rp1.485.187.819.977,00 dapat dicapai sebesar Rp1.561.941.535.077,00 atau 105,17% dari target yang ditetapkan. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan disajikan pada Tabel 5.17.

Tabel 5.17. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -Dana Perimbangan

No	Jenis Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	603.909.178.977,00	712.746.088.233,00	118,02
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	640.553.208.000,00	639.180.181.874,00	99,79
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	91.858.651.000,00	87.090.790.481,00	94,81
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	148.866.782.000,00	122.924.474.489,00	82,57
	Jumlah	1.485.187.819.977,00	1.561.941.535.077,00	105,17

a) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)

Pendapatan Bagi Hasil Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp603.909.178.977,00 dengan realisasi sebesar Rp712.746.088.233,00 atau 118,02% dari target yang ditetapkan. Rincian Pendapatan Bagi Hasil Tahun 2022 dijelaskan pada Tabel 5.18.

Tabel 5.18. Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Jenis Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	92.416.754.000,00	132.020.961.644,00	142,85
2	DBH PPh Pasal 21	11.351.238.000,00	11.673.288.076,00	102,84
3	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	49.566.000,00	45.848.550,00	92,50
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	8.503.403.000,00	18.140.050.696,00	213,33
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	50.276.334.000,00	73.480.567.406,00	146,15
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	1.570.399.000,00	1.570.399.000,00	100,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	2.942.017.000,00	3.723.787.522,00	126,57
8	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	431.699.362.977,00	466.991.080.339,00	108,18
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	3.141.794.000,00	3.141.794.000,00	100,00
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	100,00
	Jumlah	603.909.178.977,00	712.746.088.233,00	118,02

b) Dana Tranfer Umum - Dana Alokasi Umum

Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp640.553.208.000,00 dengan realisasi sebesar Rp639.180.181.874,00 atau 99,79% dari anggaran yang ditetapkan.

c) Dana Tranfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) - Fisik

Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp91.858.651.000,00 dengan realisasi sebesar Rp87.090.790.481,00 atau 94,81% dari target yang ditetapkan. Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dijelaskan pada **Tabel 5.19**.

Tabel 5.19. Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) - Fisik

No	Jenis Pendapatan Dana Alokasi Khusus DAK Fisik	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	787.202.000,00	786.119.300,00	99,86
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	9.144.559.000,00	9.089.300.950,00	99,40
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	18.893.290.000,00	17.772.549.500,00	94,07
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	885.082.000,00	865.633.000,00	97,80
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	5.845.140.000,00	5.728.016.353,00	98,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	12.417.965.000,00	11.744.687.680,00	94,58
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	99.772.000,00	91.362.000,00	91,57
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	2.188.610.000,00	2.074.304.380,00	94,78
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.285.967.000,00	1.233.950.311,00	95,96
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	-	-	0,00
11	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	2.090.183.000,00	1.904.054.663,00	91,10
12	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	7.660.181.000,00	7.552.859.000,00	98,60
13	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	-	-	0,00
14	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	4.829.257.000,00	4.259.257.000,00	88,20
15	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	-	-	0,00
16	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	1.053.764.000,00	1.033.465.000,00	98,07
17	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	24.677.679.000,00	22.955.231.344,00	93,02
	Jumlah	91.858.651.000,00	87.090.790.481,00	94,81

d) Dana Tranfer Umum - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp148.866.782.000,00 dengan realisasi sebesar Rp122.924.474.489,00 atau 82,57% dari target yang ditetapkan. Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dijelaskan pada **Tabel 5.20**.

Tabel 5.20. Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

No	Jenis Pendapatan Dana Alokasi Khusus DAK Non Fisik	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	%
1	DAK Non Fisik-TPG PNSD	91.550.664.000,00	79.681.590.485,00	87,04
2	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	3.267.000.000,00	1.659.700.000,00	50,80
3	DAK Non Fisik-TKG PNSD	2.841.896.000,00	-	0,00
4	DAK Non Fisik-BOP PAUD	6.438.000.000,00	5.544.686.000,00	86,12
5	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	990.300.000,00	879.400.000,00	88,80
6	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2.226.551.000,00	1.342.878.069,00	60,31
7	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	406.876.000,00	406.874.050,00	100,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	31.471.931.000,00	25.757.066.035,00	81,84
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	776.187.000,00	541.276.000,00	69,74
10	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	628.023.000,00	628.023.000,00	100,00
11	DAK Non Fisik-PK2UKM	400.800.000,00	400.800.000,00	100,00
12	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	383.914.000,00	299.719.200,00	78,07
13	DAK Non Fisik-BOKB-KB	6.873.440.000,00	5.308.420.650,00	77,23
14	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	451.800.000,00	451.800.000,00	100,00
15	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	159.400.000,00	22.241.000,00	13,95
	Jumlah	148.866.782.000,00	122.924.474.489,00	82,57

2) Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Jumlah anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Tahun 2022 sebesar Rp290.067.670.000,00 yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp5.124.360.000,00 dan Transfer Pemerintah Pusat Dana Desa sebesar Rp284.943.310.000,00.

Berdasarkan SE Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6966/SJ tanggal 30 Desember 2020, tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Desa oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bahwa berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan Dana Desa (SP2DD), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menyajikan Pendapatan Dana Desa dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Tahun 2022 mencapai 99,46% yaitu sebesar Rp288.494.958.000,00 yang merupakan realisasi dari Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp5.124.360.000,00 atau mencapai 100,00% dari anggaran dan realisasi Dana Desa sebesar Rp283.370.598.000,00 atau 99,45 % dari anggaran yang ditetapkan.

3) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Jumlah anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2022 adalah sebesar Rp248.170.299.021,00 dapat dicapai sebesar Rp290.427.769.792,37 atau 117,03% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah disajikan pada **Tabel 5.21**

Tabel 5.21. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah

No	Jenis Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%
1	Pendapatan Bagi Hasil	77.750.649.468,00	128.843.277.205,37	165,71
2	Bantuan Keuangan	170.419.649.553,00	161.584.492.587,00	94,82
Jumlah		248.170.299.021,00	290.427.769.792,37	117,03

Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah dijelaskan sebagai berikut :

a) Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan Bagi Hasil pada Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak, yang pada APBD Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp77.750.649.468,00 dengan capaian sebesar Rp128.843.277.205,37 atau 165,71% dari anggaran yang ditetapkan. Jumlah tersebut merupakan pelunasan Utang Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2021 dan pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2022. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak disajikan pada **Tabel 5.22**.

Tabel 5.22. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak

No	Jenis Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Pelunasan Utang Tahun 2021 (Rp)	Pembayaran Tahun 2022 (Rp)	Total Pembayaran Tahun 2022 (Rp)	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	14.560.075.858,00	1.833.733.483,00	13.076.314.472,00	14.910.047.955,00	102,40
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	9.641.647.306,00	1.531.293.025,00	12.845.599.402,00	14.376.892.427,00	149,11
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	33.813.084.265,00	4.799.791.257,00	73.403.426.245,78	78.203.217.502,78	231,28
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	359.628.682,00	30.196.537,00	387.484.137,00	417.680.674,00	116,14
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	19.376.213.357,00	941.444.450,59	19.993.994.196,00	20.935.438.646,59	108,05
Jumlah		77.750.649.468,00	9.136.458.752,59	119.706.818.452,78	128.843.277.205,37	165,71

b) Bantuan Keuangan

Jumlah anggaran Bantuan Keuangan Tahun 2022 sebesar Rp170.419.649.553,00 yang merupakan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi. Bantuan Keuangan Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp161.584.492.587,00 atau mencapai 94,82% dari anggaran yang ditetapkan.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bantuan Keuangan Provinsi Bersifat Khusus yang disalurkan kepada Pemerintah Kabupaten Lahat sebesar Rp161.584.492.587,00, dengan rincian sebagai berikut :

- a) SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 687 Tahun 2021 yang dipertegas dengan keputusan Gubernur Sumsel Nomor 180/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 2 Maret 2022 tentang Kurang Salur Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2021 sebesar Rp2.204.990.400,00;
- b) SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 326/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 28 April 2022 tentang Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Lahat. Untuk Tahap I Tahun 2022 direalisasikan sebesar Rp28.875.813.300,00 yang ditransfer pada tanggal 28 September 2022, kemudian Tahap II Tahun 2022 direalisasikan pada tanggal 4 November 2022 sebesar Rp38.501.084.400,00 dan Tahap III

direalisasikan pada tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp44.583.874.887,00;

- c) SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 628/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 31 Agustus 2022 tentang Belanja Bantuan Keuangan bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Lahat. Untuk Tahap I Tahun 2022 direalisasikan pada tanggal 12 Desember 2022 sebesar Rp8.848.083.180,00, kemudian Tahap II dan Tahap III Tahun 2022 direalisasikan pada tanggal 30 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp11.797.444.240,00 dan Rp8.848.083.180,00; dan
- d) SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 816/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 7 November 2022 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Lahat pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022. Bantuan Gubernur tersebut untuk Tahap I, II dan III di realisasikan sekaligus pada tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp17.925.119.000,00.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Jumlah anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2022 adalah sebesar Rp59.741.181.526,00 dengan realisasi sebesar Rp67.341.861.309,00 atau 112,72% dari target yang ditetapkan. Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dijelaskan sebagai berikut.

1) Pendapatan Hibah

Jumlah anggaran Pendapatan Hibah sebesar Rp2.635.881.526,00 dengan Realisasi mencapai Rp11.797.669.377,00 atau 447,58% dari anggaran yang ditetapkan. Pendapatan Hibah tersebut terdiri dari:

- a). Hibah Pemerintah Pusat untuk Program *Integrated Participatory Development and Management Of Irrigation Project* (IPDMIP) sebesar Rp7.547.669.377,00
- b). Hibah Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis dari PT. Bukit Asam sebesar Rp4.250.000.000,00

2) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan PerUU/ Pendapatan Lainnya

Jumlah anggaran Pendapatan Lainnya Tahun 2022 sebesar Rp57.105.300.000,00 untuk Realisasi Pendapatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2022 sebesar Rp55.544.191.932,00, yang terdiri dari pendapatan BOS reguler dari SD Negeri dan Swasta serta SMP Negeri dan Swasta. Rincian pendapatan Dana BOS pada **Tabel 5.23**.

Tabel 5.23. Realisasi Pendapatan Dana BOS

No	Uraian	Pendapatan BOS Reguler (Rp)	Pendapatan Atas Pengembalian (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Jumlah Pendapatan BOS (Rp)
1	SD Negeri	32.933.381.829,00	12.224.004,00	1.827.807,00	32.947.433.640,00
2	SMP Negeri	17.624.961.423,00	0,00	3.191.053,00	17.628.152.476,00
3	SD Swasta	3.124.065.816,00	0,00	0,00	3.124.065.816,00
4	SMP Swasta	1.844.540.000,00	0,00	0,00	1.844.540.000,00
	Jumlah	55.526.949.068,00	12.224.004,00	5.018.860,00	55.544.191.932,00

5.1.2. Belanja

Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, pada Bab II Pasal 5 untuk penyusunan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional pada Tahun 2022, sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang ada dalam lampiran permendagri, yang mana untuk akun belanja transfer tergabung dalam belanja daerah, tidak berdiri sendiri seperti dalam Permendagri 64 Tahun 2020. Anggaran Belanja Daerah Tahun 2022 sebesar Rp2.576.228.009.902,00 dengan realisasi sebesar Rp2.298.684.886.504,21 atau 89,23% dari target yang ditetapkan. Jenis realisasi Belanja disajikan pada **Tabel 5.24**.

Tabel 5.24. Realisasi per Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
1	Belanja Operasi	1.406.879.137.661,00	1.194.306.194.387,21	84,89	1.188.215.370.585,87
2	Belanja Modal	705.196.764.966,00	647.525.931.568,00	91,82	474.177.167.894,21
3	Belanja Tak Terduga	4.847.477.275,00	0,00	0,00	26.339.500,00
4	Belanja Transfer	459.304.630.000,00	456.852.760.549,00	99,47	450.262.273.775,00
	Jumlah	2.576.228.009.902,00	2.298.684.886.504,21	89,23	2.112.681.151.755,08

Realisasi Belanja Tahun 2022 secara total mengalami peningkatan sebesar 8,80% dari Realisasi Belanja Tahun 2021. Belanja Operasi mengalami peningkatan sebesar 0,51% dan Belanja Modal juga mengalami peningkatan sebesar 36,56%, sedangkan Belanja Tak Terduga mengalami penurunan 100,00% dan Belanja Transfer mengalami peningkatan 1,46% dari Tahun 2021. Rincian Belanja menurut klasifikasi ekonomi dijelaskan sebagai berikut.

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Pada Tahun 2022 direalisasikan sebesar Rp1.194.306.194.387,21 atau 84,89% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.406.879.137.661,00. Dalam Realisasi Belanja Operasional tersebut terdapat realisasi belanja untuk Penanganan Covid-19 sebesar Rp11.564.517.611,00, Belanja Wajib Perlindungan Sosial untuk penanganan Dampak Inflasi sebesar Rp12.172.889.422,00, serta belanja untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp107.645.572.782,00. Realisasi per jenis Belanja Operasi dijelaskan pada **Tabel 5.25**.

Tabel 5.25. Realisasi per Jenis Belanja Operasi

No	Jenis Belanja Operasi	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	727.096.206.586,00	618.704.238.751,00	85,09
2	Belanja Barang dan Jasa	595.519.082.475,00	496.557.717.496,21	83,38
3	Belanja Hibah	80.800.248.600,00	75.620.638.140,00	93,59
4	Belanja Bantuan Sosial	3.463.600.000,00	3.423.600.000,00	98,85
	Jumlah	1.406.879.137.661,00	1.194.306.194.387,21	84,89

Rincian Belanja Operasi dijelaskan sebagai berikut;

1) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 sebesar Rp618.704.238.751,00 atau 85,09% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp727.096.206.586,00. Rincian Belanja Pegawai dijelaskan pada **Tabel 5.26**.

Tabel 5.26. Realisasi Belanja Pegawai

No	Jenis Belanja Pegawai	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%
1	Belanja Gaji Dan Tunjangan ASN	504.439.532.025,00	418.101.093.561,00	82,88
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	68.781.685.103,00	59.709.001.599,00	86,81
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	99.727.060.000,00	92.514.105.023,00	92,77
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	28.748.870.604,00	27.837.497.401,00	96,83
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/ WKDH	216.116.766,00	205.933.234,00	95,29
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/ WKDH	901.600.000,00	721.414.822,00	80,01
7	Belanja Pegawai BOS	21.794.562.000,00	17.881.574.250,00	82,05
8	Belanja Pegawai BLUD	2.486.780.088,00	1.733.618.861,00	69,71
	Jumlah	727.096.206.586,00	618.704.238.751,00	85,09

Rincian Belanja Pegawai dijelaskan sebagai berikut;

a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2022 sebesar Rp418.101.093.561,00 atau 82,88% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp504.439.532.025,00. Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dijelaskan pada **Tabel 5.27**.

Tabel 5.27. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

No	Jenis Belanja Gaji dan Tunjangan	Anggaran Tahun 2022(Rp)	Realisasi Tahun 2022(Rp)	%
1	Belanja Gaji Pokok ASN	371.069.595.369,00	320.937.197.825,00	86,49
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	33.609.525.376,00	28.025.949.335,00	83,39
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	11.135.319.692,00	10.242.458.270,00	91,98
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	21.218.196.800,00	18.579.668.000,00	87,56
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	5.923.304.975,00	4.699.538.530,00	79,34
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	22.696.080.408,00	17.115.190.130,00	75,41
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.913.004.503,00	440.755.896,00	8,97
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	16.258.428,00	4.257.527,00	26,19
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	27.137.872.632,00	15.402.347.390,00	56,76
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	898.872.794,00	663.625.365,00	73,83
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.697.118.332,00	1.990.105.293,00	73,79
12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	3.124.382.716,00	0,00	0,00
	Jumlah	504.439.532.025,00	418.101.093.561,00	82,88

b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2022 sebesar Rp59.709.001.599,00 atau 86,81% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp68.781.685.103,00. Rincian Belanja Tambahan Penghasilan ASN dijelaskan pada **Tabel 5.28**.

Tabel 5.28. Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN

No	Jenis Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	15.376.930.200,00	12.461.960.076,00	81,04
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	7.606.240.000,00	7.167.004.000,00	94,23
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	45.798.514.903,00	40.080.037.523,00	87,51
	Jumlah	68.781.685.103,00	59.709.001.599,00	86,81

c) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2022 sebesar Rp92.514.105.023,00 atau 92,77% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp99.727.060.000,00. Rincian Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dijelaskan pada **Tabel 5.29**.

Tabel 5.29. Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

No	Jenis Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%
1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.960.470.011,00	1.704.308.761,00	86,93
2	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	107.029.989,00	67.131.499,00	62,72
3	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	91.550.664.000,00	89.183.848.063,00	97,41
4	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	2.841.896.000,00	383.444.700,00	13,49
5	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	3.267.000.000,00	1.175.372.000,00	35,98
	Jumlah	99.727.060.000,00	92.514.105.023,00	92,77

d) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2022 sebesar Rp27.837.497.401,00 atau 96,83% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp28.748.870.604,00. Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD dijelaskan pada **Tabel 5.30**.

Tabel 5.30. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

No	Jenis Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%
1	Belanja Uang Representasi DPRD	892.290.000,00	892.290.000,00	100,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	124.920.600,00	118.305.600,00	94,70
3	Belanja Tunjangan Beras DPRD	139.046.400,00	125.793.540,00	90,47
4	Belanja Uang Paket DPRD	89.229.000,00	76.482.000,00	85,71
5	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.293.820.500,00	1.293.820.500,00	100,00
6	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	24.725.400,00	21.741.300,00	87,93
7	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	201.213.600,00	102.129.300,00	50,76
8	Belanja Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.040.000.000,00	5.040.000.000,00	100,00
9	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.260.000.000,00	1.260.000.000,00	100,00

No	Jenis Belanja Gaji dan Tunjangan DPR	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%
10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	412.635.832,00	394.584.337,00	95,63
11	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	10.230.579.272,00	9.854.350.824,00	96,32
12	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	8.658.000.000,00	8.658.000.000,00	100,00
13	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	382.410.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	28.748.870.604,00	27.837.497.401,00	96,83

e) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDW/WKDH Tahun 2022 sebesar Rp205.933.234,00 atau 95,29% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp216.116.766,00. Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dijelaskan pada **Tabel 5.31**.

Tabel 5.31. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

No	Jenis Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%
1	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	60.745.350,00	54.600.000,00	89,88
2	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.318.500,00	7.140.000,00	97,56
3	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00	98.280.000,00	97,56
4	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.274.589,00	7.097.160,00	97,56
5	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	388.263,00	378.354,00	97,45
6	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	54.480,00	2.040,00	3,74
7	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.560.820,00	5.486.400,00	83,62
8	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	134.816,00	112.320,00	83,31
9	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	402.948,00	336.960,00	83,62
10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	32.500.000,00	32.500.000,00	100,00
	Jumlah	216.116.766,00	205.933.234,00	95,29

f) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2022 sebesar Rp721.414.822,00 atau 80,01% dari anggaran sebesar Rp901.600.000,00 yang terdiri dari :

- (1) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD, dengan realisasi sebesar Rp201.600.000,0 atau 100% dari anggaran sebesar Rp201.600.000,00;
- (2) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH, dengan realisasi sebesar Rp519.814.822,00 atau 74,26% dari anggaran sebesar Rp700.000.000,00.

g) Belanja Pegawai BOS

Realisasi Belanja Pegawai BOS Tahun 2022 sebesar Rp17.881.574.250,00 atau 82,05% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp21.794.562.000,00.

h) Belanja Pegawai BLUD

Realisasi Belanja Pegawai BLUD Tahun 2022 sebesar Rp1.733.618.861,00 atau 69,71% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.486.780.088,00. Belanja Pegawai BLUD RSUD Lahat yang belanjanya tidak melalui Kas Daerah.

2) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 sebesar Rp496.557.717.496,21 atau 83,38% dari anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp595.519.082.475,00. Ini merupakan Belanja Barang untuk seluruh kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2022 baik yang belanjanya melalui Kas Daerah maupun tidak melalui Kas Daerah yaitu Belanja yang bersumber dari Dana BLUD, JKN dan Dana BOS. Rincian Belanja Barang dan Jasa dijelaskan pada **Tabel 5.32**.

Tabel 5.32. Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No	Jenis Belanja Barang dan Jasa	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%
1	Belanja Barang	137.423.375.569,00	113.311.462.572,00	82,45
2	Belanja Jasa	232.662.957.724,00	174.003.343.265,20	74,79
3	Belanja Pemeliharaan	8.984.197.773,00	8.559.878.053,00	95,28
4	Belanja Perjalanan Dinas	122.951.846.290,00	97.084.131.843,00	78,96
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.291.050.000,00	7.217.083.000,00	98,99
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	33.882.648.000,00	45.784.685.902,00	135,13
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	52.323.007.119,00	50.597.132.861,01	96,70
	Jumlah	595.519.082.475,00	496.557.717.496,21	83,38

Rincian Belanja Barang dan Jasa dijelaskan sebagai berikut;

a) Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun 2022 sebesar Rp113.311.462.572,00 atau 82,45% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp137.423.375.569,00. Rincian Belanja Barang dijelaskan pada **Tabel 5.33**.

Tabel 5.33. Realisasi Belanja Barang

No	Jenis Belanja Barang	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%
1	Belanja Barang Pakai Habis	137.421.422.062,00	113.309.515.572,00	82,45
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.953.507,00	1.947.000,00	99,67
	Jumlah	137.423.375.569,00	113.311.462.572,00	82,45

b) Belanja Jasa

Realisasi Belanja Jasa Tahun 2022 sebesar Rp174.003.343.265,20 atau 74,79% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp232.662.957.724,00. Dalam Belanja Jasa Kantor terdapat Realisasi Belanja Jasa Tenaga Kesehatan sebesar Rp23.114.247.085,70. Rincian Belanja Jasa dijelaskan pada **Tabel 5.34**.

Tabel 5.34. Realisasi Belanja Jasa

No	Jenis Belanja Jasa	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%
1	Belanja Jasa Kantor	138.333.651.810,00	104.253.396.221,20	75,36
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	65.455.544.093,00	47.418.414.372,00	72,44
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.391.925.990,00	1.641.054.150,00	68,61
4	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6.351.522.950,00	5.132.788.552,00	80,81
5	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	540.500.000,00	453.450.000,00	83,89
6	Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	4.108.236.891,00	3.736.540.600,00	90,95
7	Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	8.804.091.990,00	5.750.096.370,00	65,31
8	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	579.630.000,00	232.480.000,00	40,11
9	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.045.054.000,00	5.332.323.000,00	88,21
10	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	52.800.000,00	52.800.000,00	100,00

No	Jenis Belanja Jasa	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%
	Jumlah	232.662.957.724,00	174.003.343.265,20	74,79

c) Belanja Pemeliharaan

Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2022 sebesar Rp8.559.878.053,00 atau 95,28% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp8.984.197.773,00. Rincian Belanja Pemeliharaan dijelaskan pada **Tabel 5.35**.

Tabel 5.35. Realisasi Belanja Pemeliharaan

No	Jenis Belanja Pemeliharaan	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.621.873.000,00	3.286.186.078,00	90,73
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.320.324.773,00	5.235.691.975,00	98,41
3	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	42.000.000,00	38.000.000,00	90,48
	Jumlah	8.984.197.773,00	8.559.878.053,00	95,28

d) Belanja Perjalanan Dinas

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2022 sebesar Rp97.084.131.843,00 atau 78,96% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp122.951.846.290,00. Rincian Belanja Perjalanan Dinas dijelaskan pada **Tabel 5.36**.

Tabel 5.36. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas

No	Jenis Belanja Perjalanan Dinas	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	122.951.846.290,00	97.084.131.843,00	78,96
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	122.951.846.290,00	97.084.131.843,00	78,96

e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2022 adalah sebesar Rp7.217.083.000,00 atau 98,99% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp7.291.050.000,00. Rincian Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dijelaskan pada **Tabel 5.37**.

Tabel 5.37. Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

No	Jenis Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	611.350.000,00	546.850.000,00	89,45
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.679.700.000,00	6.670.233.000,00	99,86
	Jumlah	7.291.050.000,00	7.217.083.000,00	98,99

f) Belanja Barang dan Jasa BOS

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS Daerah maupun BOS Nasional (Reguler) Tahun 2022 sebesar Rp45.784.685.902,00 atau 135,13% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp33.882.648.000,00. Sedangkan realisasi Belanja Barang dan Jasa yang tidak melalui Kas Daerah, yaitu yang

bersumber dari BOS Nasional sebesar Rp30.590.262.902,00. Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa yang bersumber dari Dana BOS Nasional dijelaskan pada **Tabel 5.38**.

Tabel 5.38. Realisasi Belanja dari Dana BOS

No	Uraian	BOS SD Negeri (Rp)	BOS SMP Negeri (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)
1	Belanja Barang Persediaan	13.618.350.343,00	8.191.262.801,00	21.809.613.144,00
2	Belanja Barang dan Jasa	2.703.443.939,00	1.463.221.965,00	4.166.665.904,00
3	Belanja Pemeliharaan	2.538.567.776,00	1.365.050.778,00	3.903.618.554,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	537.042.300,00	173.323.000,00	710.365.300,00
Jumlah		19.397.404.358,00	11.192.858.544,00	30.590.262.902,00

g) Belanja Barang dan Jasa BLUD

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2022 sebesar Rp50.597.132.861,01 atau 96,70% dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp52.323.007.119,00. Belanja Barang dan Jasa BLUD merupakan belanja yang tidak melalui Kas Daerah. Rincian realisasi belanja barang dan jasa yang bersumber dari Dana BLUD dijelaskan pada **Tabel 5.39**.

Tabel 5.39. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD

No	Jenis Belanja Barang	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%
1	Biaya Bahan	20.681.276.401,00	20.077.760.346,01	97,08
2	Biaya Jasa Pelayanan	23.025.898.933,00	23.021.687.151,00	99,98
3	Biaya Pemeliharaan	583.200.000,00	539.985.613,00	92,59
4	Biaya Administrasi Umum	1.018.935.000,00	753.161.360,00	73,92
5	Biaya Barang dan Jasa	5.705.644.785,00	5.047.221.121,00	88,46
6	Biaya Lain-lain	1.100.552.000,00	984.002.718,00	89,41
7	Biaya Promosi	25.000.000,00	9.000.000,00	36,00
8	Biaya Bunga	22.000.000,00	4.923.500,00	22,38
9	Biaya Administrasi Bank	2.500.000,00	2.160.000,00	86,40
10	Biaya kerugian penjualan aset tetap	-	-	0,00
11	Biaya kerugian penurunan nilai	-	-	0,00
12	Biaya non operasional lainnya	158.000.000,00	157.231.052,00	99,51
13	Pengeluaran Pembayaran Hutang	-	-	0,00
Jumlah		52.323.007.119,00	50.597.132.861,01	96,70

3) Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2022 sebesar Rp75.620.638.140,00 atau 93,59% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp80.800.248.600,00. Rincian Belanja Hibah dijelaskan pada **Tabel 5.40**.

Tabel 5.40. Realisasi Belanja Hibah

No	Jenis Belanja Hibah	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	7.018.832.092,00	6.984.369.000,00	99,51
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	59.137.443.882,00	55.000.204.698,00	93,00
3	Belanja Hibah Dana BOS	13.174.320.000,00	12.166.411.816,00	92,35
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.469.652.626,00	1.469.652.626,00	100,00
Jumlah		80.800.248.600,00	75.620.638.140,00	93,59

Atas jumlah Belanja Hibah tersebut tidak termasuk sebesar Rp6.362.568.000,00 salah dianggarkan pada Belanja Modal yang terdiri dari:

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp193.584.000,00;
- (2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp5.870.794.200,00; dan
- (3) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp155.700.000,00.

Rincian Belanja Barang dan Jasa dijelaskan sebagai berikut;

a) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Tahun 2022 besar Rp6.984.369.000,00 atau 99,51% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp7.018.832.092,00. Rincian Belanja Hibah dijelaskan pada **Tabel 5.41**.

Tabel 5.41 Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

No	Jenis Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	5.370.318.000,00	5.370.318.000,00	100,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.648.514.092,00	1.614.051.000,00	97,91
	Jumlah	7.018.832.092,00	6.984.369.000,00	99,51

b) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada Tahun 2022 sebesar Rp55.000.204.698,00 atau 93,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp59.137.443.882,00. Rincian Belanja Hibah dijelaskan pada **Tabel 5.42**.

Tabel 5.42 Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

No	Jenis Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Perpu	13.514.664.140,00	13.296.646.835,00	98,39
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar	36.989.905.564,00	33.821.178.863,00	91,43
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan	8.632.874.178,00	7.882.379.000,00	91,31
	Jumlah	59.137.443.882,00	55.000.204.698,00	93,00

c) Belanja Hibah Dana BOS

Realisasi Belanja Hibah Dana BOS Tahun 2022 sebesar Rp12.166.411.816,00 atau 92,35% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp13.174.320.000,00. Rincian Belanja Hibah Dana BOS dijelaskan pada **Tabel 5.43**.

Tabel 5.43. Realisasi Belanja Hibah Dana BOS

No	Jenis Belanja Hibah Dana BOS	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%
1	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	3.809.160.000,00	3.785.025.816,00	99,37
2	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh	2.498.160.000,00	2.407.100.000,00	96,35

No	Jenis Belanja Hibah Dana BOS	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%
	Satdikmen Swasta			
3	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	6.867.000.000,00	5.974.286.000,00	87,00
	Jumlah	13.174.320.000,00	12.166.411.816,00	92,35

d) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2022 sebesar Rp1.469.652.626,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.469.652.626,00. Rincian belanja dijelaskan di **Lampiran 3**.

4) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp3.423.600.000,00 atau 98,85% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.463.600.000,00. Belanja tersebut dianggarkan dan direalisasikan pada SKPD teknis.

a) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu

Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Tahun 2022 sebesar Rp1.360.000.000,00 atau 97,14% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.400.000.000,00. Belanja Bantuan Sosial untuk Individu pada Tahun 2022 seluruhnya atau 100% ada di Dinas PRKPP.

b) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga

Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga merupakan Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga Tahun 2022 sebesar Rp563.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan Rp563.000.000,00. Realisasi Belanja Bansos kepada Keluarga terdapat di Dinas Sosial.

c) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat

Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok masyarakat merupakan Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat Tahun 2022 sebesar Rp1.500.600.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan Rp1.500.600.000,00. Realisasi tersebut terdapat di BPBD dan Dinas PRKPP, masing-masing sebesar Rp600.000,00 atau 100% dari anggaran Rp600.000,00 dan Rp1.500.000.000,00 atau 100% dari anggaran Rp1.500.000.000,00.

b. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 sebesar Rp647.525.931.568,00 atau 91,82% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp705.196.764.966,00. Dalam Realisasi Belanja Modal tersebut terdapat realisasi belanja modal untuk Penanganan Covid-19 sebesar Rp197.999.580,00, belanja modal untuk Perlindungan Sosial dalam rangka penanganan Dampak Inflasi sebesar Rp32.670.000,00, serta belanja modal untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp274.695.000,00. Serta belanja modal yang bersumber dari dana JKN, BOS dan BLUD yang tidak melalui kas daerah. Rincian realisasi per jenis Belanja Modal dijelaskan pada **Tabel 5.44**.

Tabel 5.44. Realisasi per Jenis Belanja Modal

No	Jenis Belanja Modal	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%
1	Belanja Tanah	12.327.900.000,00	0,00	0,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	100.653.567.879,00	89.269.159.110,00	88,69
3	Belanja Gedung dan Bangunan	78.368.123.558,00	74.245.226.439,00	94,74
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	493.891.367.029,00	473.936.244.474,00	95,96
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	19.955.806.500,00	10.075.301.545,00	50,49
6	Belanja Aset Lainnya	-	0,00	0,00
	Jumlah	705.196.764.966,00	647.525.931.568,00	91,82

Realisasi Belanja Modal dijelaskan sebagai berikut;

1) Belanja Tanah

Untuk Belanja Modal berupa Tanah pada Tahun 2022, dianggarkan sebesar Rp12.327.900.000,00 sedangkan realisasinya Rp0,00.

2) Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2022 sebesar Rp89.269.159.110,00 atau 88,69% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp100.653.567.879,00. Rincian Belanja Peralatan dan Mesin dijelaskan pada **Tabel 5.45**.

Tabel 5.45. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin

No	Jenis Belanja Peralatan dan Mesin	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%
1	Belanja Modal Alat Besar	27.120.220.915,00	26.292.205.062,00	96,95
2	Belanja Modal Alat Angkutan	8.917.070.900,00	7.136.757.616,00	80,03
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	486.260.000,00	480.410.000,00	98,80
4	Belanja Modal Alat Pertanian	29.754.000,00	25.350.000,00	85,20
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	16.845.878.647,00	12.827.036.331,00	76,14
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	2.560.820.395,00	2.359.326.690,00	92,13
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	27.284.239.090,00	25.617.824.483,00	93,89
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	851.859.380,00	558.260.679,00	65,53
9	Belanja Modal Komputer	13.805.806.982,00	13.096.059.579,00	94,86
10	Belanja Modal Alat Eksplorasi	100.000.000,00	94.128.000,00	94,13
11	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	66.399.970,00	47.849.970,00	72,06
12	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	54.112.500,00	49.500.000,00	91,48
13	Belanja Modal Rambu - Rambu	2.272.998.400,00	428.020.000,00	18,83
14	Belanja Modal Peralatan Olah Raga	258.146.700,00	256.430.700,00	99,34
	Jumlah	100.653.567.879,00	89.269.159.110,00	88,69

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dijelaskan sebagai berikut;

a) Belanja Modal Alat Besar

Realisasi Belanja Modal Alat Besar Tahun 2022 sebesar Rp26.292.205.062,00 atau 96,95% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp27.120.220.915,00. Rincian Belanja Modal Alat Besar dijelaskan pada **Tabel 5.46**.

Tabel 5.46. Realisasi Belanja Modal Alat Besar

No	Jenis Belanja Modal Alat Besar	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	1.700.000.000,00	1.587.300.000,00	93,37
2	Belanja Modal Alat Bantu	25.420.220.915,00	24.704.905.062,00	97,19
	Jumlah	27.120.220.915,00	26.292.205.062,00	96,95

Dalam Belanja Modal Alat Bantu yang realisasinya sebesar Rp24.704.905.062,00 atau 97,19% dari anggaran, terdapat realisasi belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp23.078.343.645,00.

b) Belanja Modal Alat Angkutan

Realisasi Belanja Modal Alat Angkut Tahun 2022 sebesar Rp7.136.757.616,00 atau 80,03% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp8.917.070.900,00 yang merupakan Belanja Modal Alat Angkut Darat Bermotor.

c) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur

Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Tahun 2022 sebesar Rp480.410.000,00 atau 98,80% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp486.260.000,00. Rincian Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur dijelaskan pada **Tabel 5.47**.

Tabel 5.47. Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur

No	Jenis Belanja Modal Alat Bengkel dan Ukur	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%
1	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	44.000.000,00	38.650.000,00	87,84
2	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Alat Ukur	442.260.000,00	441.760.000,00	99,89
	Jumlah	486.260.000,00	480.410.000,00	98,80

d) Belanja Modal Alat Pertanian

Realisasi Belanja Modal Alat Pertanian Tahun 2022 sebesar Rp25.350.000,00 atau 85,20% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp29.754.000,00. Yang terdiri dari Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian dan Belanja Modal Alat-Alat Peternakan yang masing-masing realisasinya sebesar Rp24.000.000,00 atau 93,24% dari anggaran dan Rp1.350.000,00 atau 100,00% dari anggaran.

e) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2022 sebesar Rp12.827.036.331,00 atau 76,14% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp16.845.878.647,00. Rincian Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga dijelaskan pada **Tabel 5.48**.

Tabel 5.48. Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

No	Jenis Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%
1	Belanja Modal Alat Kantor	2.050.416.450,00	1.638.048.903,00	79,89
2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	14.434.825.047,00	10.878.693.019,00	75,36
3	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	360.637.150,00	310.294.409,00	86,04
	Jumlah	16.845.878.647,00	12.827.036.331,00	76,14

f) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Tahun 2022 sebesar Rp2.359.326.690,00 atau 92,13% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.560.820.395,00. Rincian Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar dijelaskan pada **Tabel 5.49**.

Tabel 5.49. Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

No	Jenis Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%
1	Belanja Modal Alat Studio	1.006.865.145,00	898.206.290,00	89,21
2	Belanja Modal Alat Komunikasi	684.825.250,00	609.335.000,00	88,98
3	Belanja Modal Alat Pemancar	869.130.000,00	851.785.400,00	98,00
	Jumlah	2.560.820.395,00	2.359.326.690,00	92,13

g) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan

Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Tahun 2022 sebesar Rp25.617.824.483,00 atau 93,89% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp27.284.239.090,00. Dalam realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran tersebut ada SP2D-LS nomor; 11.04/04.0/LS/1.02.0.00.02.0000/P.05/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 untuk Permintaan Pembayaran 100% Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Glukometer Infant) Tahun 2022 BANGUB, PT Sinergi Persada Medica senilai Rp25.058.500,0 yang tervalidasi bank atau terbayarkan 2 (dua) kali yaitu tanggal 28 Desember 2022 dan tanggal 29 Desember 2022. Dan pada tanggal 18 Januari 2023 telah disetor kembali ke Rekening RKUD Kab. Lahat No. Rek. 1423000001 sebesar Rp25.058.500,00 oleh PT. Sinergi Persada Medica. Rincian Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan dijelaskan pada **Tabel 5.50**.

Tabel 5.50. Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan

No	Jenis Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%
1	Belanja Modal Alat Kedokteran	25.984.239.090,00	24.318.224.483,00	93,59
2	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.300.000.000,00	1.299.600.000,00	99,97
	Jumlah	27.284.239.090,00	25.617.824.483,00	93,89

h) Belanja Modal Alat Laboratorium

Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium Tahun 2022 sebesar Rp558.260.679,00 atau 65,53% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp851.859.380,00. Rincian Belanja Modal Alat Laboratorium dijelaskan pada **Tabel 5.51**.

Tabel 5.51. Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium

No	Jenis Belanja Modal Alat Laboratorium	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%
1	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	851.859.380,00	558.260.679,00	65,53
2	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	851.859.380,00	558.260.679,00	65,53

i) Belanja Modal Komputer

Realisasi Belanja Modal Komputer Tahun 2022 sebesar Rp13.096.059.579,00 atau 94,86% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp13.805.806.982,00. Rincian Belanja Modal Komputer dijelaskan pada **Tabel 5.52**.

Tabel 5.52. Realisasi Belanja Modal Komputer

No	Jenis Belanja Modal Komputer	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%
1	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	6.639.496.500,00	6.109.632.702,00	92,02
2	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	7.166.310.482,00	6.986.426.877,00	97,49
	Jumlah	13.805.806.982,00	13.096.059.579,00	94,86

j) Belanja Modal Alat Eksplorasi

Realisasi Belanja Modal Alat Eksplorasi Tahun 2022 sebesar Rp94.128.000,00 atau 94,13% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp100.000.000,00.

k) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja

Realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Tahun 2022 sebesar Rp47.849.970,00 atau 72,06% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp66.399.970,00. Rincian Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja dijelaskan pada **Tabel 5.53**.

Tabel 5.53. Realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja

No	Jenis Belanja Modal alat Keselamatan Kerja	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%
1	Belanja Modal Alat Pelindung	30.400.000,00	11.850.000,00	38,98
2	Belanja Modal Alat SAR	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
3	Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan	29.999.970,00	29.999.970,00	100,00
	Jumlah	66.399.970,00	47.849.970,00	72,06

l) Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi

Realisasi Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi Tahun 2022 sebesar Rp49.500.000,00 atau 91,48% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp54.112.500,00.

m) Belanja Modal Rambu-Rambu

Realisasi Belanja Modal Rambu-Rambu Tahun 2022 sebesar Rp428.020.000,00 atau 18,83% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.272.998.400,00.

n) Belanja Modal Peralatan Olahraga

Realisasi Belanja Modal Peralatan Olahraga Tahun 2022 sebesar Rp256.430.700,00 atau 99,34% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp258.146.700,00.

3) Belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2022 sebesar Rp74.245.226.439,00 atau 94,74% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp78.368.123.558,00. Rincian Belanja Gedung dan Bangunan dijelaskan pada **Tabel 5.54**.

Tabel 5.54. Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan

No	Jenis Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	69.255.240.694,00	66.606.526.939,00	96,18
2	Belanja Modal Monumen	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	9.112.882.864,00	7.638.699.500,00	83,82
	Jumlah	78.368.123.558,00	74.245.226.439,00	94,74

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dijelaskan sebagai berikut;

a) Belanja Modal Bangunan Gedung

Realisasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung Tahun 2022 sebesar Rp66.606.526.939,00 atau 96,18% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp69.255.240.694,00. Di dalam Realisasi Modal Bangunan Gedung tersebut terdapat Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp1.105.652.500,00 atau 81,90% dari anggaran sebesar Rp1.350.000.000,00. Rincian Belanja Modal Bangunan Gedung dijelaskan pada **Tabel 5.55**.

Tabel 5.55. Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung

No	Jenis Belanja Modal Bangunan Gedung	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	66.703.114.694,00	64.322.445.939,00	96,43
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.552.126.000,00	2.284.081.000,00	89,50
	Jumlah	69.255.240.694,00	66.606.526.939,00	96,18

b) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti

Realisasi Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Tahun 2022 sebesar Rp7.638.699.500,00 atau 83,82% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp9.112.882.864,00.

4) Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2022 sebesar Rp473.936.244.474,00 atau 95,96% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp493.891.367.029,00. Rincian Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dijelaskan pada **Tabel 5.56**.

Tabel 5.56. Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

No	Jenis Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	406.643.854.390,00	389.447.792.403,00	95,77
2	Belanja Modal Bangunan Air	81.607.950.918,00	78.934.273.071,00	96,72
3	Belanja Modal Instalasi	5.639.561.721,00	5.554.179.000,00	98,49
4	Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	493.891.367.029,00	473.936.244.474,00	95,96

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan dijelaskan sebagai berikut;

a) Belanja Modal Jalan dan Jembatan

Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan Tahun 2022 sebesar Rp389.447.792.403,00 atau 95,77% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp406.643.854.390,00. Rincian Belanja Modal Bangunan Gedung dijelaskan pada **Tabel 5.57**.

Tabel 5.57. Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan

No	Jenis Belanja Modal Jalan dan Jembatan	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%
1	Belanja Modal Jalan	387.528.702.492,00	373.697.414.659,00	96,43
2	Belanja Modal Jembatan	19.115.151.898,00	15.750.377.744,00	82,40
	Jumlah	406.643.854.390,00	389.447.792.403,00	95,77

b) Belanja Modal Bangunan Air

Realisasi Belanja Modal Bangunan Air Tahun 2022 sebesar Rp78.934.273.071,00 atau 96,72% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp81.607.950.918,00. Rincian Belanja Modal Bangunan Air dijelaskan pada **Tabel 5.58**.

Tabel 5.58. Realisasi Belanja Modal Bangunan Air

No	Jenis Belanja Modal Bangunan Air	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%
1	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	37.438.604.855,00	35.820.869.460,00	95,68
2	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai /Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	40.969.658.641,00	40.387.041.611,00	98,58
3	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Air Bersih/Air Baku	2.909.805.000,00	2.726.362.000,00	93,70
5	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	289.882.422,00	0,00	0,00
	Jumlah	81.607.950.918,00	78.934.273.071,00	96,72

c) Belanja Modal Instalasi

Realisasi Belanja Modal Instalasi Tahun 2022 sebesar Rp5.554.179.000,00 atau 98,49% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.639.561.721,00. Rincian Belanja Modal Instalasi dijelaskan pada **Tabel 5.59**.

Tabel 5.59. Realisasi Belanja Modal Instalasi

No	Jenis Belanja Modal Instalasi	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%
1	Belanja Modal Instalasi Air Bersih /Air Baku	5.557.061.721,00	5.471.679.000,00	98,46
2	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	82.500.000,00	82.500.000,00	100,00
	Jumlah	5.639.561.721,00	5.554.179.000,00	98,49

5) Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 sebesar Rp10.075.301.545,00 atau 50,49% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp19.955.806.500,00. Dalam Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terdapat Belanja Modal BOS sebesar Rp8.526.419.045,00 yang belanjanya tidak melalui rekening Kas Daerah. Rincian Belanja Aset Tetap Lainnya dijelaskan pada **Tabel 5.60**.

Tabel 5.60. Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya

No	Jenis Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%
1	Belanja Modal Perpustakaan	143.093.500,00	141.000.000,00	98,54
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	309.504.000,00	279.421.000,00	90,28
3	Belanja Modal Aset tak Berwujud	19.503.209.000,00	9.654.880.545,00	49,50
	Jumlah	19.955.806.500,00	10.075.301.545,00	50,49

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya dijelaskan sebagai berikut;

a) Belanja Modal Perpustakaan

Realisasi Belanja Modal Perpustakaan Tahun 2022 sebesar Rp141.000.000,00 atau 98,54% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp143.093.500,00, merupakan Belanja Modal yang berada di Dinas Perpustakaan Daerah.

b) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga

Realisasi Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga Tahun 2022 sebesar Rp279.421.000,00 atau 90,28% dari anggaran yang

ditetapkan sebesar Rp309.504.000,00. Rincian Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga dijelaskan pada **Tabel 5.61**.

Tabel 5.61. Realisasi Belanja Modal Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga

No	Jenis Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%
1	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	288.414.000,00	279.421.000,00	96,88
2	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	21.090.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	309.504.000,00	279.421.000,00	90,28

c) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

Realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Tahun 2022 sebesar Rp9.654.880.545,00 atau 49,50% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp19.503.209.000,00. Dalam Belanja Aset Tidak Berwujud terdapat realisasi Belanja BOS yang nilainya sebesar Rp8.526.419.045,00.

6) Belanja Aset Lainnya

Untuk Belanja Aset Lainnya pada Tahun 2022 tidak dianggarkan dalam APBD 2022, dan realisasinya pun juga Rp0,00.

c. Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2022 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.847.477.275,00.

5.1.3. Belanja Transfer

Anggaran Transfer Tahun 2022 sebesar Rp459.304.630.000,00 dengan realisasi sebesar Rp456.852.760.549,00 atau 99,47% dari anggaran yang ditetapkan. Rincian realisasi Transfer dijelaskan sebagai berikut.

a. Belanja Bagi Hasil

Realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun 2022 sebesar Rp5.145.314.200,00 atau 99,59% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.166.300.000,00. Belanja Bagi Hasil merupakan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2022 sebesar Rp451.707.446.349,00 atau 99,46% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp454.138.330.000,00. Belanja Bantuan Keuangan merupakan Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa. Dalam Realisasi Belanja Bantuan Keuangan terdapat Belanja yang tidak melalui Kas Daerah yaitu Belanja Dana Desa yang realisasinya sebesar Rp283.370.598.000,00.

Berdasarkan SE Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6966/SJ tanggal 30 Desember 2020 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana Desa oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bahwa berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menyajikan Pendapatan Dana Desa dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Surplus/(Defisit)

Pada Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Lahat mengalami surplus sebesar Rp81.893.755.951,01 atau (23,87%) dari anggaran defisit sebesar (Rp343.063.243.371,00). Jumlah tersebut merupakan selisih antara realisasi Pendapatan dengan relisasi Belanja Tahun 2022 (Rp2.380.578.642.455,22 – Rp2.298.684.886.504,21).

5.1.4. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksud untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Rincian Pembiayaan dijelaskan sebagai berikut:

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022	:	370.568.251.380,00
Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2022	:	(3.750.000.000,00)
Pembiayaan Neto Tahun 2022	:	<u>366.818.251.380,00</u>

a. Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022 sebesar Rp370.568.251.380,00 atau 106,85% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp346.813.243.371,00. Realisasi Penerimaan Pembiayaan merupakan Penerimaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah dikoreksi atas Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Keluaran Pasar Bawah Lahat sebesar Rp184.800.000,00 dan Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Perdagangan sebesar Rp40.000.000,00 dengan nilai total sebesar Rp224.800.000,00 yang telah direklas ke Bagian Lancar TGR sebesar Rp184.800.000,00 dan direklas ke Aset Lain-Lain Piutang TGR yang belum mempunyai SKTJM sebesar Rp40.000.000,00.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2022 Rp3.750.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.750.000.000,00. Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun 2022 merupakan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu Bank Sumsel Babel dan PDAM Tirta Lematang yang masing-masing sebesar Rp3.000.000.000,00 dan Rp750.000.000,00.

c. Pembiayaan Neto

Realisasi Pembiayaan Neto Tahun 2022 surplus sebesar Rp366.818.251.380,00 dengan anggaran surplus sebesar Rp343.063.243.371,00 atau terealisasi sebesar 106,92% dari anggaran. Jumlah tersebut merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) dengan Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah Rp370.568.251.380,00 – Rp3.750.000.000,00).

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Realisasi SiLPA Tahun 2022 sebesar Rp448.936.807.331,01. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan Surplus/Defisit dengan Pembiayaan Neto (Rp81.893.755.951,01 + Rp367.043.051.380,00).

5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL pada Tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL Tahun 2022 sebagai berikut.

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Awal merupakan akumulasi SiLPA/SiKPA tahun anggaran sebelumnya yaitu sebesar Rp370.793.051.380,00.

5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan merupakan SiLPA Tahun 2022 sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2021 setelah dikoreksi menjadi sebesar Rp370.568.251.380,00. Penerimaan dari SiLPA Tahun 2021 setelah dikoreksi atas Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Kelurahan Pasar Bawah Lahat sebesar Rp184.800.000,00 dan Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Perdagangan sebesar Rp40.000.000,00 dengan nilai total sebesar Rp224.800.000,00 yang telah direklas ke Bagian Lancar TGR sebesar Rp184.800.000,00 dan direklas ke Aset Lain-Lain Piutang TGR yang belum mempunyai SKTJM sebesar Rp40.000.000,00.

5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) sebesar Rp448.712.007.331,01.

5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan Tahun 2021 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp224.800.000,00.

5.2.5. Lain-Lain

Tidak terdapat Saldo Lain-Lain sampai dengan 31 Desember 2022.

5.2.6. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir pada Laporan Perubahan SAL sebesar Rp448.712.007.331,01

5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca

5.3.1. Aset

Saldo Aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.993.265.274.668,54 meningkat sebanyak 20,23% dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.321.467.092.388,36. Saldo per jenis Aset disajikan pada **Tabel 5.62**.

Tabel 5.62. Saldo Aset per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Aset Lancar	548.533.305.879,27	439.272.291.462,96
2	Investasi Jangka Panjang	79.326.041.049,02	75.190.675.276,55
3	Properti Investasi	33.535.263.255,85	34.349.324.935,85
3	Aset Tetap	2.883.408.786.034,73	2.690.003.878.279,32
4	Dana Cadangan	0,00	0,00
5	Aset Lainnya	448.461.878.449,67	82.650.922.433,68
	Jumlah	3.993.265.274.668,54	3.321.467.092.388,36

a. Aset Lancar

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp548.533.305.879,27 meningkat sebanyak 24,87% dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp439.272.291.462,96. Saldo per jenis Aset Lancar dijelaskan pada **Tabel 5.63**.

Tabel 5.63. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	434.929.425.920,40	346.777.770.158,36
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	349.786.613,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	38.261.000,00	8.826.000,00
4	Kas di Kas BLUD	13.078.275.248,83	22.584.751.103,84
5	Kas di Bendahara FKTP	305.512.576,78	562.868.338,80
6	Kas di Bendahara Sekolah Negeri-BOS Pusat/PSG	360.533.085,00	284.249.166,00
7	Kas Lainnya	309.348.404,61	152.081.225,00
8	Setara Kas	0,00	0,00
9	Piutang Pajak	21.686.728.635,76	20.076.227.357,76
10	Piutang Retribusi	4.023.126.295,00	3.373.636.055,00
11	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.414.811.209,85	1.253.243.989,00
12	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.550.553.921,34	9.348.611.221,40
13	Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	0,00	0,00
14	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	47.921.622.827,47	21.802.230.764,06
15	Piutang Lainnya	356.952.503,30	333.484.903,30
16	Penyisihan Piutang	(15.920.527.189,91)	(14.439.866.648,01)
17	Belanja Dibayar Dimuka	5.988.092.498,62	59.222.786,89
18	Persediaan	17.490.588.942,22	26.745.168.428,56
	Jumlah	548.533.305.879,27	439.272.291.462,96

1) Kas di Kas Daerah

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp434.929.425.920,40. Kas di Kas Daerah mengalami peningkatan sebesar 25,42% dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp346.777.770.158,36. Terdapat perbedaan antara Kas di Kas Daerah pada Neraca dengan Kas di Kas Daerah pada Rekening Koran per 31 Desember 2022 sebesar Rp22.470.000,00 (Rp434.951.895.920,40 - Rp434.929.425.920,40), selisih tersebut merupakan Saldo Kas BOSNAS yang salah setor ke Rekening Kas Daerah, yaitu Saldo Kas SMPN 1 Kikim Timur dan SDN 28 Lahat.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lahat nomor 900/259/KEP/BPKAD/2021, tanggal 17 Desember 2021 Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Bank

Sumsel Babel Cabang Lahat Untuk Melakukan Pekerjaan Pemegang Kas Daerah Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2022, Keputusan Bupati Lahat nomor 900/172/KEP/BPKAD/2022 tentang Pelimpahan wewenang kepada Bank Sumsel BaBel Cabang Lahat Untuk Melakukan Pekerjaan Penerimaan Pembayaran PBB-P2 dan BPHTB Melalui Fasilitas Online Tahun Anggaran 2022, dan Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor 900/258/KEP/BPKAD/2021, tanggal 17 Desember 2021 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Lahat Untuk Melakukan Pekerjaan Pemegang Kas Daerah Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2022, maka terhadap Rekening Giro:

- a) Nomor 142-300-0001 pada Bank Sumsel BaBel adalah rekening untuk penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b) Nomor 142-300-0010 pada Bank Sumsel BaBel adalah rekening untuk penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK);
- c) Nomor 142-300-0027 pada Bank Sumsel BaBel adalah rekening untuk penerimaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
- d) Nomor 142-300-0002 pada Bank Sumsel BaBel adalah rekening untuk penerimaan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- e) Nomor 0040-01-001333-30-7 pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah rekening untuk penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- f) Nomor 0040-01-001336-30-5 pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah rekening untuk penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- g) Nomor 0040-01-001335-30-9 pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah rekening untuk penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan – Perkotaan Pedesaan (PBB-P2). Untuk rincian Saldo Kas di Kas Daerah, dijelaskan pada **Tabel 5.64**.

Tabel 5.64. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	2022	2021
1	Saldo Kas Daerah di Bank Sumsel Babel Cabang Lahat Nomor Rekening 142-300-0001	376.784.603.255,40	252.080.321.860,36
2	Saldo Kas Daerah di Bank Sumsel Babel Cabang Lahat Nomor Rekening 142-300-0002	25.088,00	0,00
3	Rekening bersumber dari dana DAK di Bank Sumsel Babel Nomor Rekening 142-300-0010	26.422.462.820,00	24.930.354.434,00
4	Rekening bersumber dari dana DAK di Bank Sumsel Babel Nomor Rekening 142-300-0027	343.362,00	0,00
5	Rekening yang bersumber dari Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB) di Bank BRI 0040--01-001336-30-5	0,00	0,00
6	Rekening yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah di Bank BRI Nomor Rekening 0040--01-001333-30-7	31.721.323.731,00	69.767.093.864,00
7	Rekening yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perkotaan (PBB P2) di Bank BRI 0040--01-001335-30-9	667.664,00	0,00
	Jumlah	434.929.425.920,40	346.777.770.158,36

Sedangkan Saldo Kas di Kas Daerah berdasarkan Rekening Koran, pada **Tabel.5.65**.

Tabel 5.65 Saldo Kas di Kas Daerah Berdasarkan Rekening Koran per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Saldo Kas Daerah di Bank SumselBabel Cabang Lahat Nomor Rekening 142-300-0001	376.807.073.255,40	252.080.321.860,36
2	Saldo Kas Daerah di Bank SumselBabel Cabang Lahat Nomor Rekening 142-300-0002	25.088,00	0,00
3	Rekening bersumber dari dana DAK di Bank SumselBabel Nomor Rekening 142-300-0010	26.422.462.820,00	24.930.354.434,00
4	Rekening bersumber dari dana DAK di Bank SumselBabel Nomor Rekening 142-300-0027	343.362,00	0,00
5	Rekening yang bersumber dari Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB) di Bank BRI 0040--01-001336-30-5	0,00	0,00
6	Rekening yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah di Bank BRI Nomor Rekening 0040--01-001333-30-7	31.721.323.731,00	69.767.093.864,00
7	Rekening yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Bank BRI 0040--01-001335-30-9	667.664,00	0,00
	Jumlah	434.951.895.920,40	346.777.770.158,36

Terhadap jumlah tersebut terdapat:

- (1) Saldo Dana Alokasi Khusus per 31 Desember 2022 sebesar Rp14.566.248.488,00, pada Bank Sumsel Babel dengan nomor rekening 142-300-0010, penjelasan pada **Tabel 5.66**.

Tabel. 5.66. Saldo DAK Fisik dan DAK Non Fisik per 31 Desember 2022

NO	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2022 (Rp)
A	DAK FISIK	2.033.201.435,00
<i>I</i>	<i>DAK Reguler</i>	1.288.256.928,00
<i>II</i>	<i>DAK Penugasan</i>	686.778.957,00
<i>III</i>	<i>DAK Afirmasi</i>	58.165.550,00
B	DAK NON FISIK	12.533.047.053,00
	TOTAL	14.566.248.488,00

Sedangkan rincian Saldo DAK Fisik dan DAK Non Fisik dijelaskan pada **Lampiran 4**.

- (2) Saldo Dana Insentif Daerah (DID) Per 31 Desember 2022 sebesar Rp395.109.341,00 pada Bank Sumsel Babel dengan nomor rekening 142-300-0001 dengan rincian pada **Tabel 5.67**.

Tabel. 5.67. Saldo Dana Insentif Daerah per 31 Desember 2022

NO	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2022 (Rp)
1	Bidang Pendidikan – Digitalisasi	233.643.691,00
2	Bidang Kesehatan – Digitalisasi	-
3	Bidang Kesehatan - Sarana dan Prasarana	101.466.000,00
4	ENG Perlindungan Sosial	59.999.650,00
	Jumlah	395.109.341,00

Sedangkan rincian Saldo DID dijelaskan pada **Lampiran 5**.

2) Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00, pada Tahun 2021 Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar

Rp349.786.613,00 telah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. Rincian penyetoran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2021 pada dua Organisasi Perangkat Daerah dijelaskan pada **Tabel 5.68**.

Tabel 5.68. Daftar Penyetoran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021

No	SKPD	Saldo 2021 (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	12.664.000,00	Telah disetor ke Rekening Kas Daerah pada tanggal 10 Januari 2022
2	Inspektorat	337.122.613,00	Telah disetor ke Rekening Kas Daerah pada tanggal 10 Januari 2022
	Jumlah	349.786.613,00	

Dari tanggal 10 Januari 2021 sudah dilakukan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atas saldo kas di Bendahara Dinas Pendidikan dan Inspektorat dengan jumlah total yang sudah disetor sebesar Rp349.786.613,00.

3) Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp38.261.000,00. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan tersebut merupakan pendapatan retribusi sewa kendaraan dinas dan pendapatan retribusi pelayanan kesehatan TA. 2022 yang sampai dengan 31 Desember 2022 masih di kas tunai Bendahara Penerimaan dan belum disetor ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Lahat. Rincian Saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 dijelaskan pada **Tabel 5.69**.

Tabel 5.69. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022

No	SKPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	BAPENDA	4.680.000,00	Sudah disetor tanggal 19 Januari 2023
2	Kecamatan Kikim Selatan	480.000,00	Sudah disetor tanggal 5 Januari 2023
3	Dinas Kesehatan (Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan pada FKTP)	31.400.000,00	Sudah Disetor pada bulan Februari 2023
4	Dinas Perdagangan	1.701.000,00	Sudah Disetor sebesar Rp36.000,00 tanggal 27 Februari 2023 dan sebesar Rp1.655.000 tanggal 28 Februari 2023
	Jumlah	38.261.000,00	

Untuk rincian Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Kesehatan yang merupakan saldo kas tunai atas Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan Non Medis pada FKTP yang sampai dengan 31 Desember 2022 belum disetor ke Rekening Kas Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

4) Kas di Kas BLUD

Saldo Kas di BLUD adalah sisa kas yang terdapat pada RSUD Kabupaten Lahat sebagai BLUD. Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp13.078.275.248,83. Saldo Kas di BLUD Tahun 2021 adalah sebesar Rp22.584.751.103,84, dibandingkan Tahun 2021 Saldo Kas di BLUD pada Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp9.506.475.855,00 atau sebesar 42,09% dari Tahun 2021. Saldo Kas di BLUD Tahun 2022 tersebut terdiri dari:

- a) Saldo Kas di Bank Sumsel Babel Cabang Lahat dengan Nomor Rekening 142-301-1121 sebesar Rp13.071.547.148,83;
- b) Kas di Bendahara Penerimaan BLUD sebesar Rp6.728.100,00.

5) Kas di Bendahara FKTP

Kas di Bendahara FKTP adalah sisa kas yang berasal dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp305.512.576,78, sedangkan pada Tahun 2021 jumlah saldo kas di Bendahara FKTP sebesar Rp562.868.338,80 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp257.355.762,02 atau sebesar 45,72%. Saldo Kas di Bendahara FKTP Tahun 2022 terdiri dari:

- a) Saldo Kas Dana Kapitasi sebesar Rp296.637.403,78; dan
- b) Saldo Kas Non Kapitasi sebesar Rp8.875.173,00.

Rincian saldo Kas di Bendahara FKTP dijelaskan pada **Lampiran 2**.

6) Kas di Bendahara Sekolah Negeri-BOS Pusat/PSG

Kas di Bendahara Sekolah Negeri-BOS/PSG Pusat adalah Kas Dana BOS yang terdapat di Bendahara SD dan SMP Negeri Tahun 2022 yang berasal dari dana BOS Pusat (APBN). Saldo Kas BOS di Bendahara SD dan SMP per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp360.533.085,00, sedangkan saldo awal BOS SD dan SMP Tahun 2021 sebesar Rp284.249.166,00. Untuk pendapatan Dana BOS SD dan SMP Tahun 2022 sebesar Rp50.575.586.116,00, dan untuk realisasi belanjanya mencapai Rp50.499.302.197,00. Jika dibandingkan saldo Dana BOS SD dan SMP Tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp76.283.919,00 atau 26,74% dari Tahun 2021. Rincian perhitungan Kas di Bendahara Sekolah Negeri – BOS Pusat/PSG dijelaskan pada **Tabel 5.70**.

Tabel 5.70. Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2022

No	Uraian	BOS SD Negeri (Rp)	BOS SMP Negeri (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Saldo per 31 Desember 2021	120.850.267,00	163.398.899,00	284.249.166,00
2	Koreksi Saldo Awal	0,00	0,00-	0,00
3	Saldo Awal Setelah Koreksi (1 – 2)	120.850.267,00	163.398.899,00	284.249.166,00
4	Pendapatan Tahun 2022	32.947.433.640,00	17.628.152.476,00	50.575.586.116,00
5	Belanja Tahun 2022	32.875.761.548,00	17.623.540.649,00	50.499.302.197,00
6	Saldo Akhir 31 Desember 2022 (3 + 4 - 5)	192.522.359,00	168.010.726,00	360.533.085,00

Saldo akhir kas di Bendahara Sekolah Negeri-BOS/PSG pada SD Negeri per 31 Desember 2022 sebesar Rp360.533.085,00 dengan rincian pada **Tabel 5.71** dan **Tabel 5.72**.

Tabel 5.71 Saldo Kas BOS SD Negeri pada Bendahara Bosnas Per 31 Desember 2022

No	Nama Sekolah	Jumlah Saldo Kas BOS 2022 (Rp)
1	SDN 3 Lahat	833,00
2	SDN 4 Lahat	569,00
3	SDN 5 Lahat	975,00
4	SDN 6 Lahat	145.440,00
5	SDN 9 Lahat	88.101,00
6	SDN 13 Lahat	19.580.000,00
7	SDN 17 Lahat	5.191.000,00
8	SDN 27 Lahat	6.000.000,00
9	SDN 28 Lahat	6.319.718,00
10	SDN 30 Lahat	3.100.000,00

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun 2022

No	Nama Sekolah	Jumlah Saldo Kas BOS 2022 (Rp)
11	SDN 1 Lahat Selatan	2.040.037,00
12	SDN 3 Lahat Selatan	220.000,00
13	SDN 4 Lahat Selatan	933,00
14	SDN 8 Lahat Selatan	100.000,00
15	SDN 1 Gumay Talang	929,00
16	SDN 2 Gumay Talang	6.032.000,00
17	SDN 3 Gumay Talang	340.000,00
18	SDN 4 Gumay Talang	30.000,00
19	SDN 5 Gumay Talang	844.862,00
20	SDN 6 Gumay Talang	6.309.500,00
21	SDN 1 Pseksu	192.236,00
22	SDN 7 Pseksu	99.719,00
23	SDN 3 Gumay Ulu	632.250,00
24	SDN 6 Gumay Ulu	6.064.040,00
25	SDN 1 Jarai	84.500,00
26	SDN 3 Jarai	10.289,00
27	SDN 4 Jarai	1.831.246,00
28	SDN 5 Jarai	40.000,00
29	SDN 8 Jarai	1.040.000,00
30	SDN 9 Jarai	5.307.188,00
31	SDN 1 Kikim Barat	1.125.500,00
32	SDN 2 Kikim Barat	136.642,00
33	SDN 4 Kikim Barat	159.542,00
34	SDN 5 Kikim Barat	960.000,00
35	SDN 7 Kikim Barat	801,00
36	SDN 8 Kikim Barat	987,00
37	SDN 9 Kikim Barat	10.000,00
38	SDN 12 Kikim Barat	2.602.500,00
39	SDN 13 Kikim Barat	17.050,00
40	SDN 16 Kikim Barat	570.000,00
41	SDN 1 Kikim Selatan	128.288,00
42	SDN 2 Kikim Selatan	2.775.070,00
43	SDN 5 Kikim Selatan	24.500.872,00
44	SDN 7 Kikim Selatan	4.160.000,00
45	SDN 9 Kikim Selatan	18.771,00
46	SDN 11 Kikim Selatan	166.510,00
47	SDN 13 Kikim Selatan	2.158,00
48	SDN 1 Kikim Tengah	3.652.200,00
49	SDN 2 Kikim Tengah	2.078.000,00
50	SDN 3 Kikim Tengah	115.000,00
51	SDN 4 Kikim Tengah	310.000,00
52	SDN 3 Kikim Timur	53.989,00
53	SDN 9 Kikim Timur	96.524,00
54	SDN 10 Kikim Timur	199.236,00
55	SDN 13 Kikim Timur	146.024,00
56	SDN 14 Kikim Timur	4.342,00
57	SDN 15 Kikim Timur	685,00
58	SDN 16 Kikim Timur	704.451,00
59	SDN 17 Kikim Timur	436.484,00
60	SDN 18 Kikim Timur	191.657,00
61	SDN 19 Kikim Timur	20.797,00
62	SDN 20 Kikim Timur	538.412,00
63	SDN 21 Kikim Timur	47.163,00
64	SDN 22 Kikim Timur	29.779,00

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun 2022

No	Nama Sekolah	Jumlah Saldo Kas BOS 2022 (Rp)
65	SDN 24 Kikim Timur	52.203,00
66	SDN 1 Kota Agung	80.000,00
67	SDN 2 Kota Agung	1.334.350,00
68	SDN 5 Kota Agung	8.000.000,00
69	SDN 6 Kota Agung	235.880,00
70	SDN 9 Kota Agung	8.180,00
71	SDN 12 Kota Agung	2.991,00
72	SDN 1 Merapi Barat	1.097.000,00
73	SDN 2 Merapi Barat	51.177,00
74	SDN 3 Merapi Barat	80.000,00
75	SDN 4 Merapi Barat	73.700,00
76	SDN 5 Merapi Barat	606.553,00
77	SDN 6 Merapi Barat	170.000,00
78	SDN 7 Merapi Barat	1.759.000,00
79	SDN 10 Merapi Barat	243.500,00
80	SDN 11 Merapi Barat	293.150,00
81	SDN 1 Merapi Timur	35.263,00
82	SDN 2 Merapi Timur	1.760.000,00
83	SDN 7 Merapi Timur	3.186.016,00
84	SDN 1 Merapi Selatan	6.641.252,00
85	SDN 2 Merapi Selatan	1.457.779,00
86	SDN 3 Merapi Selatan	400.000,00
87	SDN 4 Merapi Selatan	109.264,00
88	SDN 5 Merapi Selatan	179.671,00
89	SDN 1 Muara Payang	1.140.000,00
90	SDN 2 Muara Payang	914.047,00
91	SDN 3 Muara Payang	82.000,00
92	SDN 4 Muara Payang	88.000,00
93	SDN 5 Muara Payang	1.900.510,00
94	SDN 6 Muara Payang	135.000,00
95	SDN 7 Muara Payang	725,00
96	SDN 1 Mulak Ulu	49.000,00
97	SDN 1 Mulak Sebingkai	800.000,00
98	SDN 2 Mulak Sebingkai	277.588,00
99	SDN 3 Mulak Sebingkai	1.188.474,00
100	SDN 5 Mulak Sebingkai	255.197,00
101	SDN 1 Pagar Gunung	200.000,00
102	SDN 4 Pagar Gunung	400.000,00
103	SDN 5 Pagar Gunung	160.000,00
104	SDN 7 Pagar Gunung	90.654,00
105	SDN 12 Pagar Gunung	1.652,00
106	SDN 15 Pagar Gunung	3.815.000,00
107	SDN 1 Pajar Bulan	321.607,00
108	SDN 2 Pajar Bulan	3.398.490,00
109	SDN 3 Pajar Bulan	20.000,00
110	SDN 4 Pajar Bulan	79.482,00
111	SDN 7 Pajar Bulan	23.867,00
112	SDN 8 Pajar Bulan	455.035,00
113	SDN 9 Pajar Bulan	817.802,00
114	SDN 13 Pajar Bulan	49.607,00
115	SDN 1 Suka Merindu	3.723.186,00
116	SDN 3 Suka Merindu	70.143,00
117	SDN 4 Suka Merindu	60.000,00
118	SDN 5 Suka Merindu	20.000,00

No	Nama Sekolah	Jumlah Saldo Kas BOS 2022 (Rp)
119	SDN 1 Pulau Pinang	870,00
120	SDN 2 Pulau Pinang	224.158,00
121	SDN 4 Pulau Pinang	28.679,00
122	SDN 7 Pulau Pinang	495.601,00
123	SDN 8 Pulau Pinang	60.276,00
124	SDN 9 Pulau Pinang	93.999,00
125	SDN 9 Tanjung Sakti Pumi	1.815.000,00
126	SDN 1 Tanjung Sakti Pumu	4.479.387,00
127	SDN 4 Tanjung Sakti Pumu	1.327.448,00
128	SDN 5 Tanjung Sakti Pumu	5.632.632,00
129	SDN 11 Tanjung Sakti Pumu	80.000,00
130	SDN 1 Tanjung Tebat	462.442,00
131	SDN 2 Tanjung Tebat	120.000,00
132	SDN 3 Tanjung Tebat	4.860.000,00
133	SDN 4 Tanjung Tebat	43,00
134	SDN 8 Tanjung Tebat	6.333.010,00
135	SDN 11 Tanjung Tebat	509.020,00
	JUMLAH	192.522.359,00

Saldo akhir kas di Bendahara Sekolah Negeri-BOS/PSG pada SMP Negeri per 31 Desember 2022 sebesar Rp168.010.726,00,00 dengan rincian pada **Tabel 5.72.**

Tabel 5.72. Saldo Kas di Bendahara Sekolah Negeri-BOS/PSG pada SMP Negeri per 31 Desember 2022

No	Nama Sekolah	Jumlah Saldo Kas BOS 2022 (Rp)
1	SMPN 3 Lahat	14.797.000,00
2	SMPN 6 Lahat	142.383,00
3	SMPN 7 Lahat	89.612,00
4	SMP N 1 Gumay Talang	744.366,00
5	SMP N 1 Pseksu	131.310,00
6	SMP N 2 Pseksu	180.000,00
7	SMP N 3 Pseksu	5.000,00
8	SMP N 1 Merapi Barat	1.836.000,00
9	SMP N 1 Merapi Selatan	51.110.675,00
10	SMPN 1 Merapi Timur	9.460.000,00
11	SMP N 1 Pulau Pinang	9.305.765,00
12	SMP N 2 Pagar Gunung	5.269.218,00
13	SMP N 2 Tanjung Tebat	800.000,00
14	SMP N 2 Mulak Ulu	250.000,00
15	SMP N 2 Mulak Sebingkai	1.662.786,00
16	SMP N 1 Tanjung Sakti Pumi	5.047,00
17	SMP N 1 Tanjung Sakti Pumu	35.230.000,00
18	SMP N 2 Tanjung sakti Pumu	71.001,00
19	SMP N 1 Jarai	9.204.189,00
20	SMP N 1 Muara Payang	252.736,00
21	SMP N 1 Pajar Bulan	3.840.895,00
22	SMP N 1 Suka Merindu	365.777,00
23	SMP N 1 Kikim Timur	16.170.000,00
24	SMP N 4 Kikim Timur	1.560,00
25	SMP N 6 Kikim Timur	36.318,00
26	SMP N 1 Kikim Tengah	1.485.083,00
27	SMP N 1 Kikim Selatan	4.462.000,00

No	Nama Sekolah	Jumlah Saldo Kas BOS 2022 (Rp)
28	SMP N 2 Kikim Selatan	180.000,00
29	SMP N 2 Kikim Barat	12.005,00
30	SMP N 3 Kikim Barat	910.000,00
	JUMLAH	168.010.726,00

7) Kas Lainnya

Kas Lainnya Per 31 Desember 2022 sebesar Rp309.348.404,61 yang terdiri dari:

- a) Saldo Kas Pajak Pusat Dana BOSNAS per 31 Desember 2022 pada Sekolah Negeri/PSG sebesar Rp66.050.399,60 merupakan sisa saldo utang pajak Dana BOSNAS Tahun 2022, rincian saldo pajak pusat dapat dilihat pada **Lampiran 7**;
- b) Saldo Kas Pajak Pusat Dana BOSDA pada Sekolah Negeri/PSG sebesar Rp13.193.381,01 merupakan saldo pajak Tahun 2021 yang per tanggal 31 Desember 2022 belum dibayar, rincian saldo pajak pusat dapat dilihat pada **Lampiran 8**;
- c) Saldo Kas Pajak pada FKTP sebesar Rp359.201,00, merupakan saldo pajak pusat Tahun 2022 yang per tanggal 31 Desember 2022 belum dibayar, rincian saldo pusat dapat dilihat pada **Lampiran 9**;
- d) Saldo Kas pada Bendahara BOS Daerah SD dan SMP Kabupaten Lahat sebesar Rp14.225.677,00. Rincian Saldo Kas BOS Daerah per 31 Desember 2022 terdapat pada **Lampiran 10 dan 11**;
- e) Saldo Kas pada Bendahara Penerima Hibah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada rekening koran Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 004-00101149-3-537 sebesar Rp1.001.834,00, merupakan saldo sumbangan dari Pihak Ketiga berupa bantuan uang untuk korban bencana kebakaran di Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Lahat;
- f) Saldo Kas pada Bendahara Penerima Hibah pada Dinas Sosial sebesar Rp58.607.912,00 pada rekening koran Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 004-00100140-4-302 sebesar Rp10.999.412,00 dan Kas Tunai sebesar Rp47.608.500,00 yang telah disetor ke Rekening Dinas Sosial pada tanggal 03 Maret 2023. Saldo Dana tersebut merupakan saldo dana bantuan yang bersumber dari masyarakat untuk bantuan bencana alam; dan
- g) Saldo Kas pada Rekening PPTK Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan sebesar Rp155.910.000,00 yang merupakan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari PT. Mustika Indah Permai (MIP) dengan nomor rekening 142-090-15422.

8) Setara Kas

Saldo Setara Kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

9) Piutang Pajak

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2022 sebesar Rp21.686.728.635,76 sedangkan pada Tahun 2021 jumlah Piutang Pajak sebesar Rp20.076.227.357,76 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp1.610.501.278,00 atau sebesar 8,02%. Rincian Piutang Pajak Tahun 2022 dijelaskan pada **Tabel 5.73**.

Tabel 5.73. Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2022

No	Jenis Pajak	Saldo 31/12/2021 (Rp)	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Saldo 31/12/2022 (Rp)
1	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.211.422.934,00	0,00	0,00	2.211.422.934,00
2	Pajak Hotel	339.403.781,38	29.661.316,00	281.498.765,00	87.566.332,38
3	Pajak Hiburan	4.000.000,00	23.981.436,00	0,00	27.981.436,00
4	Pajak Reklame	0,00	21.241.512,00	0,00	21.241.512,00
5	Pajak Restoran	123.542.753,38	192.494.539,00	105.872.737,00	210.164.555,38
6	Pajak Parkir	66.097.500,00	15.600.000,00	0,00	81.697.500,00
7	Pajak PBB-P2	15.789.018.663,00	1.946.856.086,00	464.459.301,00	17.271.415.448,00
8	Pajak Penerangan Jalan Umum	1.542.739.826,00	1.775.238.918,00	1.542.739.826,00	1.775.238.918,00
9	Pajak BPHTB	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
	Jumlah	20.076.227.357,76	4.005.073.807,00	2.394.572.529,00	21.686.728.635,76

Rincian Saldo Piutang Pajak dijelaskan pada **Lampiran 13**.

10) Piutang Retribusi

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.023.126.295,00, sedangkan pada Tahun 2021 jumlah piutang retribusi sebesar Rp3.373.636.055,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp649.490.240,00 atau sebesar 19,25%. Piutang Retribusi terdiri dari:

- a) Piutang Retribusi Sewa Kendaraan Dinas sebesar Rp1.084.209.295,00 pada **Lampiran 14**;
- b) Piutang Retribusi Sewa Kios Pasar Lematang sebesar Rp2.327.500.000,00 pada **Lampiran 15**;
- c) Piutang Retribusi Sewa Teras Bukit Asam Tepian Sungai Lematang sebesar Rp404.122.000,00, rincian pada **Lampiran 16**;
- d) Piutang Retribusi Sewa ATM BRI per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.000.000,00, berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Lokasi ATM nomor 2780/KW-IV/LYI/12/2022 dan nomor 900/492/BPKAD/2022;
- e) Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp30.175.000,00 sedangkan pada Tahun 2021 sebesar Rp446.991.010,00 yang merupakan tagihan kepada perusahaan yang menjalin kerjasama dengan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebesar Rp247.400.000,00 dan selisih belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp199.591.010,00. Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada **Lampiran 17**;
- f) Piutang Retribusi Pemakaian Laboratorium per 31 Desember 2022 sebesar Rp154.820.000,00 merupakan piutang atas Pelayanan Jasa Laboratorium pada Dinas Lingkungan Hidup. Rincian Piutang Retribusi Pemakaian Laboratorium pada **Lampiran 18**; dan
- g) Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesenggrahan/Villa pada Dinas Pariwisata sebesar Rp16.300.000,00 yang merupakan pendapatan bulan Desember 2022 yang baru disetor di bulan Januari 2023.

11) Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.414.811.209,85, sedangkan pada Tahun 2021 jumlah Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp1.253.243.989,00 sehingga terjadi peningkatan sebesar Rp4.161.567.220,85 atau sebesar 332,06%. Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2022 terdiri dari:

a) Piutang BLUD

Saldo Piutang BLUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.615.312.230,00 sedangkan pada Tahun 2021 jumlah Piutang BLUD sebesar Rp557.661.917,00, sehingga terjadi penurunan sebesar Rp4.057.650.313,00. Rincian saldo Piutang BLUD dijelaskan pada **Tabel 5.74**.

Tabel 5.74. Saldo Piutang BLUD per 31 Desember 2022

No	Jenis Piutang BLUD	Saldo 31/12/2021 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo 31/12/2022 (Rp)
1	Askes Sosial BPJS	0,00	42.633.378.600,00	38.248.407.500,00	4.384.971.100,00
2	Askes Sosial Inhealt	0,00	27.360.771,00	27.360.771,00	0,00
3	Ambulance BPJS	41.673.800,00	593.465.400,00	635.139.200,00	0,00
4	Obat Kronis BPJS	0,00	1.904.332.778,00	1.680.547.615,00	223.785.163,00
5	Covid	486.091.300,00	1.636.657.000,00	2.122.748.300,00	0,00
6	Jasa Raharja	0,00	323.761.880,00	323.761.880,00	0,00
7	PLN	5.946.817,00	47.341.386,00	46.834.096,00	6.454.107,00
8	KAI	0,00	22.857.782,00	22.755.922,00	101.860,00
9	Diklat	23.950.000,00	130.740.000,00	154.690.000,00	0,00
	Jumlah	557.661.917,00	47.319.895.597,00	43.262.245.284,00	4.615.312.230,00

Rincian Piutang BLUD dijelaskan pada **Lampiran 19**.

b) Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

Saldo Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp695.582.072,00. Jumlah tersebut merupakan piutang/tagihan yang timbul dari perjanjian Kemitraan Pola Kerja Sama Operasional (KSO) Tahun 2005 s.d. Tahun 2015 pada Dinas Pertanian. Berdasarkan perjanjian kerja sama, kelompok tani berkewajiban menyetorkan hasil usaha minimal Rp2.500.000,00 selama delapan kali musim tanam atau selama empat Tahun (satu Tahun dua kali musim tanam). Apabila kelompok tani dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu sesuai kesepakatan, *handtractor* menjadi milik kelompok.

Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah pada Dinas Pertanian semula penyajiannya digabung dalam Aset Lainnya-Kemitraan Pihak Ketiga. Agar piutang disajikan dengan Penyisihan Piutang (*Net Realizable Value*), maka tagihan atas kemitraan ditempatkan pada kelompok piutang. Sementara aset kemitraan *handtractor* dan akumulasi penyusutannya masih disajikan sebagai aset kemitraan. Saldo Piutang Kemitraan dijelaskan pada **Tabel 5.75**.

Tabel 5.75. Saldo Piutang Kemitraan per 31 Desember 2022

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Tagihan yang timbul dari perjanjian kerja sama Tahun 2005, 2006, 2007, 2008	41 Klpk @ Rp20.000.000,00 820.000.000,00
2	Pembayaran oleh petani 2005–2019	41 Klpk (124.417.928,00)
	Jumlah Piutang dari Angsuran	695.582.072,00

Atas tagihan tersebut, Dinas Pertanian telah berupaya melakukan penagihan. Namun, sebagian kelompok tani sudah tidak mampu lagi untuk membayar angsuran serta kondisi *handtractor* rusak berat sebagaimana tertuang dalam berita acara yang dibuat oleh kelompok tani. Rincian Saldo Piutang Kemitraan dijelaskan pada **Lampiran 20**.

c) Piutang Remunerasi

Piutang Remunerasi Per 31 Desember 2022 sebesar Rp103.916.907,85, merupakan piutang bunga bank atas penyaluran dana Bagi Hasil Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat yang disimpan di Rekening Lain Bank Indonesia dalam bentuk *Treasury Deposit Facility (TDF)*.

12) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.550.553.921,34. Besaran Piutang tersebut merupakan pembayaran dividen atas penyertaan modal saham pada Bank Sumsel Babel, dengan %tase kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Lahat sebesar 3,90%. Pelunasan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan telah dibayar pada tanggal 17 Maret 2023. Rincian penghitungan pelunasan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan Tahun 2021 pada **Tabel 5.76**.

Tabel 5.76. Pelunasan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan per 31 Desember 2022

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saham	44.791.000.000,00
2	Agio Saham	19.046.662.000,00
3	Sisa Setoran Saham	481.757,56
4	Total (a+b+c)	63.838.143.757,56
5	Lembar Saham yang Dimiliki	44.791,00
6	Dividen 2021 yang Diterima di 2022	12.550.553.921,34

13) Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

14) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp47.921.622.827,47. Untuk Tahun 2021 saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah sebesar Rp21.802.230.764,06, sehingga untuk saldo piutang Tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding Tahun 2021 sebesar Rp26.119.392.063,41 atau 119,80%. Jumlah tersebut merupakan Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, terdiri dari:

- a) Piutang *sharing* Jamsoskes sebesar Rp10.460.781.611,47. Sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Rekonsiliasi antara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat pada tanggal 15 Februari 2019 Piutang Jamsos adalah sebesar Rp14.943.973.730,67, pada tanggal 28 Desember 2021 terdapat pelunasan piutang oleh Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp4.483.192.119,20 yang ditransfer ke rekening Kas Daerah Kabupaten Lahat;
- b) Piutang DBH Tahun 2022 sebesar Rp29.069375.448,00. Nilai tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 181/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 16 Februari 2023 tentang Penetapan Alokasi Definitif, Realisasi dan Utang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;
- c) Piutang Pajak Rokok sebesar Tahun 2022 sebesar Rp4.460.036.768,00. Nilai tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, Nomor 953/KPTS/BPKAD/2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV Bulan Oktober 2022 Sampai Dengan Bulan November 2022 Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022; dan
- d) Piutang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebesar Rp3.931.429.000,00. Nilai tersebut sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 346/KPTS/BPKAD/2023 tentang Dana Kurang Salur Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2022 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023.

Rincian saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dijelaskan pada **Tabel 5.77**.

Tabel 5.77. Saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

No	Jenis Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	Saldo 31/12/2021 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo 31/12/2022 (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.833.727.061,00	3.824.403.887,00	1.833.727.061,00	3.824.403.887,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	1.531.293.025,00	3.069.596.843,00	1.531.293.025,00	3.069.596.843,00
3	Pajak Kendaraan di Atas Air (PKAA) dan BBN- Kendaraan di Atas Air	6.422,00		6.422,00	0,00
4	Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor (PBB-KB) Pertamina	4.799.791.257,00	22.098.993.860,00	4.799.791.257,00	22.098.993.860,00
5	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABT dan AP)	30.196.537,00	76.380.858,00	30.196.537,00	76.380.858,00
6	Pajak Rokok	941.444.450,59	4.460.036.768,00	941.444.450,59	4.460.036.768,00
7	Transfer Bantuan Keuangan (Dana <i>sharing</i> Jamsoskes)	10.460.781.611,47			10.460.781.611,47
8	Transfer Bantuan Keuangan dari Gubernur yang Bersifat Khusus	2.204.990.400,00	3.931.429.000,00	2.204.990.400,00	3.931.429.000,00
	Jumlah	21.802.230.764,06	37.460.841.216,00	11.341.449.152,59	47.921.622.827,47

Rincian Piutang Transfer dijelaskan pada **Lampiran 21**.

15) Piutang Lainnya

Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp356.952.503,30 merupakan Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp283.661.203,30, Piutang Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp18.729.200,00 dan Piutang Kelebihan Transfer sebesar Rp54.562.100,00 dengan rincian sebagai berikut:

a) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp283.661.203,30. Jumlah tersebut merupakan saldo neto, yang berasal dari saldo bruto sebesar Rp446.947.692,67 dikurangi penyisihan sebesar (Rp163.286.489,37). Sedangkan untuk saldo bagian lancar tuntutan ganti rugi Tahun 2021 sebesar Rp280.930.703,30, sehingga untuk saldo bagian lancar tuntutan ganti rugi Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp2.730.499,99 atau 0,97% dibanding Tahun 2021. Bagian Lancar TGR merupakan TGR yang sudah didukung dengan SKTJM/SK Pembebanan yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan dari tanggal Neraca, sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 20 yang diadopsi menjadi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lahat. Untuk itu, pada Tahun 2016 dilakukan reklasifikasi kerugian daerah ke Aset Lain-Lain untuk kerugian daerah yang belum ada SKTJM atau SK pembebanan. Rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dijelaskan pada **Tabel 5.78**.

Tabel 5.78. Rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022

No	Jenis Bagian Lancar TGR	Saldo 31/12/2021 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo 31/12/2022 (Rp)
1	Piutang atas tuntutan ganti kerugian daerah atas Bendahara dan Pegawai Bukan Bendahara	444.306.692,67	30.000.000,00	27.359.000,00	446.947.692,67
	- TGR 2022		30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
	- Reklasifikasi dari TGR Non lancar (<12 bulan)			5.000.000,00	(5.000.000,00)
	- Pelunasan Bagian Lancar TGR			22.359.000	(22.359.000,00)
	- Koreksi Saldo Awal TGR		0,00	0,00	0,00
	- Kurang catat pelunasan TGR			0,00	0,00
2	Penyisihan Piutang Bagian Lancar TGR				(163.286.489,37)
	Piutang Bagian Lancar TGR – Neto (1 – 2)				283.661.203,30

Rincian atas nilai bruto Bagian Lancar TGR dijelaskan pada **Lampiran 22**.

Perhitungan Penyisihan Piutang Bagian Lancar TGR sebagai berikut:

Saldo Penyisihan Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2021	:	(Rp163.375.989,37)
Pengurangan Tahun 2022	:	Rp89.500,00
Saldo Penyisihan Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2022	:	(Rp 163.286.489,37)

Rincian atas perhitungan Penyisihan Piutang Bagian Lancar TGR dijelaskan pada **Lampiran 23**.

b) Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Piutang Penjualan Angsuran per 31 Desember 2022 sebesar Rp18.729.200,00 merupakan penjualan lelang atas kendaraan roda 4 (empat) Nissan/X Trail 2,5 XT AT yang sampai dengan 31 Desember 2022 belum lunas. Selama Tahun 2022 terdapat mutasi atas saldo tagihan piutang penjualan angsuran. Rincian perhitungan dapat dijelaskan pada **Tabel 5.79**.

Tabel 5.79. Saldo Tagihan Piutang Penjualan Angsuran per 31 Desember 2022

No	Aset Tetap	Saldo 31/12/2021 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo 31/12/2022 (Rp)
1	Nissan/X Trail 2.5 XT AT	18.729.200,00	0,00	0,00	18.729.200,00
2	Jeep "Ford"	33.825.000,00	0,00	33.825.000,00	0,00
	Jumlah	52.554.200,00	0,00	33.825.000,00	18.729.200,00

Lelang atas 2 kendaraan tersebut di atas telah dilakukan sejak Tahun 2014. Untuk kendaraan roda 4 (empat) merk/jenis Ford Escape XLT 3 A.L BG 1963 EZ senilai Rp33.825.000,00 direklas ke Aset Lain-Lain berdasarkan surat Keputusan Bupati Lahat nomor 032/70/KEP/BPKAD/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Lahat Nomor 979/177/KEP/DPPKAD/2016 Tentang Penjualan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat) dan Roda 2 (Dua) Milik Pemerintah Kabupaten Lahat, dilakukan pembatalan penjualan Kendaraan Roda 4 (empat) merk/jenis Ford Escape XLT 3 A.L BG 1963 EZ dikarenakan pembeli kendaraan tersebut tidak sanggup untuk melunasi piutang lelang dimaksud. Sedangkan kendaraan roda 4 (empat) merk/jenis Nissan/X Trail 2.5 XT AT dilelang sebesar Rp53.729.200,00, terdapat pelunasan pada Tahun 2018 sebesar Rp35.000.000,00 sehingga per 31 Desember 2022 piutang atas penjualan Nissan/X Trail 2,5 XT AT sebesar Rp18.729.200,00. Terkait dengan rincian atas harga perolehan dan harga jual kendaraan dinas dijelaskan pada **Tabel 5.80**.

Tabel 5.80. Kendaraan Dinas Dijual per 31 Desember 2022

No	Uraian	Harga Perolehan (Rp)	Harga Jual Lelang (Rp)	Pelunasan/Penghapusan Aset	
				Angsuran (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	Nissan/X Trail 2.5 XT AT	245.776.300,00	53.729.200,00	35.000.000,00	18.729.200,00
	Jumlah	245.776.300,00	53.729.200,00	35.000.000,00	18.729.200,00

c) Piutang Kelebihan Transfer

Piutang Kelebihan Transfer per 31 Desember 2022 sebesar Rp54.562.100,00 yang terdiri dari:

1. Piutang kelebihan pembayaran belanja modal sebesar Rp25.058.500,00 dengan SP2D nomor 11.04/04.0/1s/1.02.0.00.02.0000/p.05/12/2022 pada tanggal 28 Desember 2022 untuk Program Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Akun Belanja Alat Kedokteran Lainnya pada Dinas Kesehatan. Atas kelebihan pembayaran tersebut sudah disetor kembali ke Rekening Kas Daerah oleh PT. Sinergi Persada Medi sebesar Rp25.058.500,00, tanggal 18 Januari 2023.
2. Piutang kelebihan pembayaran BPJS sebesar Rp29.503.600,00 sesuai dengan Berita Acara Verifikasi Jumlah Data Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pegawai (BP) kelas III yang Mendaftarkan Diri Secara Mandiri antara BPJS Kesehatan Cabang Lubuk

Linggau dengan Pemerintah Kabupaten Lahat VA Nomor 898667000060086 Tahun 2022 Nomor: 05/BA/III-04/0123, dimana pembayarannya akan diperhitungkan pada tagihan Tahun 2023.

16) Penyisihan Piutang

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp15.920.527.189,91. Sedangkan saldo penyisihan piutang untuk Tahun 2021 sebesar Rp14.439.866.648,01 sehingga untuk saldo Penyisihan Piutang Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp1.480.660.541,90 atau 10,25% dibanding Tahun 2021. Berdasarkan Buletin Teknis SAP No. 21 tentang Piutang Transfer, bahwa untuk Piutang Transfer tidak dilakukan penyisihan piutang. Hal tersebut telah diakomodasi dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lahat sesuai Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016. Rincian Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 dijelaskan pada **Tabel 5.81**.

Tabel 5.81. Saldo Penyisihan Piutang Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain PAD yang Sah Per 31 Desember 2022

No	Jenis Penyisihan Piutang	Saldo 31/12/2021 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo 31/12/2022 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	12.566.746.412,57	1.040.303.709,19	0,00	13.607.050.121,76
2	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	1.174.749.853,85	420.068.581,15	0,00	1.594.818.435,00
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	698.370.381,59	20.288.251,56	0,00	718.658.633,15
	Jumlah	14.439.866.648,01	1.480.660.541,90	0,00	15.920.527.189,91

17) Belanja Dibaya Dimuka

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.988.092.498,62 mengalami kenaikan 10.101,12% dibanding Tahun 2021 sebesar Rp59.222.786,89. Jumlah tersebut merupakan Premi Asuransi Gugatan Dokter pada RSUD Lahat sebesar Rp59.150.520,54 dan Premi Asuransi Jiwa untuk santunan kematian masyarakat Kabupaten Lahat pada Sekretariat Daerah sebesar Rp5.928.941.978,08. Rincian atas Belanja Dibayar di Muka dijelaskan pada **Lampiran 24**.

18) Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp17.490.588.942,22. Jumlah Persediaan pada Tahun 2021 sebesar Rp26.745.168.428,56. dibandingkan Tahun 2021 jumlah persediaan pada Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp9.254.579.486,34 atau sebesar 34,60% dari Tahun 2021. Khusus terkait dengan Kebijakan Akuntansi Persediaan dilakukan penyesuaian mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kodifikasi Barang Milik Daerah. Penghitungan persediaan menggunakan metode *First In First Out (FIFO)*. Rincian Mutasi saldo Persediaan dijelaskan pada **Tabel 5.82**.

Tabel 5.82. Saldo Persediaan per 31 Desember 2022

No	Jenis Persediaan	Saldo 31/12/2021 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo 31/12/2022 (Rp)
1	Alat Bahan Untuk Kegiatan Kantor				
	a) Alat Tulis Kantor	2.110.414.559,00	225.581.783,75	2.110.414.559,00	225.581.783,75
	b) Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	6.908.000,00	4.359.500,00	6.908.000,00	4.359.500,00

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun 2022

No	Jenis Persediaan	Saldo 31/12/2021 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo 31/12/2022 (Rp)
	c)				
	d) Dokumen/Administrasi Tender	768.793.467,00	2.914.916.122,00	768.793.467,00	2.914.916.122,00
	e) Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	175.000,00	645.000,00	175.000,00	645.000,00
2	Bahan				
	a) Persediaan Isi Tabung Gas	42.075.000,00	44.321.250,00	42.075.000,00	44.321.250,00
	b) Bahan Baku Bangunan	0,00		0,00	0,00
	c) Bibit Ternak	0,00		0,00	0,00
	d) Bahan Kimia	215.740.788,00	583.493.121,09	215.740.788,00	583.493.121,09
3	Obat-Obatan				
	Bahan Obat-Obatan	12.533.762.589,87	12.044.140.377,88	12.533.762.589,87	12.044.140.377,88
4	Natura				
	Bahan Makanan Pokok	40.314.432,69	82.187.207,50	40.314.432,69	82.187.207,50
5	Persediaan Untuk Tujuan Strategis / Berjaga-Jaga				
	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan				
	Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	11.026.984.592,00	1.590.944.580,00	11.026.984.592,00	1.590.944.580,00
	Jumlah	26.745.168.428,56	17.490.588.942,22	26.745.168.428,56	17.490.588.942,22

Pada Persediaan untuk Dijual/Diserahkan sebesar Rp1.590.944.580,00 terdapat Belanja Hibah berupa Renovasi Gedung Bangunan Rumah Dinas Kodim sebesar Rp979.042.320,00 yang baru diserahkan pada tanggal 11 Januari 2023 dengan BAST nomor 600/01/PUPR/2023. Rincian Saldo Persediaan dijelaskan pada **Lampiran 25**.

b. Investasi Jangka Panjang

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp79.326.041.049,02. Jumlah saldo Investasi Jangka Panjang pada Tahun 2021 sebesar Rp75.190.675.276,55, dibandingkan Tahun 2021 jumlah saldo Investasi Jangka Panjang pada Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp4.135.365.772 atau sebesar 5,50% dari Tahun 2021. Rincian saldo per jenis Investasi Jangka Panjang dijelaskan pada **Tabel 5.83**.

Tabel 5.83. Saldo Invetasi Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo 31/12/2021 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo 31/12/2022 (Rp)
1	Investasi Nonpermanen	388.603.437,00	0,00	0,00	388.603.437,00
a.	Dana Bergulir	1.736.650.000,00	0,00	0,00	1.736.650.000,00
b.	Investasi Jangka Panjang Non Permanen yang Diragukan Tertagih	(1.348.046.563,00)	0,00	0,00	(1.348.046.563,00)
2	Investasi Permanen	74.802.071.839,55	4.531.784.782,74	396.419.010,27	78.937.437.612,02
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	74.802.071.839,55	4.531.784.782,74	396.419.010,27	78.937.437.612,02
	Total	75.190.675.276,55	4.531.784.782,74	396.419.010,27	79.326.041.049,02

Rincian investasi jangka panjang dijelaskan sebagai berikut:

(1) Investasi Non Permanen

Saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2022 sebesar Rp388.603.437,00 (saldo neto), tidak terjadi kenaikan saldo Investasi Non Permanen selama Tahun 2022. Jumlah tersebut terdiri dari Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Perdagangan sebesar Rp1.736.650.000,00 dan penyisihan atas Investasi Jangka Panjang Non Permanen yang Diragukan Tertagih sebesar (Rp1.348.046.563,00). Rincian Investasi Non Permanen dijelaskan sebagai berikut.

a) Dana Bergulir

Saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.736.650.000,00, terdiri dari Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp1.736.650.000,00 dan Dana Bergulir pada Dinas Perdagangan sebesar Rp0,00. Rincian Dana Bergulir dijelaskan sebagai berikut:

(1) Dana Bergulir Dinas Koperasi dan UKM

Saldo Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan UKM per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.736.650.000,00. Nilai tersebut merupakan saldo dari penyaluran dana bergulir yang didanai dari APBD Tahun 2005 s.d. 2008. Rincian penyaluran dana bergulir dijelaskan pada **Tabel 5.84**.

Tabel 5.84. Penyaluran Dana Bergulir

Uraian Penyaluran	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Tahun 2005 : 339 UKM	930.000.000,00	930.000.000,00
Tahun 2006 : 346 UKM	400.000.000,00	400.000.000,00
Tahun 2007 : 603 UKM	810.000.000,00	810.000.000,00
Tahun 2008 : 467 UKM	250.000.000,00	250.000.000,00
Jumlah	2.390.000.000,00	2.390.000.000,00

Rincian saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.736.650.000,00 dijelaskan pada **Tabel 5.85**.

Tabel 5.85. Saldo Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan UKM

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Tunggakan	1.348.046.563,00	1.348.046.563,00
Saldo Rek Bendahara Dana Bergulir	247.474.869,33	247.474.869,33
Saldo Kas di Bendahara	2.607.000,00	2.607.000,00
Kelebihan Pembayaran An. M. Aw (sudah terseter ke Rek Dana Bergulir tgl 5 Des 2016)	(100.000,00)	(100.000,00)
Tidak bisa ditelusuri	138.621.567,67	138.621.567,67
Jumlah	1.736.650.000,00	1.736.650.000,00

Selama Tahun 2022 tidak terdapat penerimaan atas Piutang Dana Bergulir. Adapun sisa Dana Bergulir sebesar Rp653.350.000,00 (Rp2.390.000.000,00 - Rp1.736.650.000,00), terdiri dari:

- (a) Reklas ke TP TGR sebesar Rp308.000.000,00;
- (b) Reklas ke Aset Lain-lain karena limpahan ke Kabupaten Empat Lawang sebesar Rp345.350.000,00.

Sampai dengan 31 Desember 2022 tidak terdapat aktivitas dana bergulir, hanya menunggu pelunasan. Rincian perhitungan Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan UKM dapat dilihat pada **Lampiran 26**.

(2) Dana Bergulir pada Dinas Perdagangan

Saldo Dana Bergulir pada Dinas Perdagangan per 31 Desember 2022 telah dihapusbukukan pada Neraca Pemerintah Kabupaten Lahat, sehingga nilai Dana Bergulir adalah sebesar Rp0,00.

Dengan pertimbangan bahwa Dana Bergulir tidak efektif lagi untuk digulirkan dan tidak akan digulirkan lagi, maka pada tanggal 8 Mei 2017, dilakukan penyetoran Dana Bergulir sebesar Rp27.146.100,00 ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lahat Rekening Bank Sumsel BaBel (Rek No. 142.300.0001). Pada tanggal 14 Januari 2019 saldo uang tunai sebesar Rp50.000,00 juga disetorkan ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lahat Rekening Bank Sumsel Babel (Rek No.142.300.0001). Penghapusbukuan Investasi Non Permanen – Dana Bergulir pada Dinas Perdagangan sesuai dengan Keputusan Bupati Lahat, Nomor: 53/KEP/PERDAG/2019, tanggal 15 Februari 2019 tentang Penghapusbukuan Piutang Dana Bergulir Pada Dinas Perdagangan dari Neraca Pemerintah Kabupaten Lahat. Penghapusbukuan pada Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat tidak menghilangkan hak tagih Pemerintah Kabupaten Lahat atas Piutang Dana Bergulir tersebut, namun penagihan dilakukan secara pasif.

b) Investasi Jangka Panjang Non Permanen yang Diragukan Tertagih

Saldo Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.348.046.563,00. Jumlah tersebut merupakan penyisihan untuk Dana Bergulir yang diragukan tertagih dalam rangka penyajian Investasi Non Permanen secara *Net Realizable Value* (NRV). Rincian Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen dijelaskan pada **Tabel 5.86**.

Tabel 5.86. Rincian Penyisihan Dana Bergulir per 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo 31/12/2021 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo 31/12/2022 (Rp)
1	Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan UKM	(1.348.046.563,00)	0,00	0,00	(1.348.046.563,00)
	Jumlah	(1.348.046.563,00)	0,00	0,00	(1.348.046.563,00)

Rincian untuk perhitungan penyisihan Investasi Non Permanen yang Diragukan Tertagih Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan UKM per 31 Desember 2022 dijelaskan pada **Lampiran 26**. Terkait Dana Bergulir pada Dinas Perdagangan tidak dilakukan penyisihan dikarenakan penghapusbukuan pada Neraca Pemerintah Kabupaten Lahat.

(2) Investasi Permanen

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2022 sebesar Rp78.937.437.612,02 sedangkan pada Tahun 2021 sebesar Rp75.190.675.276,55 dibandingkan Tahun 2021 jumlah Investasi Non Permanen tersebut pada Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp3.746.762.335,47 atau sebesar 4,98% dari Tahun 2021. Jumlah tersebut merupakan Penyertaan Modal pada BUMD Pemerintah Kabupaten Lahat dan Bank Sumsel Babel. Rincian atas Penyertaan Modal per 31 Desember 2022 dijelaskan pada **Lampiran 27**.

a) Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Lematang

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lahat pada PDAM “Tirta Lematang” per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp924.280.650,74, dengan %tase kepemilikan 62,92%. Pada Tahun 2022 Perusahaan Daerah PDAM “Tirta Lematang” mengalami keuntungan/laba sebesar Rp2.102.674.775,00 peningkatan laba tersebut didukung oleh peningkatan dari pendapatan penjualan air. Hal ini dikarenakan salah satunya adanya penyesuaian tarif penjualan air yang belum disesuaikan dari Tahun 2013. Perhitungan saldo Penyertaan Modal menggunakan metode ekuitas. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum “Tirta Lematang” untuk Tahun 2022 belum dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

Rincian perhitungan Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Lematang dijelaskan pada **Tabel 5.87**.

Tabel 5.87. Perhitungan Penyertaan Modal pada PDAM per 31 Desember 2022

Keterangan	Saldo 31/12/2022 (Rp)	Saldo 31/12/2021 (Rp)
Penyertaan Modal	(1.148.722.317,69)	(1.317.886.200,98)
Koreksi laba/rugi 2021 (audited)	0,00	85.431.164,03
Penyertaan Modal Tahun 2022	750.000.000,00	0,00
Laba Tahun 2022 x % Kepemilikan (Rp2.102.674.775,00 x 62,92%)	1.323.002.968,43	83.732.719,26
Saldo Penyertaan Modal	924.280.650,74	(1.148.722.317,69)

b) Penyertaan Modal pada PD Pertambangan dan Energi

Saldo Penyertaan Modal Pemkab Lahat pada PD Pertambangan dan Energi (PD PDE) Kabupaten Lahat per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00, dikarenakan nilai penyertaan modal bernilai negatif. Nilai penyertaan modal tersebut belum diaudit oleh KAP. Laporan Keuangan Perusda Pertambangan dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2022 belum dilakukan audit oleh KAP dikarenakan tidak adanya biaya untuk membayar jasa auditor KAP, karena Perusda Pertambangan hampir setiap Tahunnya mengalami kerugian. Perhitungan saldo Penyertaan Modal menggunakan metode ekuitas dengan %tase kepemilikan sebesar 100%.

Saldo Penyertaan Modal per 31 Desember 2022 pada PD PDE sebesar (Rp265.926.823,06) dijelaskan sebagai berikut:

- Penyertaan Modal per 31 Desember 2021 : 396.419.010,27
- Rugi Tahun 2022 : (662.345.833,33)
- Penyertaan Modal per 31 Desember 2022 : (265.926.823,06)

c) Penyertaan Modal pada PD Hotel Bukit Serelo

Saldo Penyertaan Modal Pemkab Lahat pada PD Hotel Bukit Serelo (Buser) per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp14.175.013.203,72. Perhitungan saldo penyertaan modal menggunakan metode ekuitas dengan %tase kepemilikan sebesar 100%.

Penyertaan Modal pada PD Hotel Buser berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Hotel Bukit Serelo.

Untuk Laporan Keuangan PD Hotel Buser Tahun 2021 dan Tahun 2022 belum dilakukan audit oleh KAP yang ditunjuk oleh PD “Hotel Bukit Serelo”. Perhitungan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lahat pada PD Hotel Buser per 31 Desember 2022 selengkapnya sebagai berikut:

Penyertaan Modal per 31 Desember 2021	Rp13.567.509.071,72
Laba Tahun 2022 (audited)	Rp607.504.132,00
Penyertaan Modal per 31 Desember 2022	Rp14.175.013.203,72

d) Penyertaan Modal pada Bank Sumsel BaBel

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lahat pada Bank Sumsel Babel per 31 Desember 2022 sebesar Rp63.838.143.757,56. Berdasarkan Peraturan Bupati Lahat Nomor 54 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencairan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pada Bank Sumsel Babel Cabang Lahat, bahwa Pemerintah Kabupaten Lahat pada Tahun Anggaran 2022 telah menganggarkan dan menetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat berupa investasi dalam bentuk saham pada Bank Sumsel BaBel sebesar Rp3.000.000.000,00. Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah sebesar Rp63.838.143.757,56 merupakan investasi dalam bentuk saham dengan prosentase kepemilikan sebesar 3,53%. Perhitungan saldo Penyertaan Modal menggunakan Metode Harga Perolehan. Rincian perhitungan dijelaskan sebagai berikut:

- Penyertaan Modal per 31 Desember 2021	: Rp60.838.143.757,56
- Penambahan selama Tahun 2022	: <u>Rp3.000.000.000,00</u>
- Penyertaan Modal per 31 Desember 2022	: <u>Rp63.838.143.757,56</u>

c. Properti Investasi

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

1) Properti Investasi

Properti Investasi Per 31 Desember 2022 sebesar Rp38.505.098.495,85. Properti Investasi tersebut berupa Bangunan Gedung Pemerintah Kabupaten Lahat yang disewakan kepada Pihak Ketiga. Rincian pada **Tabel 5.88**.

Tabel 5.88. Harga Perolehan Properti Investasi Per 31 Desember 2022 dan 2021

NO	SKPD	Uraian	Alamat	Nilai Properti (Rp)		Dokumen Perjanjian Sewa
				Tahun 2022	Tahun 2021	
1	Sekretariat Daerah	Sewa Gedung Kesenian	Jl. Kolonel H. Barlian Bandar Jaya Lahat	6.217.775.364,90	0,00	Surat Perjanjian Sewa Nomor 600/170/PERDAG/SP/2018 antara Pemerintah Kabupaten Lahat dengan PT. Smart Akses Informasi
2	Dinas Perdagangan	Bangunan Plaza Lematang Indah	Jl. Let. Amir Hamzah Kel. Pasar Baru Lahat	32.287.323.130,95	0,00	Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 800/465/Xi/2021 antara Pemerintah Kabupaten Lahat dengan CV. Serelo Sakti
Jumlah				38.505.098.495,85	0,00	

2) Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.969.835.240,00. Penjelasan pada **Tabel 5.89**.

Tabel 5.89. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Per 31 Desember 2022 dan 2021

NO	SKPD	Uraian	Alamat	Nilai Akumulasi Penyusutan (Rp)		Dokumen Perjanjian Sewa
				2022	2021	
1	Sekretariat Daerah	Sewa Gedung Kesenian	Jl. Kolonel H. Barlian Bandar Jaya Lahat	1.687.290.725,00	0,00	Surat Perjanjian Sewa Nomor 600/170/PERDAG/SP/2018 antara Pemerintah Kabupaten Lahat dengan PT. Smart Akses Informasi
2	Dinas Perdagangan	Bangunan Plaza Lematang Indah	Jl. Let. Amir Hamzah Kel. Pasar Baru Lahat	3.282.544.515,00	0,000	Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 800/465/Xi/2021 antara Pemerintah Kabupaten Lahat dengan CV. Serelo Sakti
Jumlah				4.969.835.240,00	0,00	

d. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.883.408.786.034,73. Jumlah Aset Tetap pada Tahun 2021 sebesar Rp2.724.353.203.215,17 dibandingkan Tahun 2021 jumlah Aset Tetap tersebut pada Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp159.055.582.819,56 atau sebesar 5,84% dari Tahun 2021. Jumlah tersebut merupakan akumulasi penambahan belanja modal setiap tahun anggaran, hibah, serta koreksi belanja lain terkait perolehan aset tetap. Rincian mutasi saldo masing-masing Aset Tetap per 31 Desember 2022 dijelaskan pada **Tabel 5.90**.

Tabel 5.90 Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2022

No	Aset Tetap	Saldo Awal (Rp)	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	Tanah	102.032.178.498,50	49.942.579.279,31	4.495.918.974,83	147.478.838.802,98
2	Peralatan dan Mesin	703.276.117.868,43	115.265.308.147,10	34.493.713.108,23	784.047.712.907,30
3	Gedung dan Bangunan	1.061.061.435.251,22	84.016.950.893,58	82.453.291.136,91	1.062.625.095.007,89
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.308.191.247.384,32	489.776.205.905,71	34.089.977.716,47	3.763.877.475.573,56
5	Aset Tetap Lainnya	97.111.428.578,62	10.306.724.519,90	6.468.289.173,90	100.949.863.924,62
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.021.079.073,90	23.557.647.288,14	788.937.343,90	24.789.789.018,14
7	Akumulasi Penyusutan	(2.549.340.283.439,82)	(506.122.892.610,52)	(55.103.186.850,58)	(3.000.359.989.199,76)
Jumlah		2.724.353.203.215,17	266.742.523.423,22	107.686.940.603,66	2.883.408.786.034,73

Rincian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 dijelaskan sebagai berikut:

1) Tanah

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp147.478.838.802,98. Jumlah Aset Tetap Tanah pada Tahun 2021 sebesar Rp102.032.178.498,50 dibandingkan Tahun 2021 jumlah Aset Tetap Tanah pada Tahun 2022

mengalami kenaikan sebesar Rp45.446.660.304,48 atau sebesar 30,82% dari Tahun 2021. Rincian Mutasi Saldo Tanah dijelaskan pada **Tabel 5.91**.

Tabel 5.91 Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022

Saldo Awal	102.032.178.498,50
Mutasi Tambah	
Belanja Modal	0,00
Belanja Barang dan Jasa (atribusi & pemeliharaan) serta BTT yang memenuhi Kapitalisasi	0,00
- Atribusi	0,00
- Reklas dari Belanja Barang & Jasa serta BTT	0,00
Hibah (Hibah dari pihak lain)	2.140.952.000,00
Pengakuan Utang Belanja	0,00
Reklasifikasi dari KDP ke Aset Tetap	0,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke KDP	0,00
Reklasifikasi antar Rekening	0,00
Koreksi lainnya	45.184.392.109,48
Koreksi Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0,00
Mutasi masuk antar SKPD	2.617.235.169,83
Jumlah Mutasi Tambah	49.942.579.279,31
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi KDP	0,00
Belanja Modal Tidak Menjadi Aset	0,00
Barang yang Diserahkan ke Masyarakat	0,00
Persediaan	0,00
Reklasifikasi antar Rekening	0,00
Aset Lainnya-Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	0,00
Reklas ke Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud	0,00
Belanja dibawah nilai kapitalisasi	0,00
Koreksi lainnya	1.878.683.805,00
Mutasi keluar antar SKPD	2.617.235.169,83
Penghapusan	0,00
Pembayaran Utang Belanja	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	4.495.918.974,83
Saldo akhir	147.478.838.802,98

Terkait mutasi saldo Tanah per 31 Desember 2022, dijelaskan sebagai berikut:

- a) Saldo Awal per 31 Desember 2021 sebesar Rp102.032.178.498,50 yang terdapat pada 51 (lima puluh satu) SKPD;
- b) Mutasi Tambah per 31 Desember 2022 sebesar Rp49.942.579.279,31, terdiri dari :
 - (1) Hibah (Hibah dari pihak lain) per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.140.952.000,00 yang terdapat pada 3 (tiga) SKPD berikut ini :
 - (a) Hibah (Hibah dari pihak lain) pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar

- Rp648.512.000,00; berupa tanah jalan Perumahan Penghijauan Residence;
- (b) Hibah (Hibah dari pihak lain) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp119.640.000,00; yaitu hibah tanah dari Pemerintah Desa Muara Cawang untuk SMPN 2 Kecamatan Pseksu;
 - (c) Hibah (Hibah dari pihak lain) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp1.372.800.000,00; yaitu hibah Tanah dari Direktur Jenderal Perkebunan;
- (2) Koreksi lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp45.184.392.109,48 yang terdapat pada 7 (tujuh) SKPD berikut ini:
- (a) Koreksi lainnya pada Kecamatan Lahat sebesar Rp84.000.000,00;
 - (b) Koreksi lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebesar Rp37.378.106.000,00;
 - (c) Koreksi lainnya pada Dinas Perhubungan sebesar Rp2.197.844.109,48;
 - (d) Koreksi lainnya pada Dinas Kesehatan sebesar Rp173.840.000,00;
 - (e) Koreksi lainnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp342.550.000,00;
 - (f) Koreksi lainnya pada Dinas Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp38.400.000,00;
 - (g) Koreksi lainnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp4.969.652.000,00;
- (3) Mutasi masuk antar SKPD per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.617.235.169,83 yang terdapat pada 2 (dua) SKPD.
- c) Mutasi Kurang per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.495.918.974,83, terdiri dari :
- 1) Koreksi lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.878.683.805,00 yang terdapat pada 7 (tujuh) SKPD berikut ini :
 - a) Koreksi lainnya pada Sekretariat Daerah sebesar Rp332.455.864,00;
 - b) Koreksi lainnya pada Kecamatan Lahat sebesar Rp7.750.000,00;
 - c) Koreksi lainnya pada Kecamatan Merapi Timur sebesar Rp1.927.400,00;
 - d) Koreksi lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebesar Rp12.300.000,00;
 - e) Koreksi lainnya pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan sebesar Rp186.977.441,00;
 - f) Koreksi lainnya pada Dinas Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp1.299.000.000,00;
 - g) Koreksi lainnya pada Dinas Sosial sebesar Rp38.273.100,00;

- 2) Mutasi keluar antar SKPD pada per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.617.235.169,83, merupakan Mutasi Keluar dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Rincian Mutasi saldo Tanah pada masing-masing SKPD per 31 Desember 2022 dijelaskan pada **Lampiran 28**.

2) Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap Peralatan Dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp784.047.712.907,30. Jumlah Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Tahun 2021 sebesar Rp703.276.117.868,43 dibandingkan Tahun 2021 jumlah Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp80.771.595.038,87 atau sebesar 11,49% dari Tahun 2021. Rincian Mutasi Saldo Peralatan dan Mesin dijelaskan pada **Tabel 5.92**.

Tabel 5.92 Mutasi Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022

Saldo Awal	703.276.117.868,43
Mutasi Tambah	
Belanja Modal	89.269.159.110,00
Belanja Barang dan Jasa (atribusi & pemeliharaan) serta BTT yang memenuhi Kapitalisasi :	321.404.010,00
- Atribusi	
- Reklas dari Belanja Barang & Jasa serta BTT	
Hibah (Hibah dari pihak lain)	375.916.100,00
Pengakuan Utang Belanja	466.568.733,00
Reklasifikasi dari KDP ke Aset Tetap	0,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke KDP	0,00
Reklasifikasi antar Rekening	5.256.045.965,00
Koreksi lainnya	230.524.900,00
Koreksi Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0,00
Mutasi masuk antar SKPD	19.345.689.329,10
Jumlah Mutasi Tambah	115.265.308.147,10
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi KDP	0,00
Belanja Modal Tidak Menjadi Aset	865.040.758,00
Barang yang Diserahkan ke Masyarakat	464.535.000,00
Persediaan	0,00
Reklasifikasi antar Rekening	1.299.600.000,00
Aset Lainnya-Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	3.955.735.899,96
Reklas ke Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud	0,00
Belanja dibawah nilai kapitalisasi	3.106.156.572,00
Koreksi lainnya	3.865.934.656,00
Mutasi keluar anFtar SKPD	19.345.689.329,10
Penghapusan	1.591.020.893,17
Pembayaran Utang Belanja	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	34.493.713.108,23
Saldo akhir	784.047.712.907,30

Terkait mutasi saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022, dijelaskan sebagai berikut:

- a) Saldo Awal per 31 Desember 2021 sebesar Rp703.276.117.868,43 yang terdapat pada 60 (enam puluh) SKPD.

- b) Mutasi Tambah per 31 Desember 2022 sebesar Rp115.265.308.147,10, terdiri dari :
- (1) Belanja Modal per 31 Desember 2022 sebesar Rp89.269.159.110,00 yang terdapat pada 47 (empat puluh tujuh) SKPD;
 - (2) Belanja Barang dan Jasa (atribusi & pemeliharaan) serta BTT yang memenuhi Kapitalisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp321.404.010,00;
 - (3) Hibah (Hibah dari pihak lain) per 31 Desember 2022 sebesar Rp375.916.100,00 yang terdapat pada 3 (tiga) SKPD berikut ini :
 - (a) Hibah (Hibah dari pihak lain) pada Dinas Kesehatan sebesar Rp256.610.000,00, dari PT. KAI berupa Kendaraan Operasional;
 - (b) Hibah (Hibah dari pihak lain) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp91.942.500,00, berupa meubelair untuk SDN 13 Kikim Selatan dan Personal Komputer untuk SMPN 4 Kikim Timur;
 - (c) Hibah (Hibah dari pihak lain) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sebesar Rp27.363.600,00, merupakan Hibah dari Kementerian Pertanian RI berupa 2 unit kendaraan roda 2 (dua);
 - (4) Pengakuan Utang Belanja per 31 Desember 2022 sebesar Rp466.568.733,00 yang terdapat pada 2 (dua) SKPD , dengan rincian berikut ini :
 - (a) Pengakuan Utang Belanja pada Dinas Perhubungan sebesar Rp448.018.733,00;
 - (b) Pengakuan Utang Belanja pada Dinas Kesehatan sebesar Rp18.550.000,00;
 - (5) Reklasifikasi antar Rekening per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.256.045.965,00 yang terdapat pada 4 (empat) SKPD berikut ini :
 - (a) Reklasifikasi antar rekening pada Sekretariat Daerah sebesar Rp115.900.000,00, merupakan reklas dari KIB E;
 - (b) Reklasifikasi antar rekening pada Dinas Kesehatan sebesar Rp119.015.500,00, merupakan reklas dari KIB C;
 - (c) Reklasifikasi antar Rekening pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp5.008.425.465,00, merupakan reklas dari KIB E;
 - (d) Reklasifikasi antar rekening pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp12.705.000,00, merupakan reklas dari KIB E;
 - (6) Koreksi lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp230.524.900,00 yang terdapat pada 2 (dua) SKPD berikut ini :
 - (a) Koreksi lainnya pada Dinas Kesehatan sebesar Rp213.760.000,00, merupakan koreksi aset yang belum tercatat berupa kendaraan angkutan persampahan;
 - (b) Koreksi lainnya pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sebesar Rp16.764.900,00; merupakan koreksi aset belum tercatat berupa kendaraan dinas roda 2 (dua);

- (7) Mutasi masuk antar SKPD per 31 Desember 2022 sebesar Rp19.345.689.329,10 yang terdapat pada 44 (empat puluh empat) SKPD.
- c) Mutasi Kurang per 31 Desember 2022 sebesar Rp34.493.713.108,23, terdiri dari:
- 1) Belanja Modal Tidak Menjadi Aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp865.040.758,00 yang terdapat pada 8 (delapan) SKPD berikut ini :
 - (a) Belanja modal tidak menjadi aset pada Sekretariat Daerah sebesar Rp14.750.000,00;
 - (b) Belanja modal tidak menjadi aset Aset pada Kecamatan Lahat sebesar Rp8.730.000,00;
 - (c) Belanja modal tidak menjadi aset pada Dinas Perhubungan sebesar Rp448.018.733,00;
 - (d) Belanja modal tidak menjadi aset pada Dinas Kesehatan sebesar Rp68.646.225,00;
 - (e) Belanja modal tidak menjadi aset pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp700.000,00;
 - (f) Belanja modal tidak menjadi aset pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp301.806.250,00;
 - (g) Belanja modal tidak menjadi aset pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp1.636.250,00; dan
 - (h) Belanja modal tidak menjadi aset pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp20.753.300,00.
 - 2) Barang yang diserahkan ke masyarakat pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana per 31 Desember 2022 sebesar Rp464.535.000,00, merupakan BKB Kit Stunting yang diberikan kepada Bina Keluarga Balita pada 3 (tiga) Kecamatan dalam Kabupaten Lahat.
 - 3) Reklasifikasi antar Rekening per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.299.600.000,00 pada Dinas Kesehatan;
 - 4) Aset Lainnya - Aset Kondisi Rusak Berat / Hilang / Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.955.735.899,96 yang terdapat pada 16 (enam belas) SKPD berikut ini :
 - (a) Aset lainnya-aset kondisi rusak berat/hilang/lainnya pada Sekretariat DPRD sebesar Rp315.920.000,00;
 - (b) Aset lainnya-aset kondisi rusak berat/hilang/lainnya pada Sekretariat Daerah sebesar Rp42.750.000,00;
 - (c) Aset lainnya-aset kondisi rusak berat/hilang/lainnya pada Kecamatan Kikim Timur sebesar Rp10.235.000,00;
 - (d) Aset lainnya-aset kondisi rusak berat/hilang/lainnya pada Kecamatan Jarai sebesar Rp12.000.000,00;
 - (e) Aset lainnya-aset kondisi rusak berat/hilang/lainnya pada Kecamatan Muara Payang sebesar Rp10.235.000,00;
 - (f) Aset lainnya-aset kondisi rusak berat/hilang/lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp314.650.000,00;

- (g) Aset lainnya-aset kondisi rusak berat/hilang/lainnya pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp39.112.270,00;
 - (h) Aset lainnya-aset kondisi rusak berat/hilang/lainnya pada Dinas Kesehatan sebesar Rp561.558.500,00;
 - (i) Aset Lainnya - Aset Kondisi Rusak Berat / Hilang / Lainnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp308.965.400,00;
 - (j) Aset lainnya-aset kondisi rusak berat/hilang/lainnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp10.235.000,00;
 - (k) Aset lainnya-aset kondisi rusak berat/hilang/lainnya pada Dinas Perdagangan sebesar Rp13.342.223,00;
 - (l) Aset lainnya-aset kondisi rusak berat/hilang/lainnya pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp26.400.000,00;
 - (m) Aset lainnya-aset kondisi rusak berat/hilang/lainnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp1.513.240.341,52;
 - (n) Aset lainnya-aset kondisi rusak berat/hilang/lainnya pada Badan Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp18.037.000,00;
 - (o) Aset lainnya-aset kondisi rusak berat/hilang/lainnya pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp740.780.165,44; dan
 - (p) Aset lainnya-aset kondisi rusak berat/hilang/lainnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp18.275.000,00.
- 5) Belanja dibawah nilai kapitalisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.106.156.572,00 yang terdapat pada 25 (dua puluh lima) SKPD berikut ini :
- (a) Belanja dibawah nilai kapitalisasi pada Sekretariat Daerah sebesar Rp17.430.000,00;
 - (b) Belanja dibawah nilai kapitalisasi pada Kecamatan Lahat sebesar Rp6.159.000,00;
 - (c) Belanja dibawah nilai kapitalisasi pada Kecamatan Merapi Selatan sebesar Rp6.050.000,00;
 - (d) Belanja dibawah nilai kapitalisasi pada Kecamatan Kikim Selatan sebesar Rp6.470.919,00;
 - (e) Belanja dibawah nilai kapitalisasi pada Kecamatan Pajar Bulan sebesar Rp400.000,00;
 - (f) Belanja dibawah nilai kapitalisasi pada Kecamatan Gumay Talang sebesar Rp1.000.000,00;
 - (g) Belanja dibawah nilai kapitalisasi pada Kecamatan Merapi Timur sebesar Rp6.050.000,00;
 - (h) Belanja dibawah nilai kapitalisasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp31.100.000,00;
 - (i) Belanja dibawah nilai kapitalisasi pada Dinas Perhubungan sebesar Rp5.640.000,00;
 - (j) Belanja dibawah nilai kapitalisasi pada Dinas Kesehatan sebesar Rp968.072.207,00;
 - (k) Belanja dibawah nilai kapitalisasi pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebesar Rp1.230.990,00;

- (l) Belanja dibawah nilai kapitalisasi pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan sebesar Rp1.936.864.302,00;
 - (m) Belanja dibawah nilai kapitalisasi pada Dinas Sosial sebesar Rp12.108.000,00;
 - (n) Belanja dibawah nilai kapitalisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp760.870,00;
 - (o) Belanja dibawah nilai kapitalisasi pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sebesar Rp2.763.900,00;
 - (p) Belanja dibawah nilai kapitalisasi pada Dinas Perikanan sebesar Rp1.500.000,00;
 - (q) Belanja dibawah nilai kapitalisasi pada Dinas Perkebunan sebesar Rp10.846.000,00;
 - (r) Belanja dibawah nilai kapitalisasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp570.000,00;
 - (s) Belanja dibawah nilai kapitalisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp20.625.000,00;
 - (t) Belanja dibawah nilai kapitalisasi pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp47.857.700,00;
 - (u) Belanja dibawah nilai kapitalisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp1.530.000,00;
 - (v) Belanja dibawah nilai kapitalisasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp4.431.264,00;
 - (w) Belanja dibawah nilai kapitalisasi pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp8.650.000,00;
 - (x) Belanja dibawah nilai kapitalisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp6.714.420,00; dan
 - (y) Belanja dibawah nilai kapitalisasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp1.332.000,00.
- 6) Koreksi lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.865.934.656,00 merupakan koreksi pencatatan yang terdapat pada 6 (enam) SKPD berikut ini :
- (a) Koreksi lainnya pada Dinas Perhubungan sebesar Rp783.003.613,00;
 - (b) Koreksi lainnya pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.215.307.621,00;
 - (c) Koreksi lainnya pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan sebesar Rp1.411.772.543,00;
 - (d) Koreksi lainnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp29.808.320,00;
 - (e) Koreksi lainnya pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp80.442.559,00; dan
 - (f) Koreksi lainnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp345.600.000,00.
- 7) Mutasi keluar antar SKPD per 31 Desember 2022 sebesar Rp19.345.689.329,10 yang terdapat pada 49 (empat puluh sembilan) SKPD .

- 8) Penghapusan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.591.020.893,17 (Nilai Intrakompatabel yang sudah dikeluarkan dari Neraca) yang terdapat pada 15 (lima belas) SKPD berikut ini :
- (a) Penghapusan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp53.100.000,00, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor 032/71/KEP/BPKAD/2022 Tanggal 09 Mei 2022;
 - (b) Penghapusan pada Kecamatan Lahat sebesar Rp38.207.898,03, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lahat :
 - Nomor 032/71/KEP/BPKAD/2022 Tanggal 09-05-2022 sebesar Rp10.150.000,00;
 - Nomor 032/80/KEP/BPKAD/2022 Tanggal 31-05-2022 sebesar Rp13.047.927,06;
 - Nomor 032/121/KEP/BPKAD/2022 Tanggal 10-06-2022 sebesar Rp13.269.970,97;
 - Nomor 032/180/KEP/BPKAD/2022 Tanggal 16-09-2022 sebesar Rp1.740.000;
 - (c) Penghapusan pada Kecamatan Merapi Barat sebesar Rp5.100.000,00, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor 430/KEP/VI/2006 Tanggal 29-12-2006;
 - (d) Penghapusan pada Kecamatan Jarai sebesar Rp6.600.000,00, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lahat :
 - Nomor 731/KEP/2003 Tanggal 09-07-2003 sebesar Rp1.500.000,00;
 - Nomor 105/KEP/IX/2003 Tanggal 28-01-2003 sebesar Rp5.100.000,00,-
 - (e) Penghapusan pada Kecamatan Kikim Barat sebesar Rp25.258.670,97, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor 032/269/KEP/BPKAD/2022 Tanggal 29-12-2022;
 - (f) Penghapusan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp61.400.000,00, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lahat:
 - Nomor 032/71/KEP/BPKAD/2022 Tanggal 09-05-2022 sebesar Rp35.500.000,00;
 - Nomor 105/KEP/IX/2003 Tanggal 28-01-2003 sebesar Rp9.600.000,00;
 - Nomor 430/KEP/VI/2006 Tanggal 29-12-2006 sebesar Rp3.800.000,00;
 - Nomor 030/535/XII/2010 Tanggal 27-12-2010 sebesar Rp4.400.000,00;
 - Nomor 979/227/KEP/DPPPKAD/2013 Tanggal 16-05-2013 sebesar Rp8.100.000,00;
 - (g) Penghapusan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp255.620.400,00, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lahat :
 - Nomor 032/71/KEP/BPKAD/2022 Tanggal 09-05-2022 sebesar Rp246.420.400,00;
 - Nomor 563/KEP/VIII/2004 Tanggal 13-07-2004 sebesar Rp4.100.000,00;
 - Nomor 430/KEP/VI/2006 Tanggal 29-12-2006 sebesar Rp5.100.000,00;

- (h) Penghapusan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp5.600.000,00, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor 430/KEP/VI/2006 Tanggal 29-12-2006;
- (i) Penghapusan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp12.400.000,00, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor 430/KEP/VI/2006 Tanggal 29-12-2006;
- (j) Penghapusan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sebesar Rp241.290.000,00, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lahat :
 - Nomor 032/71/KEP/BPKAD/2022 Tanggal 09-05-2022 sebesar Rp218.790.000,00;
 - Nomor 430/KEP/VI/2006 Tanggal 29-12-2006 sebesar Rp7.500.000,00;
 - Nomor 030/535/XII/ 2010 Tanggal 27-12-2010 sebesar Rp7.500.000,00;
 - Nomor 979/227/KEP/DPPPKAD/2013 Tanggal 16-05-2013 sebesar Rp7.500.000,00;
- (k) Penghapusan pada Dinas Perdagangan sebesar Rp17.400.000,00, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lahat :
 - Nomor 430/KEP/VI/2006 Tanggal 29-12-2006 sebesar Rp13.500.000,00;
 - Nomor 030/535/XII/2010 Tanggal 27-12-2010 sebesar Rp 3.900.000,00;
- (l) Penghapusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp634.964.329,17, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lahat :
 - Nomor 032/71/KEP/BPKAD/2022 Tanggal 09-05-2022 sebesar Rp365.229.460,00;
 - Nomor 032/120/KEP/BPKAD/2022 Tanggal 10-06-2022 sebesar Rp202.834.869,17;
 - Nomor 082/KEP/IX/2002 Tanggal 04-03-2002 sebesar Rp66.900.000,00;
- (m) Penghapusan pada Dinas Pariwisata sebesar Rp22.809.300,00, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor 731/KEP/2003 Tanggal 09-07-2003;
- (n) Penghapusan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp17.358.000,00, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor 032/149/KEP/BPKAD/2022 Tanggal 28-07-2022; dan
- (o) Penghapusan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp193.912.295,00, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor 032/52/KEP/BPKAD/2022 Tanggal 18-04-2022.

Rincian Mutasi saldo Peralatan dan Mesin pada masing-masing SKPD per 31 Desember 2022 dijelaskan pada **Lampiran 29**.

3) Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap Gedung Dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.062.625.095.007,89. Jumlah Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Tahun 2021 sebesar Rp1.061.061.435.251,22 dibandingkan Tahun 2021 jumlah Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.563.659.756,67 atau sebesar 0,15 % dari Tahun 2021. Rincian Mutasi Saldo Gedung dan Bangunan dijelaskan pada **Tabel 5.93**.

Tabel 5.93. Mutasi Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022

Saldo Awal	1.061.061.435.251,22
Mutasi Tambah	
Belanja Modal	74.245.226.439,00
Belanja Barang dan Jasa (atribusi & pemeliharaan) serta BTT yang memenuhi Kapitalisasi	1.076.035.600,00
- Atribusi	
- Reklas dari Belanja Barang & Jasa serta BTT	
Hibah (Hibah dari pihak lain)	341.488.900,00
Pengakuan Utang Belanja	0,00
Reklasifikasi dari KDP ke Aset Tetap	296.458.325,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke KDP	-
Reklasifikasi antar Rekening	244.403.000,00
Koreksi lainnya	1.815.485.394,00
Koreksi Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0,00
Mutasi masuk antar SKPD	5.997.853.235,58
Jumlah Mutasi Tambah	84.016.950.893,58
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi KDP	0,00
Belanja Modal Tidak Menjadi Aset	95.955.000,00
Barang yang Diserahkan ke Masyarakat	0,00
Persediaan	0,00
Reklasifikasi antar Rekening	3.205.549.592,00
Aset Lainnya-Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	70.851.435.966,82
Reklas ke Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud	0,00
Belanja dibawah nilai kapitalisasi	0,00
Koreksi lainnya	193.328.177,51
Mutasi keluar antar SKPD	5.997.853.235,58
Penghapusan	1.788.576.865,00
Pembayaran Utang Belanja	320.592.300,00
Jumlah Mutasi Kurang	82.453.291.136,91
Saldo akhir	1.062.625.095.007,89

Terkait mutasi saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022, dijelaskan sebagai berikut:

- a) Saldo Awal per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.061.061.435.251,22 yang terdapat pada 57 (lima puluh tujuh) SKPD;

- b) Mutasi Tambah per 31 Desember 2022 sebesar Rp84.016.950.893,58, terdiri dari :
- (1) Belanja Modal per 31 Desember 2022 sebesar Rp74.245.226.439,00 yang terdapat pada 19 (sembilan belas) SKPD.
 - (2) Belanja Barang dan Jasa (atribusi & pemeliharaan) serta BTT yang memenuhi Kapitalisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.076.035.600,00 yang terdapat pada 10 (sepuluh) SKPD .
 - (a) Atribusi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp84.000.000,00;
 - (b) Atribusi pada Dinas Kesehatan sebesar Rp352.562.350,00;
 - (c) Atribusi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp8.700.000,00;
 - (d) Atribusi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp331.150.000,00;
 - (e) Atribusi pada Dinas Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp27.290.250,00;
 - (f) Atribusi pada Dinas Sosial sebesar Rp48.843.000,00;
 - (g) Atribusi pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sebesar Rp197.990.000,00;
 - (h) Atribusi pada Dinas Perdagangan sebesar Rp3.000.000,00;
 - (i) Atribusi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp6.000.000,00;
 - (j) Atribusi pada Badan Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp16.500.000,00;
 - (3) Hibah (Hibah dari pihak lain) per 31 Desember 2022 sebesar Rp341.488.900,00 yang terdapat pada 3 (tiga) SKPD berikut ini :
 - (a) Hibah (Hibah dari pihak lain) pada Kecamatan Jarai sebesar Rp80.000.000,00, merupakan Hibah Gedung Perpustakaan Desa Jarai Kecamatan Jarai;
 - (b) Hibah (Hibah dari pihak lain) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp215.588.900,00, merupakan Hibah Gedung Sekolah dari Pemerintah Desa Tanjung Kurung Kecamatan Kikim Selatan untuk SDN 13 Kikim Selatan Kelas Jauh;
 - (c) Hibah (Hibah dari pihak lain) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp45.900.000,00, merupakan Hibah Gedung dari Direktur Jenderal Perkebunan.
 - (4) Reklasifikasi dari KDP ke Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp296.458.325,00 yang terdapat pada 2 (dua) SKPD berikut ini :
 - (a) Reklasifikasi dari KDP ke Aset Tetap pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp102.858.325,00;
 - (b) Reklasifikasi dari KDP ke Aset Tetap pada Dinas Kesehatan sebesar Rp193.600.000,00;
 - (5) Reklasifikasi antar Rekening pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan per 31 Desember 2022 sebesar Rp244.403.000,00, merupakan reklas dari KIB D;
 - (6) Koreksi lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.815.485.394,00 yang terdapat pada 4 (empat) SKPD berikut ini :

- (a) Koreksi lainnya pada Kecamatan Lahat sebesar Rp144.650.000,00;
- (b) Koreksi lainnya pada Dinas Perhubungan sebesar Rp1.334.481.900,00;
- (c) Koreksi lainnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp255.910.935,00;
- (d) Koreksi lainnya pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp80.442.559,00;
- (7) Mutasi masuk antar SKPD per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.997.853.235,58 yang terdapat pada 7 (tujuh) SKPD.
- c) Mutasi Kurang per 31 Desember 2022 sebesar Rp82.453.291.136,91, terdiri dari :
 - (1) Belanja modal tidak menjadi aset pada Dinas Kesehatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp95.955.000,00;
 - (2) Reklasifikasi antar Rekening per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.205.549.592,00 yang terdapat pada 4 (empat) SKPD berikut ini :
 - (a) Reklasifikasi antar Rekening pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebesar Rp480.803.000,00, merupakan reklas ke KIB D;
 - (b) Reklasifikasi antar Rekening pada Dinas Kesehatan sebesar Rp2.258.924.143,00, merupakan
 - reklas ke KIB B sebesar Rp119.015.500,00;
 - reklas ke KIB D sebesar Rp2.139.908.643,00;
 - (c) Reklasifikasi antar Rekening pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp412.806.100,00, merupakan reklas ke KIB D;
 - (d) Reklasifikasi antar Rekening pada Dinas Sosial sebesar Rp53.016.349,00, merupakan reklas ke KIB D;
 - (3) Aset Lainnya - Aset Kondisi Rusak Berat / Hilang / Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp70.851.435.966,82 yang terdapat pada 7 (tujuh) SKPD berikut ini :
 - (a) Aset Lainnya - Aset Kondisi Rusak Berat / Hilang / Lainnya pada Sekretariat Daerah sebesar Rp6.217.775.364,90;
 - (b) Aset Lainnya - Aset Kondisi Rusak Berat / Hilang / Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp9.974.409.432,80;
 - (c) Aset Lainnya - Aset kondisi rusak berat/hilang/lainnya pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp257.946.660,00;
 - (d) Aset Lainnya - Aset Kondisi Rusak Berat / Hilang / Lainnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp19.997.187.273,98;
 - (e) Aset Lainnya - Aset kondisi rusak berat/hilang/lainnya pada Dinas Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp95.614.600,00;
 - (f) Aset Lainnya - Aset kondisi rusak berat/hilang/lainnya pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp2.021.179.504,19;
 - (g) Aset Lainnya - Aset kondisi rusak berat/hilang/lainnya pada Dinas Perdagangan sebesar Rp32.287.323.130,95

- (4) Koreksi lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp193.328.177,51 yang terdapat pada 2 (dua) SKPD berikut ini :
- (a) Koreksi lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp77.360.688,62, merupakan kekurangan volume atas pekerjaan Renovasi Gedung KPU & Gedung PANWASLU dan Renovasi Mess Dinas Kejaksaan Negeri Lahat.
 - (b) Koreksi lainnya pada Dinas Kesehatan sebesar Rp115.967.488,89, merupakan kekurangan volume atas pekerjaan Pembangunan Puskesmas Mulak Sebingkai, Pembangunan Puskesmas Lahat Selatan dan Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Tipe D Tanjung Tebat.
- (5) Mutasi keluar antar SKPD per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.997.853.235,58 yang terdapat pada 5 (lima) SKPD..
- (6) Penghapusan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.788.576.865,00 (Nilai Intra Kompatabel yang sudah dikeluarkan dari Neraca) yang terdapat pada 2 (dua) SKPD berikut ini :
- (a) Penghapusan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp906.294.465,00; sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lahat :
 - Nomor 032/166/KEP/BPKAD/2022 Tanggal 23-08-2022 sebesar Rp102.858.325,00;
 - Nomor 032/365/KEP/BPKAD/2022 Tanggal 03-11-2022 sebesar Rp 803.436.140,00;
 - (b) Penghapusan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp882.282.400,00; sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lahat :
 - Nomor 032/240/KEP/BPKAD/2022 Tanggal 06-12-2022 sebesar Rp110.751.690,00;
 - Nomor 032/227/KEP/BPKAD/2022 Tanggal 07-11-2022 sebesar Rp771.530.710,00;
- (7) Pembayaran Utang Belanja pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan per 31 Desember 2022 sebesar Rp320.592.300,00, merupakan Pekerjaan Pembangunan Tugu Batas (Gapura Selamat Datang).

Rincian Mutasi saldo Gedung dan Bangunan pada masing-masing SKPD per 30 Juni 2022 dijelaskan pada **Lampiran 30**.

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.763.877.475.573,56. Jumlah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun 2021 sebesar Rp3.308.191.247.384,32 dibandingkan Tahun 2021 jumlah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp455.686.228.189,24 atau sebesar 13,77 % dari Tahun 2021. Rincian Mutasi Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan dijelaskan pada **Tabel 5.94**.

Tabel 5.94. Mutasi Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022

Saldo Awal	3.308.191.247.384,32
Mutasi Tambah	
Belanja Modal	473.933.353.367,00
Belanja Barang dan Jasa (atribusi & pemeliharaan) serta BTT yang memenuhi Kapitalisasi	2.173.335.000,00

- Atribusi	
- Reklas dari Belanja Barang & Jasa serta BTT	
Hibah (Hibah dari pihak lain)	1.227.878.300,00
Pengakuan Utang Belanja	5.502.003.093,71
Reklasifikasi dari KDP ke Aset Tetap	400.839.010,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke KDP	0,00
Reklasifikasi antar Rekening	4.394.934.092,00
Koreksi lainnya	2.891.107,00
Koreksi Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0,00
Mutasi masuk antar SKPD	2.140.971.936,00
Jumlah Mutasi Tambah	489.776.205.905,71
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi KDP	23.557.647.288,14
Belanja Modal Tidak Menjadi Aset	0,00
Barang yang Diserahkan ke Masyarakat	0,00
Persediaan	0,00
Reklasifikasi antar Rekening	244.403.000,00
Aset Lainnya-Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	141.681.100,00
Reklas ke Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud	0,00
Belanja dibawah nilai kapitalisasi	0,00
Koreksi lainnya	6.530.398.366,48
Mutasi keluar antar SKPD	2.140.971.936,00
Penghapusan	1.474.876.025,85
Pembayaran Utang Belanja	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	34.089.977.716,47
Saldo akhir	3.763.877.475.573,56

Terkait mutasi saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022, dijelaskan sebagai berikut.

- a) Saldo Awal per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.308.191.247.384,32 yang terdapat pada 34 (tiga puluh empat) SKPD ;
- b) Mutasi Tambah per 31 Desember 2022 sebesar Rp489.776.205.905,71, terdiri dari :
 - (1) Belanja Modal per 31 Desember 2022 sebesar Rp473.933.353.367,00 yang terdapat pada 10 (sepuluh) SKPD.
 - (2) Belanja Barang dan Jasa (atribusi & pemeliharaan) serta BTT yang memenuhi Kapitalisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.173.335.000,00 yang terdapat pada 8 (delapan) SKPD .
 - (a) Atribusi pada Sekretariat Daerah sebesar Rp50.000.000,00;
 - (b) Atribusi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp600.207.000,00;
 - (c) Atribusi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp835.150.000,00;
 - (d) Atribusi pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan sebesar Rp1.500.000,00;
 - (e) Atribusi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp97.956.000,00;
 - (f) Atribusi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp411.921.000,00;
 - (g) Atribusi pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sebesar Rp154.101.000,00;

- (h) Atribusi pada Dinas Pariwisata sebesar Rp22.500.000,00;
 - (3) Hibah (Hibah dari pihak lain) per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.227.878.300,00 yang terdapat pada 2 (dua) SKPD berikut ini :
 - (a) Hibah (Hibah dari pihak lain) pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp1.226.924.400,00, merupakan hibah Jalan dan Drainase Perumahan Penghijauan Residence.
 - (b) Hibah (Hibah dari pihak lain) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp953.900,00, merupakan Hibah 1 Unit Bangunan WC Permanen (Swadaya) dari Pemerintah Desa Tanjung Kurung Kecamatan Kikim Selatan untuk SDN 13 Kikim Selatan Kelas Jauh.
 - (4) Pengakuan Utang Belanja per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.502.003.093,71 yang terdapat pada 2 (dua) SKPD , terdiri dari :
 - (a) Pengakuan Utang Belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp5.485.746.136,21;
 - (b) Pengakuan Utang Belanja pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp16.256.957,50.
 - (5) Reklasifikasi dari KDP ke Aset Tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 Desember 2022 sebesar Rp400.839.010,00;
 - (6) Reklasifikasi antar rekening per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.394.934.092,00 yang terdapat pada 4 (empat) SKPD berikut ini :
 - (a) Reklasifikasi antar rekening pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp480.803.000,00, merupakan reklas dari KIB C;
 - (b) Reklasifikasi antar rekening pada Dinas Kesehatan sebesar Rp3.439.508.643,00, merupakan:
 - Reklas dari KIB B sebesar Rp1.299.600.000,00,
 - Reklas dari KIB C sebesar Rp2.139.908.643,00,
 - (c) Reklasifikasi antar rekening pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp421.606.100,00, merupakan
 - Reklas dari KIB C sebesar Rp412.806.100,00,
 - Reklas dari KIB E sebesar Rp8.800.000,00,
 - (d)Reklasifikasi antar rekening pada Dinas Sosial sebesar Rp53.016.349,00, merupakan reklas dari KIB C;
 - (7) Koreksi lainnya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.891.107,00, merupakan denda atas keterlambatan pekerjaan pekerjaan rekontruksi jembatan penghubung antara Desa Purnama Sari dengan Desa Sidomakmur Kecamatan Kikim Barat.
 - (8) Mutasi masuk antar SKPD pada per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.140.971.936,00.
- b) Mutasi Kurang per 31 Desember 2022 sebesar Rp34.089.977.716,47 terdiri dari :

- (1) Reklasifikasi KDP per 31 Desember 2022 sebesar Rp23.557.647.288,14 yang terdapat pada 2 (dua) SKPD berikut ini:
 - (a) Reklasifikasi KDP pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp22.742.476.990,64;
 - (b) Reklasifikasi KDP pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sebesar Rp815.170.297,50.
- (2) Reklasifikasi antar rekening pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan per 31 Desember 2022 sebesar Rp244.403.000,00, merupakan reklas ke KIB C;
- (3) Aset Lainnya - Aset Kondisi Rusak Berat / Hilang / Lainnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp141.681.100,00;
- (4) Koreksi lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.530.398.366,48, merupakan kekurangan volume.
- (5) Mutasi keluar antar SKPD per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.140.971.936,00 yang terdapat pada 2 (dua) SKPD .
- (6) Penghapusan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.474.876.025,85 yang terdapat pada 3 (tiga) SKPD berikut ini :
 - (a) Penghapusan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp824.832.800,00, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor 032/166/KEP/BPKAD/2022 Tanggal 23-08-2022;
 - (b) Penghapusan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp400.839.010,00, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor 032/166/KEP/BPKAD/2022 Tanggal 23-08-2022;
 - (c) Penghapusan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp249.204.215,85, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor 032/262/KEP/BPKAD/2022 Tanggal 29-12-2022.

Rincian Mutasi saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada masing-masing SKPD per 31 Desember 2022 dijelaskan pada **Lampiran 31**.

5) Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp100.949.863.924,62. Jumlah Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2021 sebesar Rp97.111.428.578,62 dibandingkan Tahun 2021 jumlah Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp3.838.435.346,00 atau sebesar 3,95% dari Tahun 2021. Rincian Mutasi Saldo Aset Tetap Lainnya dijelaskan pada **Tabel 5.95**.

Tabel 5.95. Mutasi Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022

Saldo Awal	97.111.428.578,62
Mutasi Tambah	
Belanja Modal	10.075.301.545,00
Belanja Barang dan Jasa (atribusi & pemeliharaan) serta BTT yang memenuhi Kapitalisasi	134.230.900,00

- Atribusi	0,00
- Reklas dari Belanja Barang & Jasa serta BTT	0,00
Hibah (Hibah dari pihak lain)	0,00
Pengakuan Utang Belanja	0,00
Reklasifikasi dari KDP ke Aset Tetap	91.640.008,90
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke KDP	0,00
Reklasifikasi antar Rekening	0,00
Koreksi lainnya	5.552.066,00
Koreksi Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0,00
Mutasi masuk antar SKPD	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	10.306.724.519,90
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi KDP	0,00
Belanja Modal Tidak Menjadi Aset	213.226.200,00
Barang yang Diserahkan ke Masyarakat	0,00
Persediaan	0,00
Reklasifikasi antar Rekening	5.145.830.465,00
Aset Lainnya-Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	0,00
Reklas ke Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud	1.017.592.500,00
Belanja dibawah nilai kapitalisasi	0,00
Koreksi lainnya	0,00
Mutasi keluar antar SKPD	0,00
Penghapusan	91.640.008,90
Pembayaran Utang Belanja	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	6.468.289.173,90
Saldo akhir	100.949.863.924,62

Terkait mutasi saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022, dijelaskan sebagai berikut:

- a) Saldo Awal per 31 Desember 2021 sebesar Rp97.111.428.578,62 yang terdapat pada 22 (dua puluh dua) SKPD;
- b) Mutasi Tambah per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.306.724.519,90, terdiri dari:
 - (1) Belanja Modal per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.075.301.545,00 yang terdapat pada 7 (tujuh) SKPD;
 - (2) Belanja Barang dan Jasa (atribusi & pemeliharaan) serta BTT yang memenuhi Kapitalisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp134.230.900,00;
 - (3) Reklasifikasi dari KDP ke Aset Tetap pada Sekretariat Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp91.640.008,90;

- (4) Koreksi lainnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.552.066,00.
- c) Mutasi Kurang per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.468.289.173,90, terdiri dari :
 - (1) Belanja Modal Tidak Menjadi Aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp213.226.200,00 yang terdapat pada 2 (dua) SKPD berikut ini :
 - (a) Belanja Modal Tidak Menjadi Aset pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp137.857.200,00;
 - (b) Belanja modal tidak menjadi aset pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp75.369.000,00;
 - (2) Reklasifikasi antar Rekening per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.145.830.465,00 yang terdapat pada 3 (tiga) SKPD berikut ini :
 - (a) Reklasifikasi antar Rekening pada Sekretariat Daerah sebesar Rp115.900.000,00, merupakan reklas ke KIB B;
 - (b) Reklasifikasi antar Rekening pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp5.017.225.465,00, merupakan :
 - Reklas ke KIB B sebesar Rp5.008.425.465,00,-;
 - Reklas ke KIB D sebesar Rp8.800.000,00;
 - (c) Reklasifikasi antar Rekening pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp12.705.000,00, merupakan reklas ke KIB B;
 - (3) Reklas ke aset lainnya - aset tidak berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.017.592.500,00 yang terdapat pada 4 (empat) SKPD berikut ini :
 - (a) Reklas ke aset lainnya - aset tidak berwujud pada Sekretariat Daerah sebesar Rp347.953.000,00;
 - (b) Reklas ke aset lainnya - aset tidak berwujud pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp477.262.000,00;
 - (c) Reklas ke aset lainnya - aset tidak berwujud pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp139.027.500,00;
 - (d) Reklas ke aset lainnya - aset tidak berwujud pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp53.350.000,00;
 - (4) Penghapusan pada Sekretariat Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp91.640.008,90, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor 032/166/KEP/BPKAD/2022 Tanggal 23-08-2022.

Rincian Mutasi saldo Aset Tetap Lainnya pada masing-masing SKPD per 31 Desember 2022 dijelaskan pada **Lampiran 32**.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp24.789.789.018,14. Jumlah Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Tahun 2021 sebesar Rp2.021.079.073,90 dibandingkan Tahun 2021 jumlah Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp22.768.709.944,24 atau sebesar 1.126,56 % dari Tahun

2021. Rincian Mutasi Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan dijelaskan pada Tabel 5.96.

Tabel 5.96. Mutasi Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022

Saldo Awal	2.021.079.073,90
Mutasi Tambah	
Belanja Modal	0,00
Belanja Barang dan Jasa (atribusi & pemeliharaan) serta BTT yang memenuhi Kapitalisasi	0,00
- Atribusi	0,00
- Reklas dari Belanja Barang & Jasa serta BTT	0,00
Hibah (Hibah dari pihak lain)	0,00
Pengakuan Utang Belanja	0,00
Reklasifikasi dari KDP ke Aset Tetap	0,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke KDP	23.557.647.288,14
Reklasifikasi antar Rekening	0,00
Koreksi lainnya	0,00
Koreksi Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0,00
Mutasi masuk antar SKPD	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	23.557.647.288,14
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi KDP	788.937.343,90
Belanja Modal Tidak Menjadi Aset	0,00
Barang yang Diserahkan ke Masyarakat	0,00
Persediaan	0,00
Reklasifikasi antar Rekening	0,00
Aset Lainnya-Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	0,00
Reklas ke Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud	0,00
Belanja dibawah nilai kapitalisasi	0,00
Koreksi lainnya	0,00
Mutasi keluar antar SKPD	0,00
Penghapusan	0,00
Pembayaran Utang Belanja	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	788.937.343,90
Saldo akhir	24.789.789.018,14

Terkait mutasi saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022, dijelaskan sebagai berikut:

- a) Saldo Awal per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.021.079.073,90 yang terdapat pada 5 (lima) SKPD;
- b) Mutasi Tambah per 31 Desember 2022 sebesar Rp23.557.647.288,14, yaitu reklasifikasi dari Aset Tetap ke KDP pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp22.742.476.990,64, dan reklasifikasi dari Aset Tetap ke KDP pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sebesar Rp815.170.297,50;
- c) Mutasi Kurang per 31 Desember 2022 sebesar Rp788.937.343,90, terdiri dari :
 - (1) Reklasifikasi KDP per 31 Desember 2022 sebesar Rp788.937.343,90 yang terdapat pada 4 (empat) SKPD berikut ini :
 - (a) Reklasifikasi KDP pada Sekretariat Daerah sebesar Rp91.640.008,90;

- (b) Reklasifikasi KDP pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp400.839.010,00;
- (c) Reklasifikasi KDP pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp102.858.325,00;
- (d) Reklasifikasi KDP pada Dinas Kesehatan sebesar Rp193.600.000,00.

Rincian Mutasi saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan masing-masing SKPD per 31 Desember 2022 dijelaskan pada **Lampiran 33**.

7) Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar (Rp3.000.359.989.199,76). Jumlah tersebut merupakan akumulasi penyusutan Aset Tetap. Rincian pada **Tabel 5.97**.

Tabel 5.97. Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022

Akumulasi per Aset Tetap	Saldo 31/12/2021 (Rp)	Mutasi Tahun 2022		Saldo 31/12/2022 (Rp)
		Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	
Peralatan dan Mesin	(522.808.330.724,52)	(95.416.876.629,13)	(44.581.744.032,58)	(573.643.463.321,07)
Gedung dan Bangunan	(177.143.620.520,30)	(24.930.504.542,00)	(9.766.272.047,00)	(192.307.853.015,30)
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(1.849.388.332.195,00)	(385.775.511.439,39)	(755.170.771,00)	(2.234.408.672.863,39)
Jumlah	(2.549.340.283.439,82)	(506.122.892.610,52)	(55.103.186.850,58)	(3.000.359.989.199,76)

Rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 masing-masing SKPD Dijelaskan pada **Lampiran 34**.

e. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp448.461.878.449,67. Sedangkan untuk Saldo Aset Lainnya pada Tahun 2021 sebesar Rp82.650.922.433,68, sehingga untuk Saldo Aset Lainnya pada Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp365.810.956.015,99 atau 442,60% dibanding Tahun 2021. Saldo Aset Lainnya disajikan secara neto di Neraca setelah nilai bruto dikurangi dengan akumulasi penyusutan/amortisasi. Hal ini disebabkan SIMDA secara otomatis menghasilkan nilai aset lainnya secara neto. Saldo Aset Lainnya dijelaskan pada **Tabel 5.98**.

Tabel 5.98. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022

No	Aset Lainnya	Saldo 31/12/2021 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo 31/12/2022 (Rp)
1	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tuntutan Ganti Rugi	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
3	Aset Tak Berwujud	2.707.051.351,62	1.017.592.500,00	0,00	3.724.643.851,62
4	Aset Lain-lain	144.850.632.074,70	37.437.003.340,52	25.990.587.722,57	156.297.047.692,65
5	Akumulasi Amortisasi Tak Berwujud	(1.768.931.601,62)	(257.305.000,00)	0,00	(2.026.236.601,62)
6	Akumulasi Penyusutan Aset Lain - Lain	(63.137.829.391,02)	(6.201.019.817,96)	(1.180.639.330,00)	(68.158.209.878,98)
7	Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	358.619.633.386,00	0,00	358.619.633.386,00
	Jumlah	82.650.922.433,68	390.620.904.408,56	24.809.948.392,57	448.461.878.449,67

(1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

Tagihan Piutang Penjualan Angsuran per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

(2) Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.000.000,00. Jumlah tersebut merupakan bagian TGR yang telah didukung dengan SKTJM/SK dan pembebanan yang belum jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan dari tanggal Neraca. Rincian dijelaskan pada **Tabel 5.99**.

Tabel 5.99. Rincian Saldo Tuntutan Ganti Rugi

Keterangan	Jumlah(Rp)
Saldo Awal	0,00
Mutasi Tambah	
Tuntutan Ganti Rugi (jatuh tempo lebih dari 12 bln dari tgl Neraca) per 31 Desember 2022	5.000.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	5.000.000,00
Mutasi Kurang	
Reklas ke Tuntutan Ganti Rugi Tahun 2022 ke Bagian Lancar karena sudah jatuh tempo	
Jumlah Pengurangan	0,00
Saldo Akhir TGR per 31 Desember 2022	0,00

Rincian saldo Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dijelaskan pada **Lampiran 35**.

(3) Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.724.643.851,62, sedangkan pada Tahun 2021 sebesar Rp2.707.051.351,62 dibandingkan Tahun 2021 jumlah Aset Tak Berwujud tersebut pada Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp1.017.592.500,00 atau sebesar 37,59% dari Tahun 2021, dikarenakan ada penambahan belanja aset tak berwujud pada 4 SKPD yaitu Dinas Pendidikan, Sekretariat Daerah, Badan Pendapatan Daerah dan Badan Perencanaan Daerah.

Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud berdasarkan harga perolehan dijelaskan pada **Lampiran 36** dan Rincian Perhitungan Saldo Aset Tak Berwujud secara lengkap dijelaskan pada **Lampiran 37**.

(4) Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp156.297.047.692,65 sedangkan pada Tahun 2021 sebesar Rp144.850.632.074,70 dibandingkan Tahun 2021 jumlah Aset Lain-lain pada Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp11.446.415.617,95 atau sebesar 7,90% dari Tahun 2021. Rincian saldo aset lain-lain dijelaskan pada **Tabel 5.100**.

Tabel 5.100. Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Keterangan	Tahun 2022(Rp)	Tahun 2021(Rp)
1	Aset Lain-lain berupa aset yang diusulkan penghapusan baik barang rusak berat atau yang akan diserahkan ke pihak lain	139.909.759.430,20	124.580.768.308,23
2	Aset lain-lain terkait dengan penyerahan kewenangan P2D	5.251.181.780,33	10.771.620.665,22
3	Investasi Sapi Gaduhan	0,00	0,00
4	Aset Gedung dan Bangunan	0,00	89.447.500,00
5	Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	188.856.000,00	188.856.000,00
6	Aset Lain-Lain berupa kerugian daerah yang belum didukung dengan SKTJM atau SK Ketetapan	9.379.908.006,15	7.913.596.209,25
7	Kas Yang Dibatasi Penggunaannya	1.567.342.475,97	1.306.343.392,00
	Jumlah	156.297.047.692,65	144.850.632.074,70

Rincian masing-masing Aset Lain-Lain dijelaskan sebagai berikut:

- (a) Aset Lain-Lain berupa aset yang diusulkan penghapusan baik barang rusak berat atau yang akan diserahkan ke pihak lain

Saldo Aset Lain-Lain berupa aset yang diusulkan penghapusan baik barang rusak berat atau yang akan diserahkan ke pihak lain per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp139.909.759.430,20. Jumlah tersebut terdiri dari Aset yang akan diserahkan ke Kabupaten Empat Lawang sebesar Rp119.965.958.326,44 dan Aset Tetap yang diusulkan penghapusan sebesar Rp19.943.801.103,76. Rincian atas aset lain-lain berupa aset yang diusulkan penghapusan dikarenakan kondisi rusak berat dan diserahkan ke pihak lain dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Aset yang Diserahkan ke Kabupaten Empat Lawang

Saldo Aset yang akan diserahkan ke Pemkab Empat Lawang per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp119.965.958.326,44 terdiri dari aset tetap sebesar Rp119.425.888.076,44 dan Eks Investasi Non Permanen/tagihan kemitraan sebesar Rp540.070.250,00.

Nilai aset tetap yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang sebesar Rp119.425.888.076,44 dicatat sebesar nilai perolehan. Rincian aset tetap yang diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dijelaskan pada **Tabel 5.101**.

Tabel 5.101. Aset Tetap yang Akan Diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Empat Lawang

No.	Keterangan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Aset berupa Tanah yang digunakan Kabupaten Empat Lawang namun belum dilakukan berita acara serah terima.	25.212.458.260,00	25.212.458.260,00
2	Aset berupa Peralatan dan Mesin yang digunakan Kabupaten Empat Lawang namun belum dilakukan berita acara serah terima.	544.023.547,00	544.023.547,00
3	Aset berupa Gedung dan Bangunan yang digunakan Kabupaten Empat Lawang namun belum dilakukan berita acara serah terima.	37.009.961.656,44	37.009.961.656,44
4	Aset berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan yang digunakan Kabupaten Empat Lawang namun belum dilakukan berita acara serah terima.	55.819.855.400,00	55.819.855.400,00
5	Aset berupa Aset Tetap Lainnya yang digunakan Kabupaten Empat Lawang namun belum dilakukan berita acara serah terima.	839.589.213,00	839.589.213,00
	Jumlah	119.425.888.076,44	119.425.888.076,44

Sampai dengan 31 Desember 2022, nilai sisa Aset Tetap yang akan diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Empat Lawang sebesar Rp119.425.888.076,44 masih dalam proses penyerahan, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lahat masih menunggu konfirmasi penandatanganan dari Pemerintah Kabupaten Empat Lawang atas Berita Acara Serah Terima (BAST) Aset dari Pemerintah Kabupaten Lahat ke Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

Selain Aset Tetap yang akan diserahkan ke Kabupaten Empat Lawang, juga terdapat Aset Lain-Lain (Eks Investasi Non permanen/tagihan kemitraan) sebesar Rp540.070.250,00. Rincian dijelaskan pada **Tabel 5.102**.

**Tabel 5.102 Aset Lain-lain-Eks Investasi Non Permanen/Tagihan
Kemitraan yang Akan Diserahkan ke Pemerintah
Kabupaten Empat Lawang**

No.	Keterangan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Aset Lainnya (Kemitraan <i>Hand Tractor</i>)	192.160.250,00	192.160.250,00
2	Investasi non Permanen, terdiri dari:		
	a) Dana Bergulir (Dinas Koperasi dan UKM)	345.350.000,00	345.350.000,00
	b) Dana Bergulir (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	2.560.000,00	2.560.000,00
Jumlah		540.070.250,00	540.070.250,00

(2) Aset Tetap yang Diusulkan Penghapusan

Saldo Aset Tetap yang diusulkan penghapusan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp19.943.801.103,76. Rincian aset tetap yang diusulkan penghapusan dijelaskan pada **Tabel 5.103**.

Tabel 5.103. Saldo Aset Tetap yang Diusulkan Penghapusan

No	Keterangan	Saldo 31/12/2021 (Rp)	Koreksi (Rp)	Penghapusan (Rp)	Saldo 31/12/2022 (Rp)
1	Eks. Peralatan dan Mesin	4.558.309.981,79	4.547.301.899,96	(1.011.832.681,99)	8.093.779.199,76
2	Eks. Gedung dan Bangunan	0,00	26.499.800.039,17	(14.706.278.135,17)	11.793.521.904,00
3	Eks. Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00		0,00
4	Eks. Aset Tetap Lainnya	56.500.000,00	0,00	0,00	56.500.000,00
5	Eks. Lelang Batal 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		4.614.809.981,79	31.047.101.939,13	(15.718.110.817,16)	19.943.801.103,76

Penjelasan atas aset tetap yang diusulkan penghapusan dijelaskan pada **Tabel 5.104**.

Tabel 5.104 Rincian Aset Tetap yang Diusulkan Penghapusan

No	Rincian	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang diusulkan untuk penghapusan karena kondisi rusak berat. Per 31 Desember 2022 sudah dihapuskan sebesar Rp1.011.832.681,99) dengan SK Penghapusan : - SK Penghapusan Nomor 430/19/KEP/VI/2006 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp245.700.000,00 - SK Penghapusan Nomor 979/227/KEP/DPPKAD/2013 sebesar Rp220.600.000,00 - SK Penghapusan Nomor 46/KEP/IX/2003, tanggal 15 Januari 2003 sebesar Rp61.000.000,00 - SK Penghapusan Nomor 032/260/KEP/BPKAD/2022, tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp8.500.000,00 - SK Penghapusan Nomor 082/KEP/IX/2022, tanggal 04 Maret 2022 sebesar Rp87.500.000,00	8.093.779.199,76	4.558.309.981,79
	- SK Penghapusan Nomor 032/287/KEP/BPKAD/2022, sebesar Rp42.750.000,00 - SK Penghapusan Nomor 032/261/KEP/BPKAD/2022, sebesar Rp13.169.430,99 - SK Penghapusan Nomor 032/268/KEP/BPKAD/2022, sebesar Rp207.142.967,00 - SK Penghapusan Nomor 032/181/KEP/BPKAD/2022, tanggal 16 September 2022 sebesar Rp107.195.284,00 - SK Penghapusan Nomor 032/259/KEP/BPKAD/2022, tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp18.275.000,00 - Usul Penghapusan pada BPKAD sebesar Rp132.037.934,00 - Usul Penghapusan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp37.600.000,00 karena Rusak Berat		

No	Rincian	Tahun 2022	Tahun 2021
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang terindikasi telah dimanfaatkan oleh pihak ketiga	11.793.521.904,00	
	- SK Penghapusan Nomor 032/258/KEP/BPKAD/2022/AL, sebesar Rp5.327.049.701,00		
	- SK Penghapusan Nomor 032/258/KEP/BPKAD/2022/AL, sebesar Rp157.433.301,00		
	- SK Penghapusan Nomor 032/290/KEP/BPKAD/2022, sebesar Rp100.513.359,00		
	- SK Penghapusan Nomor 032/366/KEP/BPKAD/2022, sebesar Rp89.447.500,00		
	- SK Penghapusan Nomor 032/289/KEP/BPKAD/2022, sebesar Rp4.620.040.169,98		
	- SK Penghapusan Nomor 800/3091/Sekret/P&K/2022, sebesar Rp2.295.000.000,00		
	- SK Penghapusan Nomor 032/239/KEP/BPKAD/2022, tanggal 6 Juni 2022, sebesar Rp95.614.600,00		
	- SK Penghapusan Nomor 032/238/KEP/BPKAD/2022, tanggal 6 Juni 2022, sebesar Rp1.661.197.704,19		
	- SK Penghapusan Nomor 032/KEP/BPKAD/2022, tanggal 29 Desember 2022, sebesar Rp359.981.800,00		
3	Jumlah usul penghapusan per 31 Desember 2018 sebesar Rp186.170.000,00 direklas ke Gedung Bangunan sebesar Rp89.670.000,00 sehingga menjadi Rp96.500.000,00 (Buku Neraca Kualitas Lingkungan Daerah Rp40.000.000,00, Alat Olah Raga Rp40.000.000,00 dan Ikan Arwana Rp16.500.000,00), dari jumlah tersebut dihapus sebesar Rp40.000.000,00 dengan SK Penghapusan No.900/272/KEP/BKD/2019 yang merupakan Peralatan Olah Raga Rp40.000.000,00 .	56.500.000,00	56.500.000,00
	Jumlah	19.943.801.103,76	4.614.809.981,79

(b) Aset Lain-lain terkait dengan penyerahan kewenangan Personil, Prasarana/Sarana dan Dokumen (P2D)

Aset Lain-lain terkait dengan penyerahan kewenangan P2D merupakan aset yang akan diserahkan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Aset yang akan diserahkan tersebut terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.251.181.780,33 dengan penjelasan sebagai berikut:

(1) Dinas Pendidikan

Saldo Aset yang akan diserahkan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pendidikan adalah sebesar Rp5.251.181.780,33. Rincian pada **Tabel 5.105**.

Tabel 5.105. Aset P2D Dinas Pendidikan

No	Rincian	31 Desember 2021	Mutasi Tambah	31 Desember 2022
1	Perhitungan mutasi aset lain lain BOS 2015			-
	Saldo awal	4.646.365.729,00	0,00	4.646.365.729,00
	Reklas ke aset tetap (Belanja modal BOS SD dan SMP Negeri)	(3.260.336.951,00)	0,00	(3.260.336.951,00)
	Koreksi Bukan Aset	(134.061.483,00)	0,00	(134.061.483,00)
	Jumlah	1.251.967.295,00	0,00	1.251.967.295,00
2	Aset P3D dalam proses penghapusan			
	Tanah	0,00	0,00	0,00

No	Rincian	31 Desember 2021	Mutasi Tambah	31 Desember 2022
	Peralatan dan Mesin	351.470.760,00	0,00	351.470.760,00
	Bangunan dan Gedung	0,00	0,00	0,00
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	809.500.000,00	0,00	809.500.000,00
	Aset Tetap Lainnya	217.619.119,97	0,00	217.619.119,97
	Jumlah	1.378.589.879,97	0,00	1.378.589.879,97
3	Rehab dan Pemb RKB 2016 (Gedung & Bangunan)	2.620.624.605,36	0,00	2.620.624.605,36
	Jumlah	5.251.181.780,33	0,00	5.251.181.780,33

Mutasi Aset Lain-Lain BOS 2015 sebesar Rp1.251.967.295,00 pada Jumlah I Tabel 5.105 diatas terdiri dari Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp64.980.000,00 dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.186.987.295,00, dan terdapat penambahan reklas dari Aset Tetap Tahun 2021 berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp145.200.000,00 dan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp193.600.000,00.

(2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 551/714/HUB/2018 dan Nomor PL.301/24/4/DJPD/2018 Pada Tahun 2018 dilakukan pelimpahan dan penyerahan Barang Milik Daerah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat kepada Direktorat Jendral Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan. Dari saldo awal Tanah dan Bangunan yang tercatat pada Aset Lain-Lain sebesar Rp5.520.438.884,89 dengan rincian Aset Tetap Tanah sebesar Rp4.183.135.000,00 dan Aset Tetap Bangunan dan Gedung sebesar Rp1.337.303.884,89, berdasarkan penghitungan cek fisik terdapat pembagian penyerahan dengan rincian pada **Tabel 5. 106**.

Tabel 5.106. Rekapitulasi Penyerahan Kewenangan P3D Ke Direktorat Jendral Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI

No	Uraian	Tanah	Gedung dan Bangunan	Total	Keterangan
1	Diserahkan ke Dirjen Perhubungan Darat Kemetrian Perhubungan RI	1.985.290.890,52	779.503.884,89	2.764.794.775,41	
2	Pemerintah Kabupaten Lahat	2.197.844.109,48	557.800.000,00	2.755.644.109,48	Reklas ke Aset Tetap
	Jumlah	4.183.135.000,00	1.337.303.884,89	5.520.438.884,89	

(c) Investasi Sapi Gaduhan

Saldo Investasi Sapi Gaduhan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 merupakan hasil reklasifikasi Investasi Non Permanen Lainnya. Jumlah tersebut diperoleh dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp697.164.764,31 dikurangi dengan investasi yang diragukan tertagih sebesar Rp697.164.764,31. Sampai dengan 31 Desember 2022, tidak terdapat validasi atas mutasi (tambah atau kurang) data Sapi Gaduhan tersebut di lapangan. Rincian Investasi yang Diragukan Tertagih dijelaskan pada **Tabel 5.107**.

Tabel 5.107 Penyisihan Investasi Gaduhan yang Diragukan Tertagih

Pos Investasi Jangka Panjang Non Permanen yang Diragukan Tertagih	Investasi Jangka Panjang Non Permanen yang Diragukan Tertagih per 31/12/2021 (Rp)	Investasi Jangka Panjang Non Permanen yang Diragukan Tertagih Tahun 2020 (Rp)	Investasi Jangka Panjang Non Permanen yang Diragukan Tertagih per 31/12/2022 (Rp)
Investasi Non Permanen Lainnya-Ternak Sapi Gaduhan pada Dinas Peternakan dan Perikanan	697.164.764,31	0,00	697.164.764,31

Terkait Rincian Investasi Sapi Gaduhan dijelaskan pada **Lampiran 38** serta Investasi Sapi Gaduhan yang diragukan tertagih dijelaskan pada **Lampiran 39**.

(d) Aset Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lahat tanggal 30 Desember tahun 2022 nomor 032/290/KEP/BPKAD/2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Lahat tahun 2022 sebesar Rp89.447.500,00 Jumlah tersebut merupakan Aset Tetap berupa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagar Gunung hasil reklas dari Aset Tetap - Konstruksi Dalam Pengerjaan.

(e) Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 sebesar Rp188.856.000,00. Jumlah tersebut merupakan Aset Tetap berupa Tembok Penahan Tebing Markas Komando Polres Lahat hasil reklas dari Aset Tetap - Konstruksi Dalam Pengerjaan.

(f) Aset Lain-Lain berupa kerugian daerah yang belum didukung dengan SKTJM atau SK Ketetapan

Aset Lain-Lain berupa Kerugian daerah yang belum didukung dengan SKTJM atau SK Ketetapan Tahun 2022 sebesar Rp9.379.908.006,15 sesuai Buletin Teknis SAP Nomor 20 yang diadopsi menjadi kebijakan akuntansi Kabupaten Lahat, pada kondisi adanya kerugian daerah yang belum didukung dengan SKTJM atau SK Ketetapan disajikan sebagai Aset Lain-lain. Rincian perhitungan dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Awal 1 Januari 2021	7.913.596.209,25
Penambahan TGR 2022	6.128.480.708,42
Pelunasan TGR selama Tahun 2022	(4.221.325.344,77)
koreksi Double catat	(440.843.566,75)
Saldo Akhir 31 Desember 2022	9.379.908.006,15

Rincian Aset Lain – Lain TGR dijelaskan pada **Lampiran 40**.

(g) Kas Dibatasi Penggunaannya

Saldo Kas dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.567.342.475,97, sedangkan pada Tahun 2021 sebesar Rp1.306.343.392,00. Dibandingkan pada Tahun 2021, jumlah Kas Dibatasi Penggunaannya pada Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp260.999.083,97 atau 19,98% dibandingkan Tahun 2021. Kas Dibatasi Penggunaannya merupakan rekening khusus yang digunakan sebagai

penampungan atas dana Jaminan Reklamasi dan Pertambangan pada BRI Cabang Lahat, Nomor Rekening 40-01-000584-30-3. Saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.567.342.475,97, dijelaskan pada **Table 5.108**.

Tabel 5.108. Saldo Kas Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Setoran bahan Galian Golongan C	1.161.706.636,00	0,00	0,00	1.161.706.636,00
2	Setoran Bunga Deposito Dana Jaminan Kesungguhan Bahan Galian Gol C (Tahun 2013, yang masih tertinggal di rekening titipan BRI Cabang Lahat)	0,00	235.617.450,97	0,00	235.617.450,97
3	Bunga Bank	169.796.068,00	25.803.242,00		195.599.310,00
4	Biaya Adm Bank	(25.159.312,00)		421.609,00	(25.580.921,00)
	Jumlah	1.306.343.392,00	261.420.692,97	421.609,00	1.567.342.475,97

(5) Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.026.236.601,62, sedangkan pada Tahun 2021 sebesar Rp1.768.931.601,62 dibandingkan Tahun 2021 jumlah Amortisasi Aset Tak Berwujud tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp257.305.000,00 atau sebesar 14,55% dari Tahun 2021. Rincian Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 dijelaskan pada **Lampiran 41**.

(6) Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp68.158.209.878,98. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya dijelaskan pada **Tabel 5.109**.

Tabel 5.109. Akumulasi Penyusutan pada Aset Lain-Lain

No.	Jenis Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31/12/2021	Penambahan Akumulasi Penyusutan Reklas dari Aset Tetap	Pengurangan Akumulasi Penyusutan Lain-lain (Penghapusan)	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31/12/2022
1	2	3	4	5	6 = (3 + 4 + 5)
1	Aset Tetap yang diserahkan ke Kabupaten Empat Lawang				
	a. Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. Peralatan dan Mesin	(544.023.547)	0,00	0,00	(544.023.547)
	c. Gedung dan Bangunan	(15.366.361.311,89)	0,00	0,00	(15.366.361.311,89)
	d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	(42.355.129.243)	0,00	0,00	(42.355.129.243)
	e. Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah 1	(58.265.514.100,89)	0,00	0,00	(58.265.514.100,89)
2	Aset Tetap yang diusulkan Penghapusan				
	Eks. Peralatan dan Mesin	(4.500.091.383,13)	(3.609.385.286,96)	(976.113.141,00)	(7.133.363.529,09)
	Eks. Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Eks. Jalan, Irigasi dan	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Jenis Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31/12/2021	Penambahan Akumulasi Penyusutan Reklas dari Aset Tetap	Pengurangan Akumulasi Penyusutan Lain-lain (Penghapusan)	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31/12/2022
	Jaringan				
	Eks. Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Eks. Lelang Batal 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah 2	(4.500.091.383,13)	(3.609.385.286,96)	(976.113.141,00)	(7.133.363.529,09)
3	Kantor Urusan Agama (KUA)	(3.577.898,00)	0,00	(3.577.898,00)	0,00
4	Tembok Penahan Tebing	(37.771.200,00)	-		(37.771.200,00)
5	Aset Lain - Lain yang terkait dengan penyerahan kewenangan P3D				
	a. Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. Peralatan dan Mesin	(83.584.226,00)	0,00	0,00	(83.584.226,00)
	c. Gedung dan Bangunan	(200.948.291,00)	(2.591.634.531,00)	(200.948.291,00)	(2.591.634.531,00)
	d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	(46.342.292,00)	0,00	0,00	(46.342.292,00)
	e. Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah 5	(330.874.809,00)	(2.591.634.531,00)	(200.948.291,00)	(2.721.561.049,00)
	Total	(63.137.829.391,02)	(6.201.019.817,96)	(1.180.639.330,00)	(68.158.209.878,98)

(7) Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) per 31 Desember 2022 sebesar Rp358.619.633.386,00 merupakan Saldo Kas Pemerintah Kabupaten Lahat atas penerimaan Dana Transfer dalam bentuk non tunai, *Treasury Deposit Facility* (TDF), yang merupakan fasilitas penyimpanan uang di Bank Indonesia (BI) dalam bentuk *overnight* pada Rekening Lain BI TDF-TKD Pemda, yang disediakan oleh Bendahara Umum Nasional (BUN) bagi Pemerintah Daerah. Dana tersebut ditransfer oleh Pemerintah Pusat ke Rekening Lain BI pada tanggal 30 Desember 2022, untuk pencairan ke Rekening kas Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat masih menunggu petunjuk teknis sesuai dengan aturan yang berlaku. Rincian Setara Kas per 31 Desember 2022 pada **Lampiran 12**.

5.3.2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Rincian kewajiban dijelaskan pada **Tabel 5.110**.

Tabel 5.110. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2023

No	Rincian	Tahun 2022(Rp)	Tahun 2021(Rp)
1	Kewajiban Jangka Pendek	11.981.997.005,04	7.894.398.690,09
2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
	Jumlah	11.981.997.005,04	7.894.398.690,09

a. Kewajiban Jangka Pendek

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 sebesar Rp11.981.997.005,04 sedangkan pada Tahun 2021 sebesar Rp7.894.398.690,09 dibandingkan Tahun 2021 jumlah saldo Kewajiban Jangka Pendek tersebut pada Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp4.087.598.314,94 sebesar 51,78% dari Tahun 2021. Rincian Kewajiban Jangka Pendek dijelaskan pada **Tabel 5.111**.

Tabel 5.111. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022

No	Rincian	Saldo 31/12/2021(Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo 31/12/2022 (Rp)
1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga	113.002.768,00	78.912.331,61	112.311.618,00	79.603.481,61
2	Pendapatan Diterima Dimuka	203.120.460,21	388.793.568,28	203.120.460,21	388.793.568,28
3	Utang Belanja	5.595.491.335,88	4.189.114.934,04	5.567.523.215,88	4.217.083.054,04
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.982.784.126,00	6.229.570.910,68	915.838.135,57	7.296.516.901,11
	Jumlah	7.894.398.690,09	10.886.391.744,61	6.798.793.429,66	11.981.997.005,04

Kewajiban Jangka Pendek dijelaskan sebagai berikut.

1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2022 Rp79.603.481,61. Rincian dijelaskan pada **Tabel 5.112**.

Tabel 5.112. Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga

No	Rincian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Utang PPh Pusat	359.701,00	46.288.036,00
2	Utang PPN Pusat	79.243.780,61	66.714.732,00
3	Utang Perhitungan Fihak Ketiga Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	79.603.481,61	113.002.768,00

2) Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2022 sebesar Rp388.793.568,28. Jumlah tersebut merupakan pendapatan diterima dimuka berupa pendapatan sewa tanah untuk ATM Bank Sumsel, sewa ruangan Kantor Kas Bank Sumsel Babel Pada Kantor RSUD Kabupaten Lahat, dan sewa tanah untuk ATM Bank BRI pada Kantor Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Lahat, serta Pendapatan Pajak Reklame Papan Billboard dan Sejenisnya dan Pendapatan Pajak Reklame Berjalan. Rincian Perhitungan Pendapatan Diterima Dimuka dijelaskan pada **Lampiran 42**.

3) Utang Belanja

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.217.083.054,04. Rincian dijelaskan pada **Tabel 5.113**.

Tabel 5.113. Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2022

No	Rincian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Utang Belanja Barang dan Jasa	4.217.083.054,04	5.595.491.335,88
	Jumlah	4.217.083.054,04	5.595.491.335,88

Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp4.217.083.054,04 adalah Utang Belanja pada 57 (lima puluh tujuh) SKPD. Mutasi Utang Belanja Barang dan Jasa selama Tahun 2022 dapat dirinci pada **Lampiran 43**.

Perincian pelunasan Utang Belanja Barang dan Jasa selama Tahun 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 44**.

4) Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.296.516.901,11 sedangkan pada Tahun 2021 Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya tercatat sebesar Rp1.982.784.126,00 Rincian mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya dijelaskan pada **Lampiran 45**. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 selengkapnya pada **Lampiran 46**.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

5.3.3. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.981.283.277.663,50. Saldo tersebut merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Lahat yang diperoleh dari total Aset dikurangi Kewajiban.

5.3.4. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.993.265.274.668,54. Jumlah tersebut diperoleh dari penjumlahan Kewajiban dengan Ekuitas.

5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

5.4.1 Kegiatan Operasional

a. Pendapatan-LO

Jumlah Pendapatan-LO Tahun 2022 sebesar Rp2.493.159.598.728,32. Terdapat perbedaan nilai antara jumlah Pendapatan pada LO dengan LRA sebesar Rp112.580.956.273,10. Realisasi Pendapatan-LO dijelaskan pada **Tabel 5.114**.

Tabel 5.114. Realisasi Pendapatan LO dan Pendapatan LRA Tahun 2022

No	Jenis Pajak	LO Tahun 2022 (Rp)	LRA Tahun 2022 (Rp)	Perbedaan (Rp)	LO Tahun 2021 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	178.592.548.488,54	172.372.518.276,85	6.220.030.211,69	154.259.101.662,31
2	Pendapatan Transfer	2.242.232.690.318,78	2.140.864.262.869,37	101.368.427.449,41	1.647.050.489.876,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	72.334.359.921,00	67.341.861.309,00	4.992.498.612,00	66.868.439.049,00
	Jumlah	2.493.159.598.728,32	2.380.578.642.455,22	112.580.956.273,10	1.868.178.030.587,31

Perincian masing-masing jenis Pendapatan-LO sebagai berikut.

1) Pendapatan Asli Daerah-LO

Jumlah PAD-LO Tahun 2022 adalah sebesar Rp178.592.548.488,54. Terdapat perbedaan antara jumlah PAD pada LO dengan LRA sebesar Rp6.220.030.211,69. Pendapatan Asli Daerah-LO dijelaskan pada **Tabel 5.115**.

Tabel 5.115. Realisasi Pendapatan Asli Daerah LO dan LRA Tahun 2022

No	Jenis Pajak	LO Tahun 2022 (Rp)	LRA Tahun 2022 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1	Pajak Daerah	56.508.304.236,60	54.945.020.430,50	1.563.283.806,10
2	Retribusi Daerah	7.335.416.534,81	6.139.795.839,00	1.195.620.695,81
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.332.338.704,08	9.348.611.221,40	3.983.727.482,68
4	Lain-lain PAD yang Sah	101.416.489.013,05	101.939.090.785,95	(522.601.772,90)
	Jumlah	178.592.548.488,54	172.372.518.276,85	6.220.030.211,69

Perincian masing-masing PAD-LO sebagai berikut.

a) Pajak Daerah-LO

Jumlah Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2022 sebesar Rp56.508.304.236,60. Terdapat perbedaan antara jumlah Pendapatan Pajak Daerah pada LO dengan LRA sebesar Rp1.563.283.806,10. Pendapatan Pajak Daerah-LO dijelaskan pada **Tabel 5.116**.

Tabel 5.116. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah LO dan LRA Tahun 2022

No	Jenis Pajak	LO Tahun 2022 (Rp)	LRA Tahun 2022 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1	Pajak Hotel	1.312.068.285,00	1.563.905.734,00	(251.837.449,00)
2	Pajak Losmen	66.744.797,00	66.744.797,00	0,00
3	Pajak Restoran dan Sejenisnya	3.415.509.341,00	3.351.409.539,00	64.099.802,00
4	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	118.547.100,00	106.734.300,00	11.812.800,00
5	Pajak Kantin dan Sejenisnya	42.055.000,00	38.135.000,00	3.920.000,00
6	Pajak Warung dan Sejenisnya	43.190.900,00	36.401.700,00	6.789.200,00
7	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.024.571.285,00	2.024.571.285,00	0,00
8	Pajak Tontonan Film	754.270.076,00	754.270.076,00	0,00
9	Pajak Pagelaran Kesenian / Music /	0,00	0,00	0,00

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun 2022

No	Jenis Pajak	LO Tahun 2022 (Rp)	LRA Tahun 2022 (Rp)	Perbedaan (Rp)
	Tari / Busana			
10	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	162.782.624,00	160.618.936,00	2.163.688,00
11	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	228.039.713,00	208.260.015,00	19.779.698,00
12	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	26.087.575,00	24.049.525,00	2.038.050,00
13	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	485.317.777,10	511.293.737,00	(25.975.959,90)
14	Pajak Reklame Kain	269.838.400,00	269.838.400,00	0,00
15	Pajak Reklame Melekat/Stiker	123.647.160,00	123.647.160,00	0,00
16	Pajak Reklame Berjalan	46.805.395,00	46.805.395,00	0,00
17	Pajak Reklame Peragaan	0,00	0,00	0,00
18	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	19.876.813.687,00	19.644.314.595,00	232.499.092,00
19	Pajak Parkir	447.693.200,00	432.093.200,00	15.600.000,00
20	Pajak Air Tanah	405.000,00	405.000,00	0,00
21	Pajak Sarang Burung Walet	96.250.000,00	96.250.000,00	0,00
22	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	14.812.801.388,50	14.812.801.388,50	0,00
23	Pajak Pasir dan Kerikil	0,00	0,00	0,00
24	Pajak Tanah Liat	0,00	0,00	0,00
25	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	5.932.582.677,00	4.450.185.892,00	1.482.396.785,00
26	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan - Pemindahan Hak	0,00	0,00	0,00
27	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan - Pemberian Hak Baru	6.222.282.856,00	6.222.284.756,00	(1.900,00)
	Jumlah	56.508.304.236,60	54.945.020.430,50	1.563.283.806,10

Perbedaan atas Pendapatan Pajak Daerah pada LO dengan LRA sebesar Rp1.563.283.806,10 terdiri dari:

- (1) Perbedaan pada Pajak Hotel sebesar (Rp251.837.449,00) merupakan pelunasan atas Piutang Pajak Tahun 2021;
- (2) Perbedaan pada Pajak Restoran dan Sejenisnya sebesar Rp64.099.802,00 adalah Piutang atas ketetapan pajak Tahun 2022 yang belum terbayar per 31 Desember 2022;
- (3) Perbedaan pada Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebesar Rp11.812.800,00 adalah Piutang atas ketetapan pajak Tahun 2022 yang belum terbayar per 31 Desember 2022;
- (4) Perbedaan pada Pajak Kantin dan Sejenisnya sebesar Rp3.920.000,00 adalah Piutang atas ketetapan pajak Tahun 2022 yang belum terbayar per 31 Desember 2022;
- (5) Perbedaan pada Pajak Warung dan Sejenisnya sebesar Rp6.789.200,00 adalah Piutang atas ketetapan pajak Tahun 2022 yang belum terbayar per 31 Desember 2022;
- (6) Perbedaan pada Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya sebesar Rp2.163.688,00 adalah Piutang atas ketetapan pajak Tahun 2022 yang belum terbayar per 31 Desember 2022;
- (7) Perbedaan pada Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan sebesar Rp19.779.698,00 adalah Piutang atas ketetapan pajak Tahun 2022 yang belum terbayar per 31 Desember 2022;

- (8) Perbedaan pada Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*) sebesar Rp2.038.050,00 adalah Piutang atas ketetapan pajak Tahun 2022 yang belum terbayar per 31 Desember 2022;
- (9) Perbedaan pada Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron sebesar (Rp25.975.959,90) merupakan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2021 yang sudah jatuh tempo sebesar Rp175.269.043,72 dan Pendapatan Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron yang belum jatuh tempo di 31 Desember 2022 sebesar (Rp222.486.515,62) serta Piutang atas ketetapan pajak Tahun 2022 yang belum terbayar per 31 Desember 2022 sebesar Rp21.241.512,00;
- (10) Perbedaan pada Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebesar Rp232.499.092,00 adalah Piutang atas ketetapan pajak Tahun 2022 yang belum terbayar per 31 Desember 2022;
- (11) Perbedaan pada Pajak Parkir sebesar Rp15.600.000,00 adalah Piutang atas ketetapan pajak Tahun 2022 yang belum terbayar per 31 Desember 2022;
- (12) Perbedaan pada Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebesar Rp1.482.396.785,00 adalah Piutang atas ketetapan pajak Tahun 2021 yang sampai dengan 31 Desember 2021 belum dibayar;
- (13) Perbedaan pada Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan - Pemindahan Hak sebesar (Rp1.900,00) merupakan Pelunasan Piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan - Pemberian Hak Baru Tahun 2021.

Rekonsiliasi Pendapatan Pajak-LO berupa kas dengan pendapatan non kas disajikan pada **Tabel 5.117**.

Tabel 5.117. Rekonsiliasi Pendapatan Pajak-LO Berupa Kas dengan Pendapatan Non Kas Tahun 2022

No.	Uraian	Pendapatan LRA (Rp)	Pembayaran Piutang (Rp)	Pendapatan-LO dari Tahun 2022 (Rp)	Pendapatan LO (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (3 - 4 + 5)
1	Pajak Hotel	1.563.905.734,00	251.837.449,00	0,00	1.312.068.285,00
2	Pajak Losmen	66.744.797,00	0,00	0,00	66.744.797,00
3	Pajak Restoran dan Sejenisnya	3.351.409.539,00	0,00	64.099.802,00	3.415.509.341,00
4	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	106.734.300,00	0,00	11.812.800,00	118.547.100,00
5	Pajak Kantin dan Sejenisnya	38.135.000,00	0,00	3.920.000,00	42.055.000,00
6	Pajak Warung dan Sejenisnya	36.401.700,00	0,00	6.789.200,00	43.190.900,00
7	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.024.571.285,00	0,00	0,00	2.024.571.285,00
8	Pajak Tontonan Film	754.270.076,00	0,00	0,00	754.270.076,00
9	Pajak Pagelaran Kesenian / Music / Tari / Busana	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	160.618.936,00	0,00	2.163.688,00	162.782.624,00
11	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	208.260.015,00	0,00	19.779.698,00	228.039.713,00
12	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (<i>Fitness Center</i>)	24.049.525,00	0,00	2.038.050,00	26.087.575,00
13	Pajak Reklame	511.293.737,00	0,00	(25.975.959,90)	485.317.777,10

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun 2022

No.	Uraian	Pendapatan LRA (Rp)	Pembayaran Piutang (Rp)	Pendapatan-LO dari Tahun 2022 (Rp)	Pendapatan LO (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (3 - 4 + 5)
	Papan/Billboard/Videotron/Megatron				
14	Pajak Reklame Kain	269.838.400,00	0,00	0,00	269.838.400,00
15	Pajak Reklame Melekat/Stiker	123.647.160,00	0,00	0,00	123.647.160,00
16	Pajak Reklame Berjalan	46.805.395,00	0,00	0,00	46.805.395,00
17	Pajak Reklame Peragaan	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	19.644.314.595,00	0,00	232.499.092,00	19.876.813.687,00
19	Pajak Parkir	432.093.200,00	0,00	15.600.000,00	447.693.200,00
20	Pajak Air Tanah	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
21	Pajak Sarang Burung Walet	96.250.000,00	0,00	0,00	96.250.000,00
22	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	14.812.801.388,50	0,00	0,00	14.812.801.388,50
23	Pajak Pasir dan Kerikil	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pajak Tanah Liat	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	4.450.185.892,00	0,00	1.482.396.785,00	5.932.582.677,00
26	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan - Pemindahan Hak	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan - Pemberian Hak Baru	6.222.284.756,00	1.900,00	0,00	6.222.282.856,00
	Jumlah	54.945.020.430,50	251.839.349,00	1.815.123.155,10	56.508.304.236,60

b) Retribusi Daerah-LO

Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2022 sebesar Rp7.335.416.534,81 dengan penjelasan sebagai berikut;

(1) Retribusi Jasa Umum-LO

Jumlah Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO Tahun 2022 sebesar Rp1.717.525.130,00. Retribusi Jasa Umum-LO dijelaskan pada **Tabel 5.118**.

Tabel 5.118. Pendapatan Retribusi Jasa Umum – LO Tahun 2022

No	Jenis Retribusi Jasa Umum	LO Tahun 2022 (Rp)	LRA Tahun 2022 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	471.953.000,00	303.101.000,00	168.852.000,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	172.983.000,00	172.983.000,00	0,00
3	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	462.692.000,00	462.692.000,00	0,00
4	Retribusi Los	28.750.000,00	26.750.000,00	2.000.000,00
5	Retribusi Kios	110.446.500,00	110.446.500,00	0,00
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	226.390.000,00	226.390.000,00	0,00
7	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0,00	0,00	0,00
8	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	244.310.630,00	244.310.630,00	0,00
	Jumlah	1.717.525.130,00	1.546.673.130,00	170.852.000,00

Perbedaan atas Pendapatan Retribusi Jasa Umum pada LO dengan LRA sebesar Rp170.852.000,00 terdiri dari:

- (a) Perbedaan sebesar Rp168.852.000,00 pada Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan pendapatan atas Retribusi Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan yang tidak disetorkan Ke Rekening Kas Daerah dan dibelanjakan langsung untuk beban operasional;

- (b) Perbedaan sebesar Rp2.000.000,00 pada Retribusi Los merupakan pendapatan pada Pasar Jarai pada Dinas Perdagangan yang tidak disetorkan ke Rekening Kas Daerah dan dibelanjakan langsung untuk beban operasional.

(2) Retribusi Jasa Usaha-LO

Jumlah Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO Tahun 2022 sebesar Rp3.603.712.090,81. Retribusi Jasa Usaha-LO dijelaskan pada Tabel 5.119.

Tabel 5.119. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha – LO Tahun 2022

No	Jenis Retribusi Jasa Usaha	LO Tahun 2022 (Rp)	LRA Tahun 2022 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	648.406.645,00	383.552.895,00	264.853.750,00
2	Retribusi Penyewaan Bangunan	164.072.445,81	198.610.000,00	(34.537.554,19)
3	Retribusi Pemakaian Laboratorium	681.605.000,00	526.785.000,00	154.820.000,00
4	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	745.796.000,00	598.863.500,00	146.932.500,00
5	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang Dikontrakan	901.400.000,00	425.000.000,00	476.400.000,00
6	Retribusi Terminal	18.010.000,00	18.010.000,00	0,00
7	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	409.350.000,00	393.050.000,00	16.300.000,00
8	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	28.395.000,00	28.395.000,00	0,00
9	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	6.677.000,00	6.677.000,00	0,00
	Jumlah	3.603.712.090,81	2.578.943.395,00	1.024.768.695,81

Perbedaan antara Pendapatan Retribusi Jasa Usaha pada LO dengan LRA sebesar Rp1.024.768.695,81 terdiri dari :

- (a) Perbedaan pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Penyewaan Tanah dan Bangunan sebesar Rp264.853.750,00 merupakan pelunasan atas Piutang Sewa Plaza Tepian Lematang Tahun 2021 sebesar (Rp139.268.250,00) dan Piutang Sewa Plaza Tepian Lematang yang per 31 Desember 2022 belum dibayar sebesar Rp404.122.000,00;
- (b) Perbedaan pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Penyewaan Bangunan sebesar (Rp34.537.554,19) merupakan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2021 yang telah jatuh tempo sebesar Rp4.958.904,11 dan Piutang Retribusi Sewa ATM BRI yang per 31 Desember 2022 belum dibayar sebesar Rp6.000.000,00, serta Pendapatan Diterima Dimuka yang Belum Jatuh Tempo per 31 Desember 2022 untuk Sewa Ruang Kantor & ATM Bank Sumsel Babel sebesar (Rp45.496.458,30);
- (c) Perbedaan sebesar Rp154.820.000,00 pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Pemakaian Laboratorium merupakan pendapatan atas Laboratorium pada Dinas Lingkungan Hidup yang per 31 Desember 2022 belum disetor ke Rekening Kas Daerah;
- (d) Perbedaan pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Kendaraan Bermotor sebesar Rp146.932.500,00 merupakan pelunasan atas

Piutang Retribusi Tahun 2021 sebesar (Rp4.693.500,00) dan penambahan atas Piutang Retribusi Kendaraan Bermotor Tahun 2022 sebesar Rp151.626.000,00;

- (e) Perbedaan pada Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang Dikontrakkan sebesar (Rp476.400.000,00) merupakan pelunasan Piutang Retribusi Tahun 2021 sebesar (Rp7.500.000,00) dan penambahan atas Piutang Retribusi Tahun 2022 sebesar Rp483.900.000,00; dan
- (f) Perbedaan pada Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebesar Rp16.300.000,00 merupakan pendapatan atas Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang per 31 Desember 2022 belum disetor ke Rekening Kas Daerah.

(3) Retribusi Perizinan Tertentu-LO

Jumlah Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO Tahun 2022 sebesar Rp2.014.179.314,00. Retribusi Perizinan Tertentu-LO dijelaskan pada **Tabel 5.120**.

Tabel 5.120. Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO Tahun 2022

No	Jenis Retribusi Perizinan Tertentu	LO Tahun 2022 (Rp)	LRA Tahun 2022 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.014.179.314,00	2.014.179.314,00	0,00
2	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	0,00	0,00	0,00
3	Retribusi Izin Trayek	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	2.014.179.314,00	2.014.179.314,00	0,00

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada LO Tahun 2022 sebesar Rp13.332.338.704,08. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dijelaskan pada **Tabel 5.121**.

Tabel 5.121. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2022

No	Jenis Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	LO Tahun 2022 (Rp)	LRA Tahun 2022 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	13.332.338.704,08	9.348.611.221,40	3.983.727.482,68
	Jumlah	13.332.338.704,08	9.348.611.221,40	3.983.727.482,68

Perbedaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan antara LO dengan LRA sebesar Rp3.983.727.482,68 merupakan pelunasan laba atas Penyertaan Modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMD pada PT. Bank Sumsel Babel Tahun 2021 sebesar (Rp9.348.611.221,40), Penambahan Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa perolehan deviden dari Penyertaan Modal saham Pemerintah Kab. Lahat pada PT Bank Sumsel Tahun 2022 yang baru dibayar pada tahun 2023, Pendapatan atas Penyertaan Modal pada Hotel Bukit Serelo sebesar

Rp607.504.132,00, dan Pendapatan atas Penyertaan Modal pada PDAM sebesar Rp174.280.650,74.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO Tahun 2022 sebesar Rp101.416.489.013,05. Terdapat perbedaan nilai antara LO dan LRA sebesar (Rp522.601.772,90) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO dijelaskan pada **Tabel 5.122**.

Tabel 5.122. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO Tahun 2022

No	Jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	LO Tahun 2022 (Rp)	LRA Tahun 2022 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1	Hasil Penjualan Alat Angkutan	124.475.062,00	124.475.062,00	0,00
2	Jasa Giro pada Kas Daerah	10.004.344.288,00	10.004.344.288,00	0,00
3	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	535.752,00	0,00	535.752,00
4	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	103.916.907,85	0,00	103.916.907,85
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	2.268.084.659,82	6.898.585.014,59	(4.630.500.354,77)
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	129.869.891,18	145.630.250,18	(15.760.359,00)
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	86.139.241,00	86.139.241,00	0,00
8	Pendapatan Denda Pajak Hotel	780.678,00	780.678,00	0,00
9	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	860.488,00	860.488,00	0,00
10	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	73.032,00	73.032,00	0,00
11	Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya	32.500,00	32.500,00	0,00
12	Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya	31.040,00	31.040,00	0,00
13	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	27.000,00	27.000,00	0,00
14	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	1.096.355,00	1.096.355,00	0,00
15	Pendapatan Denda Pajak Parkir	392.584,00	392.584,00	0,00
16	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	4.163.762,00	4.163.762,00	0,00
17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	99.941.054,00	99.941.054,00	0,00
18	Pendapatan BLUD	71.027.478.293,02	67.008.272.012,00	4.019.206.281,02
19	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	17.564.246.425,18	17.564.246.425,18	0,00
	Jumlah	101.416.489.013,05	101.939.090.785,95	(522.601.772,90)

Perbedaan antara Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada LO dengan LRA sebesar (Rp522.601.772,90) terdiri dari:

- (1) Perbedaan pada Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOS sebesar Rp535.752,00 merupakan pendapatan atas jasa giro pada Rekening BOSDA SD dan SMP;
- (2) Perbedaan pada Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar Rp103.916.907,85 merupakan piutang atas remunerasi Dana Bagi Hasil milik daerah pada rekening *Treasury Deposit Facility* (TDF);
- (3) Perbedaan pada Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian sebesar (Rp4.630.500.354,77) adalah pelunasan atas Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Tahun 2021 sebesar (Rp4.221.325.344,77), Penambahan Piutang Bagian Lancar TGR sebesar Rp30.000.000,00, pelunasan Piutang Bagian Lancar TGR sebesar (Rp22.359.000,00), pelunasan atas Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang menjadi temuan pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 sebesar (Rp217.225.000,00), serta pelunasan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Tahun 2021 sebesar (Rp199.591.010,00);
- (4) Perbedaan pada Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebesar (Rp15.760.359,00) merupakan saldo Kas BOSDA Tahun 2021 yang disetor di Tahun 2022; dan
- (5) Perbedaan pada Pendapatan BLUD sebesar Rp4.019.206.281,02 merupakan pelunasan Piutang BLUD Tahun 2021 sebesar (Rp43.202.771.234,00), Piutang BLUD Tahun 2022 sebesar Rp47.319.895.597,00, Pendapatan Diterima Dimuka BLUD Tahun 2021 yang sudah jatuh tempo sebesar Rp22.892.512,38, dan Pendapatan Diterima Dimuka BLUD Tahun 2022 yang belum jatuh tempo sebesar (120.810.594,36).

Rekonsiliasi Pendapatan - LO Berupa Kas dengan Pendapatan Non Kas atas Pendapatan BLUD dijelaskan pada **Tabel 5.123**.

Tabel 5.123. Rekonsiliasi Pendapatan-LO Berupa Kas dengan Pendapatan Non Kas atas Pendapatan BLUD Tahun 2022

No.	Uraian	Pendapatan LRA (Rp)	Pembayaran Piutang 2022 (Rp)	Pendapatan - LO dari Tagihan 2022 (Rp)	Pendapatan LO (Rp)
1	Pendapatan Operasional BLUD	67.008.272.012,00	43.202.771.234,00	47.319.895.597,00	71.125.396.375,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka Yang Sudah jatuh Tempo	0,00	0,00	22.892.512,38	22.892.512,38
3	Peningkatan Kualitas Piutang Yang Belum Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Diterima Dimuka yg belum jatuh tempo	0,00	0,00	(120.810.594,36)	(120.810.594,36)
	Jumlah	67.008.272.012,00	43.202.771.234,00	47.221.977.515,02	71.027.478.293,02

2) Pendapatan Transfer - LO

Jumlah Pendapatan Transfer-LO Tahun 2022 sebesar Rp2.242.232.690.318,78. Terdapat perbedaan antara jumlah Pendapatan Transfer pada LO dengan LRA sebesar Rp101.368.427.449,41. Pendapatan Transfer-LO dijelaskan pada **Tabel 5.124**.

Tabel 5.124. Pendapatan Transfer-LO Tahun 2022

No	Jenis Pajak	LO	LRA	Perbedaan
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.920.561.168.463,00	1.561.941.535.077,00	358.619.633.386,00
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.124.360.000,00	288.494.958.000,00	(283.370.598.000,00)
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	316.547.161.855,78	290.427.769.792,37	26.119.392.063,41
	Jumlah	2.242.232.690.318,78	2.140.864.262.869,37	101.368.427.449,41

Rincian Pendapatan Transfer-LO dijelaskan sebagai berikut.

a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2022 sebesar Rp1.920.561.168.463,00. Terdapat perbedaan sebesar Rp358.619.633.386,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO dijelaskan pada **Tabel 5.125**.

Tabel 5.125. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

No	Jenis Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	LO Tahun 2022 (Rp)	LRA Tahun 2022 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1	Dana Bagi Hasil	1.071.365.721.619,00	712.746.088.233,00	358.619.633.386,00
2	Dana Alokasi Umum	639.180.181.874,00	639.180.181.874,00	0,00
3	Dana Alokasi Khusus – Fisik	87.090.790.481,00	87.090.790.481,00	0,00
4	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	122.924.474.489,00	122.924.474.489,00	0,00
	Jumlah	1.920.561.168.463,00	1.561.941.535.077,00	358.619.633.386,00

(1) Pendapatan Dana Bagi Hasil-LO

Jumlah Pendapatan Dana Bagi Hasil-LO Tahun 2022 sebesar Rp1.071.365.721.619,00. Transfer Dana Bagi Hasil – LO dijelaskan sebagai berikut.

(a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO

Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2022 sebesar Rp171.559.340.119,00. Rincian Bagi Hasil Pajak – LO dijelaskan pada **Tabel 5.126**.

Tabel 5.126. Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2022

No	Jenis Pendapatan Bagi Hasil Pajak	LO Tahun 2022 (Rp)	LRA Tahun 2022 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	158.429.924.969,00	132.020.961.644,00	26.408.963.325,00
2	Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh) Psl 21	13.077.435.290,00	11.673.288.076,00	1.404.147.214,00
3	Cukai Hasil Tembakau	51.979.860,00	45.848.550,00	6.131.310,00
	Jumlah	171.559.340.119,00	143.740.098.270,00	27.819.241.849,00

Terdapat perbedaan sebesar Rp27.819.241.849,00 antara Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO dan LRA dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Perbedaan pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp26.408.963.325,00 merupakan pendapatan atas Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan yang belum di transfer ke Kas Daerah dan Tersimpan pada *Treasury Deposit Facility*;
- (2) Perbedaan pada Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh) Psl 21 sebesar Rp1.404.147.214,00 merupakan pendapatan atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh) Psl 21 yang belum di transfer ke Kas Daerah dan tersimpan pada *Treasury Deposit Facility*; dan
- (3) Perbedaan pada Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp6.131.310,00 merupakan pendapatan atas Cukai Hasil Tembakau yang belum di transfer ke Kas Daerah dan tersimpan pada *Treasury Deposit Facility*.

(b) Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO

Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO Tahun 2022 sebesar Rp899.806.381.500,00. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO dijelaskan pada **Tabel 5.127**.

Tabel 5.127. Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO Tahun 2022

No	Jenis Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	LO Tahun 2022 (Rp)	LRA Tahun 2022 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1	Minyak Bumi	19.059.528.189,00	18.140.050.696,00	919.477.493,00
2	Gas Bumi	78.916.974.167,00	73.480.567.406,00	5.436.406.761,00
3	Pengusahaan Panas Bumi	1.740.207.079,00	1.570.399.000,00	169.808.079,00
4	Minerba dan Batubara –Landrent	5.683.549.791,00	3.723.787.522,00	1.959.762.269,00
5	Minerba dan Batubara –Royalty	788.754.540.206,00	466.991.080.339,00	321.763.459.867,00
6	Kehutanan-PSDH	3.481.517.857,00	3.141.794.000,00	339.723.857,00
7	Perikanan	2.170.064.211,00	1.958.311.000,00	211.753.211,00
	Jumlah	899.806.381.500,00	569.005.989.963,00	330.800.391.537,00

Terdapat perbedaan sebesar Rp330.800.391.537,00 antara Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO dan LRA dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Perbedaan pada DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi sebesar Rp919.477.493,00 merupakan pendapatan atas Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi yang belum di transfer ke Kas Daerah dan tersimpan pada *Treasury Deposit Facility*;
- 2) Perbedaan pada DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi sebesar Rp5.436.406.761,00 merupakan pendapatan atas Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi yang belum di transfer ke Kas Daerah dan tersimpan pada *Treasury Deposit Facility*;

- 3) Perbedaan pada DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi sebesar Rp169.808.079,00 merupakan pendapatan atas Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi yang belum di transfer ke Kas Daerah dan tersimpan pada *Treasury Deposit Facility*;
- 4) Perbedaan pada DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent sebesar Rp1.959.762.269,00 merupakan pendapatan atas Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent yang belum di transfer ke Kas Daerah dan tersimpan pada *Treasury Deposit Facility*;
- 5) Perbedaan pada DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty sebesar Rp321.763.459.867,00 merupakan pendapatan atas Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty yang belum di transfer ke Kas Daerah dan tersimpan pada *Treasury Deposit Facility*;
- 6) Perbedaan pada DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp339.723.857,00 merupakan pendapatan atas Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan - Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang belum di transfer ke Kas Daerah dan tersimpan pada *Treasury Deposit Facility*; dan
- 7) Perbedaan pada DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan sebesar Rp211.753.211,00 merupakan pendapatan atas Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan yang belum di transfer ke Kas Daerah dan tersimpan pada *Treasury Deposit Facility*.

(2) **Dana Alokasi Umum-LO**

Jumlah Pendapatan Dana Alokasi Umum-LO Tahun 2022 sebesar Rp639.180.181.874,00 sama dengan Pendapatan LRA.

(3) **Dana Alokasi Khusus Fisik-LO**

Jumlah Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik – LO Tahun 2022 sebesar Rp87.090.790.481,00 sama dengan Pendapatan LRA. Dana Alokasi Khusus-LO dijelaskan pada **Tabel 5.128**.

Tabel 5.128. Dana Alokasi Khusus Fisik-LO Tahun 2022

No	Jenis Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik	LO Tahun 2022 (Rp)	LRA Tahun 2022 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	786.119.300,00	786.119.300,00	0,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	9.089.300.950,00	9.089.300.950,00	0,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	17.772.549.500,00	17.772.549.500,00	0,00
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	865.633.000,00	865.633.000,00	0,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	5.728.016.353,00	5.728.016.353,00	0,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	11.744.687.680,00	11.744.687.680,00	0,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	91.362.000,00	91.362.000,00	0,00

No	Jenis Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik	LO Tahun 2022 (Rp)	LRA Tahun 2022 (Rp)	Perbedaan (Rp)
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	2.074.304.380,00	2.074.304.380,00	0,00
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.233.950.311,00	1.233.950.311,00	0,00
10	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan /Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	1.904.054.663,00	1.904.054.663,00	0,00
11	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	7.552.859.000,00	7.552.859.000,00	0,00
12	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	4.259.257.000,00	4.259.257.000,00	0,00
13	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	1.033.465.000,00	1.033.465.000,00	0,00
14	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	22.955.231.344,00	22.955.231.344,00	0,00
	Jumlah	87.090.790.481,00	87.090.790.481,00	0,00

(4) **Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO**

Jumlah Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO Tahun 2022 sebesar Rp122.924.474.489,00 sama dengan Pendapatan LRA. Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO dijelaskan pada **Tabel 5.129**.

Tabel 5.129. Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO Tahun 2022

No	Jenis Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik	LO Tahun 2022 (Rp)	LRA Tahun 2022 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1	DAK Non Fisik-TPG PNSD	79.681.590.485,00	79.681.590.485,00	0,00
2	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.659.700.000,00	1.659.700.000,00	0,00
3	DAK Non Fisik-BOP PAUD	5.544.686.000,00	5.544.686.000,00	0,00
4	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	879.400.000,00	879.400.000,00	0,00
5	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1.342.878.069,00	1.342.878.069,00	0,00
6	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	406.874.050,00	406.874.050,00	0,00
7	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	25.757.066.035,00	25.757.066.035,00	0,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	541.276.000,00	541.276.000,00	0,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	628.023.000,00	628.023.000,00	0,00
10	DAK Non Fisik-PK2UKM	400.800.000,00	400.800.000,00	0,00
11	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	299.719.200,00	299.719.200,00	0,00
12	DAK Non Fisik-BOKB-KB	5.308.420.650,00	5.308.420.650,00	0,00
13	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	451.800.000,00	451.800.000,00	0,00

No	Jenis Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik	LO Tahun 2022 (Rp)	LRA Tahun 2022 (Rp)	Perbedaan (Rp)
14	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	22.241.000,00	22.241.000,00	0,00
	Jumlah	122.924.474.489,00	122.924.474.489,00	0,00

b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO Tahun 2022 sebesar Rp5.124.360.000,00. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO dijelaskan pada **Tabel 5.130**.

Tabel 5.130. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya LO Tahun 2022

No	Jenis Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	LO Tahun 2022 (Rp)	LRA Tahun 2022 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1	Dana Insentif Daerah	5.124.360.000,00	5.124.360.000,00	0,00
2	Dana Desa	0,00	283.370.598.000,00	283.370.598.000,00
	Jumlah	5.124.360.000,00	288.494.958.000,00	283.370.598.000,00

(1) Dana Insentif Daerah LO

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat DID-LO Tahun 2022 sebesar Rp5.124.360.000,00 sama dengan Pendapatan LRA.

(2) Dana Desa

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Desa–LO Tahun 2022 adalah Rp0,00 berbeda sebesar Rp283.370.598.000,00 dari Pendapatan LRA. Hal ini sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual antara pendapatan yang diperoleh dari Dana Transfer Pemerintah Pusat berupa Transfer Dana Desa tidak diakui sebagai Pendapatan-LO dan hanya diakui sebagai pendapatan transfer kepada Pemerintah Desa. Jumlah Dana Desa tersebut hanya tercatat di LRA, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6966/SJ tanggal 30 Desember 2020 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana Desa oleh Kabupaten/Kota. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bahwa berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan Dana Desa (SP2DD), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menyajikan Pendapatan Dana Desa dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

c) Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO Tahun 2022 sebesar Rp316.547.161.855,78. Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO dijelaskan pada **Tabel 5.131**.

Tabel 5.131. Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO Tahun 2022

No	Jenis Pendapatan Transfer Antar Daerah	LO Tahun 2022 (Rp)	LRA Tahun 2022 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil	153.236.230.668,78	128.843.277.205,37	24.392.953.463,41
2	Bantuan Keuangan	163.310.931.187,00	161.584.492.587,00	1.726.438.600,00
	Jumlah	316.547.161.855,78	290.427.769.792,37	26.119.392.063,41

(1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO

Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2022 sebesar Rp153.236.230.668,78. Pendapatan Bagi Hasil-LO dijelaskan pada **Tabel 5.132.**

Tabel 5.132. Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2022

No	Jenis Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	LO Tahun 2022 (Rp)	LRA Tahun 2022 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	16.900.718.359,00	14.910.047.955,00	1.990.670.404,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	15.915.196.245,00	14.376.892.427,00	1.538.303.818,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	95.502.420.105,78	78.203.217.502,78	17.299.202.603,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	463.864.995,00	417.680.674,00	46.184.321,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	24.454.030.964,00	20.935.438.646,59	3.518.592.317,41
	Jumlah	153.236.230.668,78	128.843.277.205,37	24.392.953.463,41

Perbedaan antara jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi pada LO dengan LRA sebesar (Rp24.392.953.463,41) terdiri dari:

- (a) Perbedaan sebesar Rp1.990.670.404,00 pada Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pelunasan atas piutang Tahun 2021 sebesar (Rp1.833.733.483,00) dan piutang Tahun 2022 sebesar Rp3.824.403.887,00;
- (b) Perbedaan sebesar Rp1.538.303.818,00 pada Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan pelunasan atas piutang Tahun 2021 sebesar (Rp1.531.293.025,00) dan Piutang Tahun 2022 sebesar Rp3.069.596.843,00;
- (c) Perbedaan sebesar Rp17.299.202.603,00 pada Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor merupakan pelunasan atas piutang Tahun 2021 (Rp4.799.791.257,00) dan Piutang Tahun 2022 sebesar Rp22.098.993.860,00;
- (d) Perbedaan sebesar Rp46.184.321,00 pada Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan merupakan pelunasan Piutang Tahun 2021 sebesar (Rp30.196.537,00) dan Piutang Tahun 2022 sebesar Rp76.380.858,00; dan
- (e) Perbedaan sebesar Rp3.518.592.317,41 pada Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok merupakan pelunasan Piutang Tahun 2021 (Rp941.444.450,59) dan Piutang Tahun 2022 sebesar Rp4.460.036.768,00.

(2) Transfer Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Provinsi Lainnya-LO

Jumlah Transfer Bantuan Keuangan-LO Tahun 2022 sebesar Rp163.310.931.187,00. Rincian Transfer Bantuan Keuangan – LO dijelaskan pada **Tabel 5.133**.

Tabel 5.133. Transfer Bantuan Keuangan-LO Tahun 2022

No	Jenis Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan	LO Tahun 2022 (Rp)	LRA Tahun 2022 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0,00
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	163.310.931.187,00	161.584.492.587,00	1.726.438.600,00
	Jumlah	163.310.931.187,00	161.584.492.587,00	1.726.438.600,00

Terdapat selisih sebesar Rp1.726.438.600,00 pada Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi merupakan pelunasan atas Piutang Tahun 2021 sebesar (Rp2.204.990.400,00) dan Penambahan Piutang atas Pendapatan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Tahun 2022 sebesar Rp3.931.429.000,00.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2022 sebesar Rp72.334.359.921,00. Rincian per jenis Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO dijelaskan pada **Tabel 5.134**.

Tabel 5.134. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2022

No	Jenis Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	LO Tahun 2022 (Rp)	LRA Tahun 2022 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1	Pendapatan Hibah	16.790.167.989,00	11.797.669.377,00	4.992.498.612,00
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	55.544.191.932,00	55.544.191.932,00	0,00
	Jumlah	72.334.359.921,00	67.341.861.309,00	4.992.498.612,00

Perbedaan antara jumlah Pendapatan Hibah pada LO dengan LRA sebesar Rp4.992.498.612,00 terdiri dari:

- a) Pendapatan Hibah dari Dirjen Perkebunan berupa Tanah senilai Rp1.372.800.000,00 dan Bangunan Kantor senilai Rp45.900.000,00;
- b) Pendapatan Hibah dari Kementerian Pertanian RI kepada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan berupa 2 (dua) Unit Kendaraan senilai Rp27.363.600,00;
- c) Pendapatan Hibah dari Kementerian Kesehatan RI berupa Alat Kedokteran kepada RSUD senilai Rp567.050.000,00;
- d) Hibah dari Desa Jarai kepada Kecamatan Jarai berupa Gedung Perpustakaan senilai Rp80.000.000,00;
- e) Hibah dari Desa Tanjung Kurung kepada Dinas Pendidikan berupa Tanah senilai Rp119.640.000,00, Meubelair senilai Rp1.050.000,00, Gedung Sekolah senilai Rp215.588.900,00, dan bangunan WC permanen 1 (satu) Unit (Swadaya) senilai Rp953.900,00;

- f) Pendapatan Hibah dari PT KAI kepada Dinas Kesehatan berupa kendaraan *Ambulance* senilai Rp256.610.000,00;
- g) Pendapatan Hibah dari Sumbangan Pihak Ketiga kepada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan berupa Tanah Jalan senilai Rp648.512.000,00, Jalan dan Drainase senilai Rp1.226.924.400,00 pada Perumahan Penghijauan *Residence*;
- h) Pendapatan Hibah uang sebagai dana bantuan/sumbangan dari masyarakat untuk musibah banjir, kebakaran, dll pada Dinas Sosial sebesar Rp58.607.912,00;
- i) Pendapatan Hibah uang sebagai CSR dari PT. MIP kepada Dinas Kesehatan sebesar Rp155.910.000,00;
- j) Pendapatan Hibah uang dari Kementerian Kesehatan RI sebagai bantuan percepatan penurunan *stunting* dalam gerakan atasi *stunting* sampai nol (GASPOL) sebesar Rp124.695.400,00; dan
- k) Pendapatan Hibah berupa 16 unit peralatan TIK SMP dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebesar Rp90.892.500,00.

b. Beban

Jumlah Beban – LO Tahun 2022 sebesar Rp1.835.194.995.068,05, terdapat perbedaan antara jumlah Beban pada LO dengan LRA sebesar Rp184.036.040.131,84. Rincian Beban – LO dijelaskan pada **Tabel 5.135**.

Tabel 5.135 Realisasi Beban -LO dan Beban LRA Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Jenis Beban	LO Tahun 2022	LRA Tahun 2022	Perbedaan	LO 2021
1	Beban Operasi	1.200.445.606.031,15	1.194.306.194.387,21	6.213.519.023,94	1.184.809.366.510,17
2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	461.267.226.486,90	0,00	461.267.226.487,90	399.104.412.032,87
3	Beban Transfer	173.482.162.549,00	456.852.760.549,00	(283.370.598.000,00)	148.924.609.175,00
4	Pos Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	26.339.500,00
	Jumlah	1.835.194.995.068,05	1.651.158.954.936,21	184.036.040.131,84	1.732.864.727.218,04

1) Beban Operasional

Jumlah Beban Operasional-LO Tahun 2022 sebesar Rp1.200.445.606.031,15. Terdapat perbedaan antara jumlah Beban Operasional pada LO dengan LRA sebesar Rp6.139.411.643,94. Rincian Beban-LO dijelaskan pada **Tabel 5.136**.

Tabel 5.136. Realisasi Beban Operasional LO dan Beban LRA Tahun 2022

No	Jenis Beban	LO Tahun 2022	LRA Tahun 2022	Perbedaan	LO 2021
1	Beban Pegawai	620.650.678.105,00	618.704.238.751,00	1.946.439.354,00	619.154.234.287,00
2	Beban Persediaan	181.172.541.719,27	175.423.311.619,01	5.749.230.100,26	188.818.619.585,18
3	Beban Jasa	201.661.756.616,71	206.197.645.612,20	(4.535.888.995,49)	206.940.090.897,67
4	Beban Pemeliharaan	16.564.606.953,00	16.040.394.220,00	524.212.733,00	12.054.269.145,04
5	Beban Perjalanan Dinas	98.777.713.445,00	98.663.886.045,00	113.827.400,00	108.224.190.282,00
6	Beban Hibah	76.085.173.140,00	75.620.638.140,00	464.535.000,00	44.482.609.373,00
7	Beban Bantuan Sosial	3.423.600.000,00	3.423.600.000,00	0,00	1.940.077.720,00

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun 2022

No	Jenis Beban	LO Tahun 2022	LRA Tahun 2022	Perbedaan	LO 2021
8	Beban Lain-lain	628.965.010,27	232.480.000,00	396.485.010,27	1.315.945.870,31
9	Beban Penyisihan Piutang	1.480.571.041,90	0,00	1.480.571.041,90	1.879.329.349,97
	Jumlah	1.200.445.606.031,15	1.194.306.194.387,21	6.139.411.643,94	1.184.809.366.510,17

Rincian Beban Operasional-LO dijelaskan sebagai berikut:

a) Beban Pegawai-LO

Jumlah Beban Pegawai-LO Tahun 2022 sebesar Rp620.650.678.105,00. Beban Pegawai-LO dijelaskan pada **Tabel 5.137**.

Tabel 5.137. Beban Pegawai-LO Tahun 2022

No	Uraian Beban Pegawai	LO 2022	LRA 2022	Perbedaan
1	Beban Gaji Pokok ASN	320.937.197.825,00	320.937.197.825,00	0,00
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	28.025.949.335,00	28.025.949.335,00	0,00
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	10.242.458.270,00	10.242.458.270,00	0,00
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	18.579.668.000,00	18.579.668.000,00	0,00
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.699.538.530,00	4.699.538.530,00	0,00
6	Beban Tunjangan Beras ASN	17.115.190.130,00	17.115.190.130,00	0,00
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	440.755.896,00	440.755.896,00	0,00
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	4.257.527,00	4.257.527,00	0,00
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	15.402.347.390,00	15.402.347.390,00	0,00
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	663.625.365,00	663.625.365,00	0,00
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	1.990.105.293,00	1.990.105.293,00	0,00
12	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	12.461.960.076,00	12.461.960.076,00	0,00
13	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	7.167.004.000,00	7.167.004.000,00	0,00
14	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	40.080.037.523,00	40.080.037.523,00	0,00
15	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.704.308.761,00	1.704.308.761,00	0,00
16	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	67.131.499,00	67.131.499,00	0,00
17	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	89.183.848.063,00	89.183.848.063,00	0,00
18	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	383.444.700,00	383.444.700,00	0,00
19	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.175.372.000,00	1.175.372.000,00	0,00
20	Beban Uang Representasi DPRD	892.290.000,00	892.290.000,00	0,00
21	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	118.305.600,00	118.305.600,00	0,00
22	Beban Tunjangan Beras DPRD	125.793.540,00	125.793.540,00	0,00
23	Beban Uang Paket DPRD	76.482.000,00	76.482.000,00	0,00
24	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.293.820.500,00	1.293.820.500,00	0,00
25	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	21.741.300,00	21.741.300,00	0,00
26	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	102.129.300,00	102.129.300,00	0,00
27	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.040.000.000,00	5.040.000.000,00	0,00
28	Beban Tunjangan Reses DPRD	1.260.000.000,00	1.260.000.000,00	0,00
29	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan	394.584.337,00	394.584.337,00	0,00
30	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	9.854.350.824,00	9.854.350.824,00	0,00

No	Uraian Beban Pegawai	LO 2022	LRA 2022	Perbedaan
31	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	8.658.000.000,00	8.658.000.000,00	0,00
32	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00
33	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.140.000,00	7.140.000,00	0,00
34	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	0,00
35	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.097.160,00	7.097.160,00	0,00
36	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	378.354,00	378.354,00	0,00
37	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.040,00	2.040,00	0,00
38	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.486.400,00	5.486.400,00	0,00
39	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	112.320,00	0,00
40	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	336.960,00	0,00
41	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00
42	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00
43	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	519.814.822,00	519.814.822,00	0,00
44	Beban Pegawai BOS	19.828.013.604,00	17.881.574.250,00	1.946.439.354,00
45	Beban Pegawai BLUD	1.733.618.861,00	1.733.618.861,00	0,00
	Jumlah	620.650.678.105,00	618.704.238.751,00	1.946.439.354,00

Selisih antara Beban Pegawai dengan Belanja Pegawai di LRA sebesar Rp1.946.439.354,00 merupakan Reklas Beban Barang dan Jasa BOSDA ke Belanja Pegawai BOSDA.

b) Beban Persediaan-LO

Jumlah Beban Persediaan-LO Tahun 2022 sebesar Rp181.172.541.719,27. Beban Persediaan-LO dijelaskan pada **Tabel 5.138**.

Tabel 5.138. Beban Persediaan-LO Tahun 2022

No	Uraian Beban Persediaan	LO Tahun 2022 (Rp)	LRA Tahun 2022 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1	Beban Barang Pakai Habis	130.031.205.582,30	113.309.515.572,00	16.721.690.010,30
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	1.947.000,00	1.947.000,00	0,00
3	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	546.850.000,00	546.850.000,00	0,00
4	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	741.291.021,92	6.670.233.000,00	(5.928.941.978,08)
5	Beban Persediaan BOS	30.275.134.925,00	32.212.403.940,00	(1.937.269.015,00)
6	Beban Persediaan BLUD	19.576.113.190,05	22.682.362.107,01	(3.106.248.916,96)
	Jumlah	181.172.541.719,27	175.423.311.619,01	5.749.230.100,26

Perbedaan antara jumlah Beban Persediaan pada LO dengan LRA sebesar Rp5.749.230.100,26 terdiri dari:

- (1) Perbedaan sebesar Rp16.721.690.010,30 pada Beban Bahan Pakai Habis adalah Persediaan Awal sebesar Rp26.745.168.428,56, Persediaan Akhir sebesar (Rp13.298.889.105,26), pelunasan utang pada Sekretariat Daerah sebesar (Rp154.485.600,00), Reklasifikasi Belanja Modal yang tidak menjadi aset sebesar Rp641.366.215,00,00, belanja dibawah nilai kapitalisasi sebesar Rp2.709.339.672,00, Reklas Aset Lainnya sebesar Rp2.500.000,00 dan

belanja yang dibebankan langsung atas Pendapatan Retribusi Laboratorium Kesehatan Daerah atas pendapatan yang tidak disetor langsung ke Rekening Kas Daerah pada Dinas Kesehatan sebesar Rp76.690.400,00;

- (2) Perbedaan sebesar (Rp5.928.941.978,08) pada Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat merupakan kurang catat atas belanja dibayar dimuka yang belum jatuh tempo berupa premi asuransi jiwa pada Sekretariat Daerah;
- (3) Perbedaan sebesar (Rp1.937.269.015,00) pada Beban Persediaan BOS merupakan reklas dari Beban Persediaan ke Beban Pegawai BOSDA; dan
- (4) Perbedaan sebesar (Rp3.106.248.916,96) pada Beban Persediaan BLUD merupakan Persediaan Akhir BLUD Tahun 2022.

c) Beban Jasa-LO

Jumlah Beban Jasa-LO Tahun 2022 adalah sebesar Rp201.661.756.616,71. Beban Jasa-LO dijelaskan pada **Tabel 5.139**.

Tabel 5.139. Beban Jasa – LO Tahun 2022

No	Uraian Beban Jasa	LO Tahun 2022 (Rp)	LRA Tahun 2022 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1	Beban Jasa Kantor	106.449.387.326,40	104.253.396.221,20	2.195.991.105,20
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	47.388.910.772,00	47.418.414.372,00	(29.503.600,00)
3	Beban Sewa Tanah	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.641.054.150,00	1.641.054.150,00	0,00
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	5.132.788.552,00	5.132.788.552,00	0,00
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	453.450.000,00	453.450.000,00	0,00
7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	1.136.982.000,00	3.736.540.600,00	(2.599.558.600,00)
8	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	5.048.434.370,00	5.750.096.370,00	(701.662.000,00)
9	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.334.973.000,00	5.332.323.000,00	2.650.000,00
10	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00
11	Beban Jasa BOS	5.412.207.108,00	5.412.207.108,00	0,00
12	Beban Jasa BLUD	23.609.269.338,31	27.014.575.239,00	(3.405.305.900,69)
	Jumlah	201.661.756.616,71	206.197.645.612,20	(4.535.888.995,49)

Perbedaan antara jumlah Beban Jasa pada LO dengan LRA sebesar (Rp4.535.888.995,49) terdiri dari:

- (1) Perbedaan sebesar Rp2.195.991.105,20 pada Beban Jasa Kantor adalah pelunasan Utang Belanja Jasa Kantor Tahun 2021 sebesar (Rp40.614.457,00); Utang Belanja Jasa Kantor Tahun 2022 sebesar Rp2.139.450.962,20 dan belanja yang dibebankan langsung atas Pendapatan Retribusi Laboratorium Kesehatan Daerah atas Pendapatan yang tidak disetor langsung Ke Rekening Kas Daerah pada Dinas Kesehatan sebesar Rp97.154.600,00;
- (2) Perbedaan sebesar (Rp29.503.600,00) pada Beban Iuran Jaminan/ Asuransi Tahun 2022 merupakan Piutang atas Lebih Bayar Bantuan Iuran Peserta PBPU/BP Kelas III;
- (3) Perbedaan sebesar Rp1.500.000,00 pada Beban Sewa Tanah merupakan belanja yang dibebankan langsung atas pendapatan yang tidak disetor langsung ke Kas Daerah pada Dinas Perdagangan;
- (4) Perbedaan sebesar (Rp2.599.558.600,00) pada Beban Jasa Konsultansi Konstruksi merupakan atribusi ke Aset Tetap pada 13 (tiga belas) SKPD

terdiri Atribusi Gedung dan Bangunan (Rp953.755.600,00) dan Atribusi Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar (Rp1.645.803.000,00);

- (5) Perbedaan sebesar (Rp701.662.000,00) pada Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi adalah atribusi ke Aset Tetap pada 4 (empat) SKPD terdiri dari Atribusi Peralatan Mesin sebesar (Rp51.850.000,00), Atribusi Gedung dan Bangunan sebesar (Rp144.780.000,00) dan Atribusi Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar (Rp505.032.000,00);
- (6) Perbedaan sebesar Rp2.650.000,00 pada Beban Kursus/Pelatihan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan merupakan belanja yang dibebankan langsung atas pendapatan Retribusi Laboratorium Kesehatan Daerah atas Pendapatan dan tidak disetor langsung Ke Rekening Kas Daerah pada Dinas Kesehatan; dan
- (7) Perbedaan sebesar (Rp3.405.305.900,69) pada Beban Jasa BLUD merupakan pelunasan Utang Jasa BLUD sebesar (Rp5.348.633.538,88), penambahan Utang BLUD Tahun 2022 Rp2.049.663.971,84, Beban Dibayar Dimuka yang belum jatuh tempo sebesar (Rp59.150.520,54), Beban Dibayar Dimuka yang telah jatuh tempo sebesar Rp59.222.786,89 dan persediaan akhir (Rp106.408.600,00).

d) Beban Pemeliharaan-LO

Jumlah Beban Pemeliharaan-LO Tahun 2022 sebesar Rp16.564.606.953,00. Beban Pemeliharaan-LO dijelaskan pada **Tabel 5.140**.

Tabel 5.140. Beban Pemeliharaan-LO Tahun 2022

No	Uraian Beban Pemeliharaan	LO Tahun 2022 (Rp)	LRA Tahun 2022 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.735.029.811,00	3.286.186.078,00	448.843.733,00
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.235.691.975,00	5.235.691.975,00	0,00
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00
4	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	75.369.000,00	0,00	75.369.000,00
5	Beban Pemeliharaan BOS	6.940.530.554,00	6.940.530.554,00	0,00
6	Beban Pemeliharaan BLUD	539.985.613,00	539.985.613,00	0,00
	Jumlah	16.564.606.953,00	16.040.394.220,00	524.212.733,00

Perbedaan antara jumlah Beban Pemeliharaan pada LO dengan LRA sebesar Rp524.212.733,00 terdiri dari:

- (a) Perbedaan sebesar Rp448.843.733,00 pada Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin merupakan reklas Utang Belanja Modal pada Dinas Perhubungan sebesar Rp448.018.733,00, belanja yang dibebankan langsung atas pendapatan Retribusi Laboratorium Kesehatan Daerah atas Pendapatan yang tidak disetor langsung Ke Rekening Kas Daerah pada Dinas Kesehatan sebesar Rp325.000,00, belanja penggunaan langsung pendapatan Retribusi Pelayanan Los pada Dinas Perdagangan sebesar Rp500.000,00; dan
- (b) Perbedaan sebesar Rp75.369.000,0 pada Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya merupakan reklas Aset Tidak Berwujud pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

e) Beban Perjalanan Dinas-LO

Jumlah Beban Perjalanan Dinas-LO Tahun 2022 sebesar Rp98.777.713.445,00. Rincian Beban Perjalanan Dinas-LO dijelaskan pada **Tabel 5.141**.

Tabel 5.141. Beban Perjalanan Dinas-LO Tahun 2022

No	Uraian Beban Perjalanan Dinas	LO Tahun 2022 (Rp)	LRA Tahun 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	97.197.959.243,00	97.084.131.843,00	113.827.400,00
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00
3	Beban Perjalan Dinas BOS	1.219.544.300,00	1.219.544.300,00	0,00
4	Beban Perjalan Dinas BLUD	360.209.902,00	360.209.902,00	0,00
	Jumlah	98.777.713.445,00	98.663.886.045,00	113.827.400,00

Selisih sebesar Rp113.827.400,00 pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah merupakan belanja yang dibebankan langsung atas Pendapatan Retribusi Laboratorium Kesehatan Daerah atas pendapatan yang tidak disetor langsung Ke Rekening Kas Daerah pada Dinas Kesehatan.

f) Beban Hibah-LO

Jumlah Beban Hibah-LO Tahun 2022 sebesar Rp76.085.173.140,00. Sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) dan Lampiran III.B Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD bahwa Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga dikonversikan sesuai dengan SAP ke dalam kelompok Belanja Hibah dan diungkapkan dalam CaLK. Dalam hal ini Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga akan di reklas ke Belanja Hibah Bentuk Barang-LO. Rincian Beban Hibah dijelaskan pada **Tabel 5.142**.

Tabel 5.142. Beban Hibah-LO Tahun 2022

No	Uraian Beban Hibah	LO Tahun 2022 (Rp)	LRA Tahun 2022 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	5.370.318.000,00	5.370.318.000,00	0,00
2	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.614.051.000,00	1.614.051.000,00	0,00
3	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	13.761.181.835,00	13.296.646.835,00	464.535.000,00
4	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	33.821.178.863,00	33.821.178.863,00	0,00
5	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.882.379.000,00	7.882.379.000,00	0,00
6	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	3.785.025.816,00	3.785.025.816,00	0,00
7	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	2.407.100.000,00	2.407.100.000,00	0,00
8	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	5.974.286.000,00	5.974.286.000,00	0,00
9	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.469.652.626,00	1.469.652.626,00	0,00
	Jumlah	76.085.173.140,00	75.620.638.140,00	464.535.000,00

Perbedaan antara jumlah Beban Hibah pada LO dengan LRA sebesar Rp464.535.000,00 merupakan Beban Hibah Uang kepala Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan – LO dengan LRA adalah Barang yang diserahkan kepada masyarakat berupa Kit Siap Nikah Anti *Stunting*, BKB Kit *Stunting*, Tablet BKB

Stunting dan Tablet EDUKASI Genre pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

g) Beban Bantuan Sosial-LO

Jumlah Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 pada LO sebesar Rp3.423.600.000,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi Beban Bantuan Sosial dalam bentuk uang pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, BPDB dan Dinas Sosial. Rincian Beban Bantuan Sosial – LO pada **Tabel 5.143**.

Tabel 5.143. Beban Bantuan Sosial -LO Tahun 2022

No	Uraian Beban	LO Tahun 2022 (Rp)	LRA Tahun 2022 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.360.000.000,00	1.360.000.000,00	0,00
2	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	563.000.000,00	563.000.000,00	0,00
3	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
4	Beban Bantuan Sosial Barang kepada Kelompok Masyarakat	600.000,00	600.000,00	0,00
	Jumlah	3.423.600.000,00	3.423.600.000,00	0,00

h) Beban Lain-lain-LO

Jumlah Beban Lain-Lain-LO Tahun 2022 sebesar Rp628.965.010,27. Rincian Beban Lain-Lain dijelaskan pada **Tabel 5.144**.

Tabel 5.144. Beban Lain-Lain-LO Tahun 2022

No	Uraian Beban Lain-lain	LO Tahun 2022 (Rp)	LRA Tahun 2022 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	232.480.000,00	232.480.000,00	0,00
2	Beban Penurunan Nilai Investasi	396.419.010,27	0,00	396.419.010,27
3	Beban Lain-lain	66.000,00	0,00	66.000,00
	Jumlah	628.965.010,27	232.480.000,00	396.485.010,27

Perbedaan antara jumlah Beban Lain-Lain pada LO dengan LRA sebesar Rp396.485.101,27 terdiri dari:

- 1) Perbedaan antara jumlah Beban Lain-lain pada LO dengan LRA sebesar 396.429.010,27 merupakan Beban Penurunan Nilai Investasi pada Perusahaan Daerah Pertambangan; dan
- 2) Perbedaan antara jumlah Beban Lain-lain pada LO dengan LRA sebesar Rp66.000,00 merupakan Beban Biaya Administrasi dari Dana Hibah untuk Bantuan Bencana Kebakaran pada BPBD.

i) Beban Penyisihan Piutang

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022 sebesar Rp1.480.571.041,90. Beban Penyisihan Piutang dijelaskan pada **Tabel 5.145**.

Tabel 5.145. Beban Penyisihan Piutang-LO Tahun 2022

No	Uraian Beban Penyisihan Piutang	Jumlah (Rp)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel	148.306,58
2	Beban Penyisihan Pajak Restoran	912.722,70
3	Beban Penyisihan Pajak Hiburan	2.214.545,04
4	Beban Penyisihan Pajak Reklame	106.207,56
5	Beban Penyisihan Pajak Penerangan Jalan	1.162.495,46
6	Beban Penyisihan Piutang Pajak Parkir	14.418.300,00

No	Uraian Beban Penyisihan Piutang	Jumlah (Rp)
7	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.021.341.131,85
8	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	420.068.581,15
9	Beban Penyisihan Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	(89.500,00)
10	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	20.288.251,56
	Jumlah	1.480.571.041,90

2) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022 adalah sebesar Rp461.267.226.487,90. Beban Penyusutan dan Amortisasi dijelaskan **Tabel 5.146**.

Tabel 5.146. Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO Tahun 2022

No	Uraian Beban Penyusutan dan Amortisasi	Jumlah (Rp)
1	Beban Penyusutan Peralatan Mesin	50.835.132.596,55
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	15.164.232.495,00
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	385.020.340.668,39
4	Beban Penyusutan Aset Lainnya	5.020.380.487,96
5	Beban Penyusutan Properti Investasi	4.969.835.240,00
6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	257.305.000,00
	Jumlah	461.267.226.487,90

3) Beban Transfer-LO

Jumlah Beban Transfer-LO Tahun 2022 sebesar Rp173.482.162.549,00. Rincian Beban Transfer-LO dijelaskan pada **Tabel 5.147**.

Tabel 5.147. Beban Transfer-LO Tahun 2022

No	Uraian Beban Transfer	LO Tahun 2022 (Rp)	LRA Tahun 2022 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	5.145.314.200,00	5.145.314.200,00	0,00
2	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	168.336.848.349,00	451.707.446.349,00	(283.370.598.000,00)
	Jumlah	173.482.162.549,00	456.852.760.549,00	(283.370.598.000,00)

Perbedaan antara Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa antara LO dengan LRA sebesar (Rp283.370.598.000,00) merupakan belanja yang pencatatannya tidak diakui pada beban.

5.4.2 Surplus/Defisit dari Operasi

Surplus/Defisit dari Operasi Tahun 2022 sebesar Rp657.964.603.660,27. Jumlah tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Operasional dengan Beban Operasional yaitu sebesar Rp2.493.159.598.728,32 dikurangi dengan Rp1.835.194.995.068,05.

5.4.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Nonoperasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Nonoperasional Tahun 2022 sebesar Rp221.625.000,00. Jumlah tersebut merupakan defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO.

5.4.4 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus Sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2022 sebesar Rp658.186.228.660,27. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan Surplus/Defisit dari Operasi dengan Surplus dari Kegiatan Non Operasional yaitu Rp657.964.603.660,27 ditambah dengan Rp221.625.000,00.

5.4.5 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa Tahun 2022 adalah sebesar Rp0,00.

5.4.6 Surplus/Defisit-LO

Jumlah Surplus/Defisit Tahun 2022 sebesar Rp658.186.228.660,27 nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa dengan Pos Luar Biasa yaitu Rp658.186.228.660,27 dikurangi dengan Rp0,00.

5.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

5.5.1. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp729.295.212.457,01 merupakan selisih antara Arus Masuk Kas dengan Arus Keluar Kas dalam lingkup Aktivitas Operasi selama Tahun 2022. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi dijelaskan sebagai berikut.

a. Arus Masuk Kas

Jumlah Arus Masuk Ks dari Aktivitas Operasi sebesar Rp2.380.454.167.393,22. Arus Masuk Kas dijelaskan pada **Tabel 5.148**.

Tabel 5.148. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Penerimaan Pajak Daerah	54.945.020.430,50	47.442.487.214,23
2	Penerimaan Retribusi Daerah	6.139.795.839,00	5.530.460.448,75
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.348.611.221,40	8.414.980.506,40
4	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	101.814.615.723,95	93.971.565.816,84
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil	712.746.088.233,00	589.485.521.551,00
6	Penerimaan Dana Alokasi Umum	639.180.181.874,00	640.553.208.000,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Fisik	87.090.790.481,00	97.405.763.674,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	122.924.474.489,00	143.521.761.150,00
9	Penerimaan Dana Insentif Daerah	5.124.360.000,00	16.150.591.000,00
10	Penerimaan Dana Desa	283.370.598.000,00	301.337.664.600,00
12	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Provinsi	128.843.277.205,37	90.093.764.596,41
13	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Lainnya	161.584.492.587,00	102.495.787.781,20
14	Penerimaan Hibah	11.797.669.377,00	10.164.008.885,00
15	Penerimaan Dana Darurat	0,00	0,00
16	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
17	Pendapatan Lainnya	55.544.191.932,00	51.665.753.787,00
Jumlah Arus Masuk Kas		2.380.454.167.393,22	2.198.233.319.010,83

b. Arus Keluar Kas

Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi sebesar Rp1.651.158.954.936,21. Arus Keluar Kas dijelaskan pada **Tabel 5.149**.

Tabel 5.149 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Pembayaran Pegawai	618.704.238.751,00	618.614.081.287,00
2	Pembayaran Barang	496.557.717.496,21	513.868.084.333,87
3	Pembayaran Hibah	75.620.638.140,00	54.723.204.965,00
4	Pembayaran Bantuan Sosial	3.423.600.000,00	1.010.000.000,00
5	Pembayaran Tak Terduga	0,00	26.339.500,00
6	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	5.145.314.200,00	4.029.063.000,00
7	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
9	Bantuan Keuangan ke Desa	451.707.446.349,00	446.233.210.775,00
10	Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		1.651.158.954.936,21	1.638.503.983.860,87

c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp729.295.212.457,01. Nilai tersebut adalah selisih antara Arus Masuk Kas dikurangi dengan arus keluar kas. Rincian Arus Kas Bersih dijelaskan sebagai berikut.

	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>
Jumlah Arus Masuk Kas	2.380.454.167.393,22	2.198.233.319.010,83
Jumlah Arus Keluar Kas	<u>(1.651.158.954.936,21)</u>	<u>(1.638.503.983.860,87)</u>
Jumlah	729.295.212.457,01	559.729.335.149,96

5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar (Rp647.401.456.506,00) merupakan selisih antara Arus Masuk Kas dengan Arus Keluar Kas dalam lingkup Aktivitas Investasi selama Tahun 2022.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi menurut SAP Akrual adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset nonkeuangan lainnya. Dampaknya, aktivitas dari arus masuk/keluar kas Dana Cadangan, Investasi Permanen/Non Permanen penyajiannya dipindahkan dari sebelumnya pada Aktivitas Pembiayaan ke Aktivitas Investasi. Rincian dijelaskan sebagai berikut.

a. Arus Masuk Kas

Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi sebesar Rp124.475.062,00 yang merupakan penerimaan dari angsuran penjualan lelang Aset Tetap.

b. Arus Keluar Kas

Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi sebesar Rp647.525.931.568,00. Rincian Arus Keluar Kas dijelaskan pada **Tabel 5.150**.

Tabel 5.150. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
2	Perolehan Pengadaan Tanah	0,00	0,00
3	Perolehan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	1.587.300.000,00	1.175.000.000,00
4	Perolehan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	24.704.905.062,00	613.246.840,00
5	Perolehan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	7.136.757.616,00	2.348.679.000,00
6	Perolehan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	38.650.000,00	10.000.000,00
7	Perolehan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	416.000,00
8	Perolehan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	441.760.000,00	412.284.000,00
9	Perolehan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pengolahan	25.350.000,00	768.394.000,00
10	Perolehan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	0,00	0,00
11	Perolehan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	1.638.048.903,00	6.492.041.724,00
12	Perolehan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.878.693.019,00	5.604.557.150,00
13	Perolehan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	310.294.409,00	1.358.575.100,00
14	Perolehan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	898.206.290,00	1.249.844.050,00
15	Perolehan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	609.335.000,00	500.941.900,00
16	Perolehan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	851.785.400,00	1.774.000.000,00
17	Perolehan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	24.318.224.483,00	10.683.881.792,00
18	Perolehan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Umum	1.299.600.000,00	0,00
19	Perolehan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-unit Laboratorium	558.260.679,00	3.263.682.669,00
20	Perolehan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,00	17.840.000,00

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun 2022

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
21	Perolehan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit	6.109.632.702,00	10.157.964.409,00
22	Perolehan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer	6.986.426.877,00	8.454.231.409,00
23	Perolehan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Eksplorasi Geofisika	94.128.000,00	0,00
24	Perolehan Peralatan dan Mesin - Alat Keamanan dan Perlindungan	11.850.000,00	0,00
25	Perolehan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat SAR	6.000.000,00	0,00
26	Perolehan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kerja Penerbangan	29.999.970,00	0,00
27	Perolehan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Peralatan Proses/Produksi	49.500.000,00	0,00
28	Perolehan Peralatan dan Mesin - Peralatan dan Mesin - Pengadaan Rambu - Rambu Lalu Lintas Darat	428.020.000,00	214.430.000,00
29	Perolehan Peralatan dan Mesin - Peralatan Olah Raga	256.430.700,00	763.672.000,00
30	Perolehan Gedung dan Bangunan - Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	74.245.226.439,00	81.097.867.920,00
31	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Konstruksi Jalan	373.697.414.659,00	229.662.657.821,69
32	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Konstruksi Jembatan	15.750.377.744,00	24.271.612.884,00
33	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	84.405.952.071,00	71.822.834.813,52
34	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Air	82.500.000,00	22.000.000,00
35	Perolehan Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	0,00	0,00
36	Perolehan Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Bahan Perpustakaan Tercetak	141.000.000,00	46.354.000,00
37	Perolehan Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	0,00
38	Perolehan Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	279.421.000,00	116.740.000,00
39	Perolehan Aset Lainnya - Aset Tak Berwujud	9.654.880.545,00	11.273.418.412,00
40	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
41	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		647.525.931.568,00	474.177.167.894,21

c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar (Rp647.401.456.506,00). Nilai tersebut adalah selisih antara Arus Masuk Kas dikurangi dengan Arus Keluar Kas. Rincian dijelaskan sebagai berikut.

	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>
Jumlah Arus Masuk Kas	124.475.062,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	(647.525.931.568,00)	(474.177.167.894,21)
Jumlah	(647.401.456.506,00)	(474.177.167.894,21)

5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

a. Arus Kas Masuk

Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2022 sebesar Rp0,00.

b. Arus Kas Keluar

Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp3.750.000.000,00. Nilai tersebut merupakan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar (Rp3.750.000.000,00), merupakan selisih antara Arus Masuk Kas dengan Arus Keluar kas dalam lingkup Aktivitas Pendanaan selama Tahun 2022.

	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>
Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	<u>(3.750.000.000,00)</u>	<u>(2.000.000.000,00)</u>
Jumlah	(3.750.000.000,00)	(2.000.000.000,00)

5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar (Rp258.199.286,39), merupakan selisih antara Arus Masuk Kas dengan Arus Keluar Kas dalam lingkup Aktivitas Transitoris selama Tahun 2022. Rincian dijelaskan pada **Tabel 5.151**.

Tabel 5.151 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Arus Masuk Kas		
	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	151.219.152.100,29	130.285.056.487,17
	Koreksi SILPA		
	Jumlah Arus Masuk Kas	151.219.152.100,29	130.285.056.487,17
2	Arus Keluar Kas		
	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	151.252.551.386,68	130.231.660.563,17
	Koreksi SILPA	224.800.000,00	114.412.924,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	151.477.351.386,68	130.346.073.487,17
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(258.199.286,39)	(61.017.000,00)

Rincian saldo akhir kas disajikan pada **Tabel 5.152**.

Tabel 5.152 Rincian Saldo Akhir Kas

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Kenaikan / (Penurunan) Kas	77.885.556.664,62	83.491.150.255,75
2	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	370.906.054.148,00	287.414.903.892,25
3	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran & Bendahara Penerimaan	448.791.610.812,62	370.906.054.148,00
4	Kas di Kas Daerah	434.929.425.920,40	346.777.770.158,36
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	349.786.613,00
6	Kas di Bendahara Penerimaan	38.261.000,00	8.826.000,00
7	Kas di Kas BLUD	13.078.275.248,83	22.584.751.103,84
8	Kas di Bendahara FKTP	305.512.576,78	562.868.338,80
9	Kas di Bendahara Sekolah Negeri BOS Pusat/PSG	360.533.085,00	284.249.166,00
10	Kas Lainnya	79.602.981,61	337.802.768,00

Penjelasan komponen saldo akhir kas sebagai berikut.

a. Kenaikan/Penurunan Kas

Kenaikan/penurunan kas sebesar Rp77.885.556.664,42, merupakan penjumlahan dari Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan, dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris [Rp729.295.212.457,01 + (647.401.456.506,00) + (Rp3.750.000.000,00) + (Rp258.199.286,39)].

b. Saldo Awal Kas

Saldo Awal Kas adalah sebesar Rp370.906.054.148,00.

c. Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas sebesar Rp448.791.610.812,62 (Rp77.885.556.664,62 + Rp370.906.054.148,00) merupakan penjumlahan kenaikan/penurunan kas dengan saldo awal kas. Saldo Akhir Kas terdiri dari Kas di Kas Daerah sebesar Rp434.929.425.920,40, Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,00, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp38.261.000,00, Kas di Kas BLUD sebesar Rp13.078.275.248,83, Kas di Bendahara FKTP sebesar Rp305.512.576,78, Kas di Bendahara Sekolah Negeri BOS Pusat/PSG sebesar Rp360.533.085,00, dan Kas Lainnya sebesar Rp79.602.981,61 yang terdiri dari :

1. Saldo Kas Pajak pada Bendahara Dana BOSNAS pada 151 SD Negeri dan 31 SMP Negeri sebesar Rp66.050.399,60;
2. Saldo Kas Pajak pada Bendahara – Bendahara Dana BOSDA pada SD Negeri dan SMP Negeri sebesar Rp13.193.381,01; dan
3. Saldo Kas Pajak pada Bendahara FKTP sebesar Rp359.201,00.

Terdapat selisih antara Saldo Akhir Kas pada Laporan Arus Kas dengan SiLPA pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp79.603.481,61,00 (Rp448.712.007.331,01 – 448.791.610.812,62). Selisih tersebut merupakan saldo Utang PFK per 31 Desember 2022 dan terdapat juga selisih Saldo Kas Lainnya pada Neraca dengan Saldo Kas Lainnya pada Laporan Arus Kas sebesar Rp229.745.423,00 (Rp309.348.404,61 – Rp79.602.981,61) yang terdiri dari:

1. Saldo Kas Bantuan Hibah Penanggulangan Bencana Kebakaran di Kelurahan Pasar Bawah Lahat pada Bendahara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lahat sebesar Rp1.001.834,00 yang tersimpan di rekening Kas BPBD dan pencatatannya sebagai Pendapatan Hibah - LO;
2. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran BOSDA sebesar Rp14.225.677,00 yang tidak dianggarkan;
3. Saldo Kas di Bendahara Bantuan Hibah dari Masyarakat untuk penanggulangan bencana alam pada Dinas Sosial sebesar Rp58.607.912,00 yang pencatatannya sebagai Pendapatan Hibah – LO; dan
4. Saldo Kas pada Rekening PPTK Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan yang merupakan Pendapatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari PT. Mustika Indah Permai (MIP) sebesar Rp155.910.000,00 dan dicatat sebagai Pendapatan Hibah – LO.

5.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

5.6.1. Ekuitas Awal

Jumlah Ekuitas Awal sebesar Rp3.313.572.693.698,27 merupakan saldo Ekuitas Tahun 2021.

5.6.2. Surplus/Defisit LO

Surplus LO Tahun 2022 sebesar Rp658.186.228.660,27. Nilai tersebut diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

Pendapatan LO	Rp	2.493.159.598.728,32
Beban LO	Rp	(1.835.194.995.068,05)
Surplus/Defisit dari Operasi	Rp	657.964.603.660,27
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp	221.625.000,00
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp	658.186.228.660,27
Pos Luar Biasa	Rp	(0,00)
Surplus/Defisit-LO	Rp	658.186.228.660,27

5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2022 sebesar Rp9.524.355.304,96. Rincian dijelaskan sebagai berikut.

a. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan Tahun 2022 sebesar Rp0,00.

b. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Jumlah Selisih Revaluasi Aset Tetap Tahun 2022 sebesar Rp0,00.

c. Lain -Lain

Jumlah koreksi ekuitas Lain-Lain adalah sebesar Rp9.524.355.304,96. Rincian dijelaskan pada **Tabel 5.153**.

Tabel 5.153. Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Koreksi Tahun 2021 Kurang Catat Aset Tetap Tanah	45.184.392.109,48
2	Koreksi Tahun 2021 Kurang Catat Aset Tetap Peralatan dan Mesin	227.624.900,00
3	Koreksi Tahun 2021 Kurang Catat Aset Tetap Gedung dan Bangunan	1.735.042.835,00
4	Koreksi Tanah Milik Pihak Lain Tahun 2021	(1.878.683.805,00)
5	Koreksi Kurang catat atas Aset Tetap Lainnya	5.552.066,00
6	Koreksi Lebih Catat Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2021	(345.600.000,00)
7	Koreksi Lebih Catat Aset Gabungan Ekstrakom	(3.414.833.597,00)
8	Koreksi Penghapusan Aset Tetap	(10.466.552.677,81)
9	Koreksi Lebih Catat Utang BLUD Tahun 2021	23.789.620,00
10	Penghapusan Aset Lain-Lain	(15.718.110.817,16)
11	Koreksi Piutang BLUD Tahun 2021	(59.474.050,00)
12	Koreksi Piutang Aset Lain-Lain TGR Tahun 2021	(440.843.566,75)

No	Uraian	Nilai (Rp)
13	Koreksi Saldo Awal Piutang Retribusi Sewa Ruko dan Kios Pasar Lematang Tahun 2021	1.000.000,00
14	Koreksi saldo Awal Dana BOSDA Tahun 2021	610.000,00
15	Koreksi Penghapusan atas Aset Tetap-Peralatan Mesin yang merupakan Hibah pada Pihak Ketiga	(230.934.000,00)
16	Koreksi Penghapusan atas Aset Tetap-Gedung dan Bangunan yang merupakan Hibah pada Pihak Ketiga	(4.956.942.611,80)
17	Koreksi Penghapusan atas Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan yang merupakan Hibah pada Pihak Ketiga	(141.681.100,00)
	Jumlah	9.524.355.304,96

5.6.4. Ekuitas Akhir

Jumlah Ekuitas Akhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp3.981.283.277.663,50.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Informasi Umum

Kabupaten Lahat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821). Kabupaten Lahat termasuk dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Secara geografis, Kabupaten Lahat terletak antara 3,25° - 4,15° Lintang Selatan dan 102,37°-103,45° derajat Bujur Timur dengan luas wilayah 4.361,83 Km². Batas wilayah Kabupaten Lahat, sebagai berikut.

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Muara Enim;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu dan Kota Pagar Alam;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Empat Lawang.

Sebagian besar kondisi topografi Kabupaten Lahat termasuk dataran tinggi pada alur Bukit Barisan dengan puncaknya yang tertinggi Bukit Serelo dengan ketinggian kurang lebih 600m.

6.2. Organisasi

Susunan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Lahat sebagai berikut.

- Bupati : Cik Ujang, S.H.
- Wakil Bupati : H.Haryanto, S.E, M.M.
- Sekretaris Daerah : Chandra, S.H. ,M.M

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lahat. Bahwa adanya pengalihan Personil, Pendanaan, Sarana/Prasarana dan Dokumen (P3D) yang menyebabkan perubahan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat per 1 Januari 2018 dan pada Tahun 2019 diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat serta Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan ke 2 atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat sebagai berikut.

a. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Lahat membawahi 12 bagian, yaitu:

- 1) Bagian Administrasi Pembangunan;
- 2) Bagian Pemerintahan;
- 3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- 4) Bagian Organisasi;

- 5) Bagian Perekonomian;
 - 6) Bagian Hukum;
 - 7) Bagian Protokol;
 - 8) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam;
 - 9) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - 10) Bagian Perlengkapan;
 - 11) Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 12) Bagian Umum.
- b. Sekretariat DPRD
- c. Inspektorat
- d. Dinas

Terdapat 24 Dinas yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lahat, yaitu:

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2) Dinas Kesehatan;
- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 6) Dinas Sosial;
- 7) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 8) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 9) Dinas Ketahanan Pangan;
- 10) Dinas Lingkungan Hidup;
- 11) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 12) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 13) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 14) Dinas Perhubungan;
- 15) Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 16) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 17) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
- 18) Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- 19) Dinas Perpustakaan;
- 20) Dinas Perikanan;
- 21) Dinas Pariwisata;
- 22) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
- 23) Dinas Perkebunan; dan
- 24) Dinas Perdagangan.

e. Badan

Terdapat tujuh Badan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lahat, yaitu:

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 2) Badan Pendapatan Daerah;
- 3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 4) Badan Kesatuan dan Politik;
- 5) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 6) Badan Penelitian dan Pengembangan; dan
- 7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

f. Kecamatan/Desa/Kelurahan

Kabupaten Lahat terbagi dalam 24 wilayah kecamatan, 17 kelurahan dan 360 desa.

6.3. Kejadian Setelah Tanggal Neraca

Pemerintah Kabupaten Lahat mempunyai saldo Utang Jangka Pendek Lainnya pada 5 (lima) SKPD sebesar Rp7.891.762.736,68. Atas nilai utang tersebut terdapat utang atas pembangunan Gedung dan Bangunan, Jalan, Jembatan dan Rambu – Rambu sebesar Rp5.354.775.991,14 setelah dikurangi kekurangan volume. Pemerintah Kabupaten Lahat masih mempunyai komitmen kewajiban pembayaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp11.630.217.623,00. Sampai dengan awal tahun 2023 sudah selesai 100%.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dasar perhitungan Iuran bagi Peserta pekerja Penerima Upah (PPU) untuk Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNS, Prajurit atau Anggota Polri mengalami perluasan dari sebelumnya terdiri atas **Gaji atau Upah Pokok dan Tunjangan Keluarga** menjadi terdiri atas **Gaji atau Upah Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum, Tunjangan Profesi, dan Tunjangan Kinerja atau Tambahan Penghasilan bagi PNS Daerah**. Hal ini mengakibatkan penambahan kewajiban iuran bagi pemerintah daerah sebagai pemberi kerja dan bagi peserta PPU. Sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, Pemerintah Kabupaten Lahat belum mencatat tambahan kewajiban tersebut karena nilai tambah kewajiban tersebut masih dalam proses rekonsiliasi dengan BPJS Kantor Cabang Pembantu Lahat dan BPJS Kantor Cabang Lubuk Linggau.

BAB VII
PENUTUP

Laporan Keuangan pemerintah harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh atas kegiatan pemerintah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Lahat telah berusaha menyajikan dan mengungkapkan secara penuh atas kegiatan-kegiatan selama Tahun 2022 yang bersumber dari APBD Tahun 2022 dalam Laporan Keuangan.

Proyeksi Pendapatan Daerah dianggarkan Tahun 2022 sebesar Rp2.233.164.766.531,00 atau mengalami peningkatan sebesar 8,04% dari anggaran Tahun 2021 sebesar Rp2.067.033.883.961,00. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022 sebesar Rp2.380.578.642.455,22 atau 106,60% dari pagu anggaran dan mengalami peningkatan 8,30% dari realisasi Tahun 2021 sebesar Rp2.198.233.319.010,83 .

Jumlah anggaran Belanja Daerah Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp2.576.228.009.902,00 atau mengalami peningkatan 10,01% dibanding anggaran Belanja Daerah 2021 sebesar Rp2.341.721.562.074,00. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022 sebesar Rp2.298.684.886.504,21 atau 89,23% dari anggaran Belanja Daerah dan mengalami peningkatan 8,80% dari realisasi Belanja Daerah Tahun 2021 sebesar Rp2.112.681.151.755,08.

Surplus (Defisit) Tahun 2022 dianggarkan defisit sebesar (Rp343.063.243.371,00) dan terealisasi surplus sebesar Rp81.893.755.951,01. Realisasi Pembiayaan Tahun 2022 berupa Penerimaan Pembiayaan berasal dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp370.568.251.380,00. Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Penyertaan Modal (investasi) sebesar Rp3.750.000.000,00. Total Pembiayaan Neto sebesar Rp366.818.251.380,00 atau 106,92% dari anggaran sebesar Rp343.063.243.371,00.

Pada akhir Tahun 2022, jumlah Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Lahat setelah penyusutan sebesar Rp2.883.408.786.034,73 dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp2.724.353.203.215,17 mengalami peningkatan sebesar Rp159.055.582.819,56 atau 5,84%. Kewajiban Tahun 2022 sebesar Rp11.981.997.005,04 merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Nilai tersebut dari Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp4.087.598.314,95 atau 51,78%. Kenaikan Kewajiban ini cukup signifikan dikarenakan ada penambahan kewajiban di Tahun 2022 sebesar Rp10.886.391.744,61, sedangkan untuk Kewajiban Tahun 2021 yang sudah dilunasi sebesar Rp6.798.793.429,66 dari jumlah Kewajiban Tahun 2021 sebesar Rp7.894.398.690,09.


BUPATI LAHAT,
CIK UJANG, S.H.